

**KADERISASI**  
**KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH**  
**KALIMANTAN TENGAH**



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta**

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a.penerbitan Ciptaan; b.Penggunaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentrasformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Drs. Surya Sukti, M.A.**  
**Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., M.H.**  
**Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.**  
**Maimunah, M.HI.**

# **KADERISASI**

## **KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH**

### **KALIMANTAN TENGAH**



**Penerbit Lakeisha**  
**2021**



## **KADERISASI KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH**

### **Penulis:**

Drs. Surya Sukti, M.A.

Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., M.H.

Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.

Maimunah, MHI.

Editor: Andriyanto, S.S., M.Pd.

Layout : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Design Cover : Tim Lakeisha

Cetak I Februari 2021

15.5 cm × 23 cm, 148 Halaman

ISBN: 978-623-6948-40-8

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha  
(**Anggota IKAPI No.181/JTE/2019**)

### Redaksi

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001, Pucangmiliran,  
Tulung, Klaten, Jawa Tengah

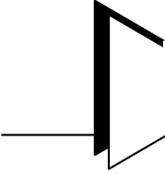
Hp. 08989880852, Email: [penerbit\\_lakeisha@yahoo.com](mailto:penerbit_lakeisha@yahoo.com)

Website : [www.penerbitlakeisha.com](http://www.penerbitlakeisha.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit





# KATA PENGANTAR

---

Alhamdulillahirabbil'alamiin....

**K**ami panjatkan kepada *Allahu Rabby Jalla Jalaaluh*, Tuhan seru sekalian alam bahwa Tim Penulis telah menyelesaikan buku yang berjudul “Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah”. Buku merupakan hasil penelitian tahun 2019 yang mengangkat tema tentang kaderisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah.

Buku ini berupaya untuk menelusuri lebih lanjut mengenai proses kaderisasi kepemimpinan yang berlangsung di persyarikatan Muhammadiyah. Karena persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan masyarakat sipil (*civil society movement*) yang mempunyai kekuatan politik dan turut menentukan arah perjalanan bangsa. Penulisan pada buku ini melibatkan 4 Kabupaten dan 1 kota ini, Tim elah melakukan pembagian tugas dalam mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada para narasumber.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dalam rangka untuk kesempurnaan buku ini.

Palangka Raya, Desember 2020

Tim Penulis





# SAMBUTAN

## DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA

**M**uhammadiyah, selain Nahdlatul Ulama, merupakan salah satu organisasi terbesar umat Islam di Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912 ini banyak dikaji dan diteliti baik oleh sarjana dalam negeri maupun dari mancanegara. Antara lain Nakamura dari Jepang yang meneliti dinamika dan perkembangan Muhammadiyah dari masa ke masa. Penelitian tentang Muhammadiyah dari sarjana dalam negeri antara lain dari Su'aidy yang meneliti dinamika sosial politik Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Buku yang ditulis oleh saudara Surya Sukti dan kawan-kawan ini merupakan hasil penelitian tahun 2019 yang mengangkat tema tentang kaderisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Wacana tentang kaderisasi Muhammadiyah berkaitan erat dengan peran para kader Muhammadiyah di bidang kehidupan sosial politik pada khususnya dan dinamika perkembangan bangsa Indonesia pada umumnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam buku ini bahwa fungsi kaderisasi Muhammadiyah menghasilkan pemimpin di tiga ranah yaitu sebagai pemimpin persyarikatan, sebagai pemimpin umat dan sebagai pemimpin bangsa. Karena itu kajian tentang kaderisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah menjadi fokus yang dibicarakan dalam buku ini sebagai bentuk diskursus yang

melihat bagaimana kaderisasi dilakukan dan sekaligus melihat peran para kader yang dihasilkan dalam arti sumbangsih mereka terhadap kehidupan masyarakat dan peran mereka dalam kehidupan sosial politik di daerah ini.

Hasil penelitian dalam buku ini dapat memperkaya kajian tentang kekuatan masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Sebagaimana diketahui bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua kekuatan masyarakat sipil di Indonesia yang mempunyai sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Materi dalam buku ini juga dapat memperkaya wawasan kita tentang kiprah dan peran kader Muhammadiyah dalam ikut serta menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kami menyambut baik kehadiran buku ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan budaya akademik dan budaya literasi bagi segenap sivitas akademika Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada khususnya serta sivitas IAIN Palangka Raya dan segenap pembaca pada umumnya. Kami berharap ke depan semakin banyak lagi karya-karya dosen untuk menjadi sumbangsih pemikiran bagi kemajuan daerah Kalimantan Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Selamat membaca dan menikmati.

Palangka Raya, 1 Desember 2020  
Dekan,

**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**



# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SAMBUTAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii

## **BAB I SKETSA HISTORIK MUHAMMADIYAH**

<b>KALIMANTAN TENGAH</b> .....	1
A. Sejarah Perkembangan .....	1
B. Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Era Reformasi .....	10

## **BAB II KONSEP KADERISASI KEPEMIMPINAN**

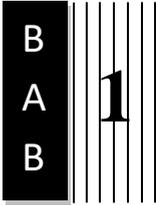
<b>PUBLIK MUHAMMADIYAH</b> .....	15
A. Pemaknaan Istilah Kader .....	15
B. Pengertian Kepemimpinan Publik Muhammadiyah .....	22
C. Pola Perkaderan Muhammadiyah.....	24
D. Sistem Kaderisasi .....	30

## **BAB III STRATEGI KADERISASI KEPEMIMPINAN**

<b>MUHAMMADIYAH</b> .....	41
A. Pendekatan Birokratis .....	41
B. Pendekatan Amal Usaha Muhammadiyah .....	49
C. Pendekatan Politis .....	63

<b>BAB IV PROBLEMATIKA MUHAMMADIYAH</b>	
<b>DI KALIMANTAN TENGAH.....</b>	<b>77</b>
A. Krisis Kader Muhammadiyah .....	77
B. Krisis Kader Ideologi .....	81
<b>BAB V RESPON KADER MUHAMMADIYAH</b>	
<b>TERHADAP KEPEMIMPINAN PUBLIK</b>	
<b>KALIMANTAN TENGAH DI ERA REFORMASI.....</b>	<b>89</b>
A. Achmad Diran .....	89
B. Ade Supriyadi .....	111
C. Muhammad Riban Satia.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>144</b>
<b>SINOPSIS .....</b>	<b>148</b>





## SKETSA HISTORIK MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH

### A. Sejarah Perkembangan

**H**adirnya organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari konteks keinginan dari elit Muhammadiyah untuk memperlebar jangkauan persebaran ideologi organisasi yang dituangkan ke dalam visi dan misi ke seluruh pelosok nusantara. Kehadiran Muhammadiyah di Kalimantan Tengah secara kultural sebagai sebuah gerakan ideologi yang hanya mengandalkan beberapa orang saja. Kabupaten Kapuas sebagai bagian dari kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah dalam catatan sejarah merupakan kabupaten yang pertama kali bersinggungan langsung dengan ideologi Muhammadiyah. Mereka adalah para saudagar sekaligus sebagai *mubaligh* (penyampai ajaran Islam) yang datang dari Alabio- suatu daerah di Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.<sup>1</sup> Mereka meyebarkan ideologi Muhammadiyah mengandalkan jalur Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kalimantan Tengah seperti Sungai Mentaya di Sampit dan Sungai Kapuas.

---

<sup>1</sup> A. Qismany, *Sejarah Muhammadiyah Kalsel, Kaltim dan Kalteng* dalam <http://islambanjar.blogspot.com/2012/06/sejarah-Muhammadiyah-kalsel-kaltim-dan.html> diunduh Agustus 2018

Dalam catatan A. Qismany selanjutnya bahwa Almarhum H. Hasbullah Yasin<sup>2</sup> pernah lama menjadi guru agama di situ. Dalam perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, maka berdirilah ranting-ranting Muhammadiyah di Mandumai, Danau Rawah, Dadahub, Jangkang, Kuala Kurun, dan lain-lain, semua di tengah-tengah masyarakat yang belum pernah mengenal suatu agama. Jadi benar-benar masuknya Muhammadiyah ke daerah Kalimantan Tengah ini merintis suatu jalan baru. Kemudian Muhammadiyah masuk ke Tumbang Sinamang yang dibawa dan dikembangkan oleh alm. saudara Abdul Manaf, kemudian berdiri pula ranting Muhammadiyah di Bapinang Ulu, menyusul pula ranting Muhammadiyah di Tanjung Jeriangau, kemudian berdiri pula Cabang Sampit, Ranting Jamaras, Ranting Tumbang Samba, Ranting Kasongan, dan Ranting Tumbang Manjul. Dalam hubungan ini, Bapak Tamin dan Guru Juriat dari Solo telah berjasa besar dalam membangun Muhammadiyah di Kuala Kapuas dan sekitarnya pada tahun 1925 dan tahun 1927 oleh Hoofd Besteur di

---

<sup>2</sup> Alm. KH. Hasbullah Yasin sejak hidupnya sebagai guru agama yang memiliki aliran dan pandangan hidup yang khas dengan sifat-sifat *wara'* dan *zuhud*, yang lebih menekankan hidup kerohanian walaupun beliau sekali-sekali ikut juga mengusahakan perekonomian/perindustrian yang didapatnya dari hasil karya menelaah kitab-kitab besar berbahasa Arab seperti *Daa' Iratul Ma'arif*. Ciri-ciri dari peri hidup alm. K. H. Hasbullah Yasin sesuai sekali dengan namanya, beliau mempunyai perhitungan yang teliti untung dan ruginya dinilai dari sudut iman dan taqwallah. Sinar iman dan taqwa seolah-olah selalu menghiasi wajah almarhum tersebut almarhum lebih banyak menyepikan dirinya daripada sendagurau yang tak tentu. Kalau beliau berkata atau berpidato hatta bergurau sekali pun, di mana semuanya berbau kerohanian dan agama dan tanda berpikir yang penuh penyelidikan dan kebijaksanaan. Kehilangan beliau cukup mengharukan hati segenap lapisan masyarakat Muhammadiyah dan kaum muslimin yang sadar akan arti ulama, karena almarhum selain aktif dalam Muhammadiyah, juga menjadi pelopor para alim ulama ke arah kesadaran membela tanah air dan kehormatan agama alm. H. Hasbullah Yasin dinyatakan dengan resmi sebagai pahlawan bangsa dan mendapat bintang gerilya dari Kepala Begara RI. Beliau memiliki jasmani yang lemah, tetapi memiliki semangat yang membaja pantang menyerah.

Jogjakarta ditetapkan Muhammadiyah di Kuala Kapuas menjadi cabang. Walaupun Muhammadiyah Cabang Kuala Kapuas lebih dahulu ketetapannya menjadi cabang daripada Muhammadiyah Cabang Alabio, namun Muhammadiyah daerah Kalimantan Tengah ini tidak sepesat Muhammadiyah Cabang Alabio dan sekitarnya. Hal itu dapat dimaklumi oleh karena kekurangan tenaga *muballigh* dan pemimpin. Juga karena keadaan alam daerah Kalimantan Tengah ini tidak seperti daerah Hulu Sungai Utara dan Banjarmasin. Daerah Kalimantan Tengah yang begitu luas, sedang perhubungan antara satu kota dengan kampung-kampungnya sangat sukar dan lambat, karena sebagian besar hubungannya hanyalah air/sungai. Meskipun demikian, Muhammadiyah Cabang Kuala Kapuas dapat juga mengadakan konferensi daerah yang juga dihadiri oleh seluruh cabang/ranting dan anggota pusat pimpinan dari Jogjakarta. Hingga sekarang Muhammadiyah Cabang Kuala Kapuas dapat berjalan dengan pesat dengan segala amal usahanya di bidang sosial, pendidikan, dan pengajaran dengan mendirikan sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan surau-surau.<sup>3</sup>

Catatan A. Qismany tersebut memberikan pemahaman bahwa kedatangan Muhammadiyah sebagai paham sesungguhnya bersamaan dengan kedatangannya di daerah Alabio di Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Bahkan Muhammadiyah sebagai organisasi dinyatakan berdirinya sebagai cabang dari Jogyakarta sekitar tahun 1925-1927. Tidak jauh berbeda dengan penemuan penulisan yang dilakukan oleh Prof. Dr. H.M. Norsanie Darlan, MS berdirinya Muhammadiyah di Kapuas sejak tahun 1926 di desa Anjir Sarapat, Kecamatan Kapuas Timur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Norsanie Darlan, dkk., Sejarah Muhammadiyah Kalimantan tengah, (Palangka Raya: SDM Perkasa Palangkaraya, 2013), h. 20

Penulis dari Universitas Palangka Raya (UPR) Prof. Dr. H.M. Norsanie Darlan, MS PH bersama tim menemukan keberadaan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1926 di desa Anjir Sarapat. Sebagai salah satu bukti sejarah keberadaan Muhammadiyah di Kuala Kapuas sejak 1926 antara lain sekolah dan masjid, namun tak mengetahui siapa pendiri atau perintisnya. Tepatnya di Mambulau Hulu Mandomai Hulu berdiri Masjid Muhammadiyah yang cukup megah, merupakan situs peninggalan sebagai bukti bahwa ada orang pendatang (da'i) dari Yogyakarta yang berpaham Muhammadiyah.

Terbentuknya organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah tergolong unik. Muhammadiyah sebagai organisasi mempunyai tata aturan pembentukan organisasi dalam setiap satuan organisasi terkecil tingkat ranting hingga tingkat pusat. Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah bahwa pembentukan organisasi Muhammadiyah dimulai dari tingkat satuan organisasi yang terkecil yakni tingkat ranting hingga kemudian pembentukan Muhammadiyah tingkat cabang dan seterusnya. Organisasi Muhammadiyah tingkat ranting itu setara dengan kekuasaan wilayah desa. Muhammadiyah tingkat cabang berada di wilayah kecamatan, Muhammadiyah tingkat daerah ada di wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan Muhammadiyah tingkat wilayah berada di ibu kota propinsi. Pembentukannya pun berawal dari tingkat ranting. Beberapa ranting bergabung membentuk Muhammadiyah tingkat cabang dan begitu seterusnya.

Tidak demikian halnya dengan pembentukan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah yang telah disebut di atas tadi tergolong unik. Letak keuniknya adalah bahwa pembentukan organisasi Muhammadiyah mengambil pola *top down* (dari atas ke bawah), Muhammadiyah tingkat daerah yang dibentuk terlebih dahulu, baru kemudian membentuk Muhammadiyah tingkat

cabang dan kemudian ranting. Dengan kata lain pembentukan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan tengah didasarkan pada teori *trickle down effect* yang pembentukannya merupakan efek tetesan berkah dari keberadaan organisasi Muhammadiyah yang ada di atasnya. Hal ini tidak dibilang aneh manakala alasan pembentukannya tergantung pada realitas sosial yang melingkupi kondisi wilayah Kalimantan Tengah yang sama sekali tidak mendukung keberadaan pembentukannya dengan menggunakan pola *bottom up* (dari bawah ke atas) dari sekup tingkat kecamatan (ranting).

Sebagaimana pernyataan informan Mukhtar, seorang pengurus Muhammadiyah tingkat wilayah yang mengatakan bahwa pembentukan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah ini berbeda dengan pembentukan Muhammadiyah di Jawa. Jika pembentukan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah ini mengandalkan dari bawah (ranting), kapanpun juga tidak akan pernah terbentuk.<sup>5</sup>

Senada dengan pernyataan Mukhtar, yakni Syairi Abdillah. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah mengatakan bahwa, “Muhammadiyah Kalteng tidak sesuai dengan AD/ART dalam pembentukannya. Karena bila pembentukannya sesuai dengan aturan AD/ART tidak terbentuk Muhammadiyah Kalteng.”

Sehingga dengan demikian dengan alasan kebutuhan praktis dan politis, maka dibentuklah Pengurus Wilayah Muhammadiyah pada tahun 1977 melalui musyawarah Wilayah yang diadakan di gedung Tambun Bungai Kota Palangka Raya. Dalam Musyawarah wilayah tersebut dipilih secara aklamasi H. Amberi Lihi sebagai ketua dan Imam Mardhani, BA sebagai sekretaris. Berikut daftar pengurus wilayah dari tahun 1977 – sekarang.

---

<sup>5</sup> Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2018

Tabel 1  
Pengurus Wilayah Muhammadiyah Dari Masa ke Masa

No.	Periode	Ketua	Sekretaris
1	1977-1985	H. Amberi Lihi	Imam Mardhani, BA.
2	1985-1990	H. Dase Durasid	Drs. H. Abubakar HM, M. Ag
3	1990-1995	H. Darbi Zainullah, BA	Aspirin Hanafi
4	1995-2000	Ir. H. Sjachril Samad	Drs. H. Rimi Safri
5	2000-2005	Drs. H. Saiful Fadhlani	Drs. H. Rimi Safri
6	2005-2010	Drs. H. Muchtar, M. Si	Drs. H. Bulkani, M. Pd
7	2010-2015	Dr. H. Ahmad Syar'i, M. Pd	H.M. Syairi Abdullah
8	2015-2020	Drs. H.M. Yamin Mukhtar, Lc., M. Pd.I	H.M. Syairi Abdullah

Sumber: <http://kalteng.Muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>

Kehadiran organisasi Muhammadiyah ke Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah sejatinya sangat diharapkan oleh segenap warga Muhammadiyah. Sesuai dengan *platform* organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 di Yogyakarta,<sup>6</sup> yakni *amar makruf nahi munkar* (penegakan perintah Allah dan pencegahan terhadap hal yang mungkar). Jargon tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam gerakan-gerakan dakwah nyata yang bergerak dalam pendidikan, kesehatan, panti Asuhan, mendirikan masjid-masjid, perwakafan, menerbitkan majalah, surat kabar, dan buku-buku. Pengimplementasian gerakan-gerakan dakwah yang nyata (*dakwah bi al-hal*) ini mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pengisian

<sup>6</sup> Pada saat kelahirannya di Yogyakarta, Muhammadiyah mempunyai semboyan dan jargon penegakan konsep “*Al-amar bil ma’ruf wa al nhyau ‘ani al-munkari*”, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Nama Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad Saw. dalam memerangi keterbelakangan dalam masyarakat Islam. Lihat Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kennegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996). h. 67

pembangunan kemerdekaan negara Indonesia. Inilah sumbangsih organisasi Muhammadiyah yang sangat besar bagi bangsa ini yang tidak akan pernah dilupakan oleh ibu pertiwi. Tidak terkecuali kehadiran organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Islam khususnya dan rakyat pada umumnya.

Kehadiran organisasi Muhammadiyah di kota Palangka Raya bisa dikatakan terlambat bila dibanding dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Katingan. Hal ini dikarenakan akses jalan lewat darat baru tembus tahun 2004. Sementara kabupaten-kabupaten tersebut sudah ada akses jalan lewat sungai. Pada awalnya berdirinya Muhammadiyah di Kota Palangka Raya, secara politis pertumbuhan dan perkembangannya sangat lambat. Anggota-anggota pengurus banyak mengalami intimidasi dan ancaman pada saat berdirinya organisasi Muhammadiyah di Palangka Raya. Secara demografis, penduduk Palangka Raya dilihat dari rasio jumlah penduduknya yang beragama Islam tidak mayoritas. Resistensi dari kelompok “sebelah”<sup>7</sup> begitu kuat. Informan Mukhtar mengatakan, “Pada saat awal berdirinya Muhammadiyah di Palangka Raya ini, barang siapa yang mengaku dan memperlihatkan keikutsertaannya sebagai kader Muhammadiyah atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka akan dihabisi karirnya”. Inilah bentuk intimidasi dan ancaman kepada anggota dan kader Muhammadiyah pada waktu itu. Betapa sulitnya Muhammadiyah mengadakan kegiatan yang berorientasi pada jargon-jargon *amar ma’ruf nahi munkar* secara elegan dan leluasa.

Masih menurut Mukhtar, “Perlakuan yang tidak baik terhadap kader Muhammadiyah di Pangka Raya tidak terlepas dari

---

<sup>7</sup> Untuk menyebut keberadaan masyarakat non muslim.

sifat dan sikap kritis mereka yang notabenenya kaum terpelajar dan terdidik. Hal ini berbeda dengan anggota dan kader Nahdlatul Ulama (NU). Mereka umumnya kaum dagang yang tidak memiliki sikap militansi”.

Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, tidak membuat surut jiwa *struggle* mereka untuk melakukan dakwah sesuai apa yang menjadi tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Mereka berusaha memeras otaknya sambil menyusun strategi agar Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dapat hidup dan eksis. Seiring dengan rasio jumlah penduduk kota Palangka Raya yang beragama Islam, hari demi hari mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat mobilitas penduduk dari daerah lain bahkan pekerja-pekerja dari Jawa, lambat-laun menambah jumlah rasio penduduk muslim di kota Palangka Raya. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Islam di Kota Palangka Raya, upaya-upaya intimidasi terhadap anggota kader Muhammadiyah menjadi redup dan hilang. Sehingga dengan demikian mereka sebagai anggota dan kader Muhammadiyah dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat Muhammadiyah besar seperti yang terlihat pada saat ini.

Organisasi Muhammadiyah tingkat daerah yang berada di ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa. *Icon* Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) terlihat megah ketika masuk kota Palangka Raya dari arah Banjarmasin menuju Jalan R.T.A. Milono. Tampak gedung Rumah Sakit Islam Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya berdiri dengan kokoh seakan siap menyapa dengan ramah untuk memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Perkembangan dan pertumbuhan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tidak lepas dari kegigihan kader Muhammadiyah mengelolanya dengan baik.

Perjuangan awal yang terasa begitu sulit dan perjuangan yang hebat sehingga menghasilkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sangat bermanfaat bagi orang banyak yang tidak terbatas pada warga Muhammadiyah semata, akan tetapi seluruh warga Kalimantan Tengah tanpa membedakan agama, suku, dan bangsanya.

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Bidang kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya bisa dibilang maju bila dibanding dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang dikembangkan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Hal ini menurut Mukhtar, “dikarenakan semangat anggota kader Muhammadiyah begitu militan ketika menghadapi masa-masa sulit awal perjuangan Muhammadiyah di tahun 1980-an”. Semangat perjuangan kader Muhammadiyah dalam menjaga eksistensi organisasinya tetap terjaga dengan baik hingga sekarang. Mentalitas untuk terus menumbuhkembangkan organisasi Muhammadiyah tertanam dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabuapten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, maka secara *de facto* dan *de jure* kabupaten-kabupaten tersebut menjadi kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dari 5 kabupaten yang telah terbentuk sebelumnya,<sup>8</sup> yakni Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi Kabupaten Pulang Pisau dengan ibu kota Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota Kuala Kurun, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Timur dengan ibu kota Tamiyang Layang, Kabupaten Kota Waringin

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002

Timur dimekarkan menjadi Kabupaten Katingan dengan ibu kota Kasongan dan Kabupaten Seruyan dengan ibu kota Kuala Pembuang. Sedangkan Kabupaten Kota Waringin Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Lamandau dengan ibu kota Nanga Bulik dan Kabupaten Sukamara dengan ibu kota Sukamara. Sementara Kabupaten Barito Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota di Puruk Cahu.

Oleh karena itu saat ini Kalimantan Tengah telah memiliki 13 Pengurus Daerah Muhammadiyah dari 14 Kabupaten yang ada sebagai akibat dari pemekaran wilayah. Hanya Kabupaten Gunung Mas saja yang belum ada kepengurusan Daerah Muhammadiyah. Masing-masing Pengurus Daerah Muhammadiyah memiliki karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan waktu kedatangan orang-orang Muhammadiyah yang datang menyebarkan dan kemudian membentuk organisasi di wilayah tersebut. Ada 5 Kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah yang kepengurusan Daerah Muhammadiyah yang dapat dikatakan mapan dari segi organisasi. Indikasinya Pengurus Daerah Muhammadiyah telah mampu menghadirkan Amal Usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan, pendidikan, dan Panti Asuhan. Lima kabupaten 1 kota tersebut adalah Kota Palnagka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Barito Utara. Lima Kabupaten ini memang dari awal telah membidani terlaksananya Musyawarah Wilayah I pada Tahun 1983 yang waktu itu Pengurus Wilayah diketuai oleh H. Ambri Lih.

## **B. Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Era Reformasi**

Kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi tapal batas. Historiografi Indonesia kontemporer menyebut zaman kekuasaan Soeharto sebagai "Era Orde Baru", dan setelah 21 Mei sebagai "Era

Reformasi".<sup>9</sup> Tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi dalam segala lini kehidupan sangat besar.

Era reformasi ditandai dengan telah dibukanya kran demokrasi yang selebar-lebarnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi menuntut negara mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampasnya. Rakyat menuntut keadilan, perlakuan yang sama di depan hukum, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak berserikat, hak berkumpul, hak berpolitik, hak kontrol kepada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*), menguatnya peran *civil society* (masyarakat madani).

Era reformasi telah mengubah arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk umat Indonesia. Oleh karena itu demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang utopis dan berada dalam alam retorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus untuk diimplementasikan dalam interaksi sosial, kebangsaan dan kenegaraan.<sup>10</sup>

Kehidupan demokrasi yang telah diberikan oleh negara melalui gerakan reformasi, pada tataran yang makro akan mengubah reorientasi baik organisasi sosial keagamaan maupun organisasi sosial non keagamaan, terlebih organisasi sosial politik. Organisasi-organisasi tersebut harus mampu bertegur sapa untuk memberikan respon yang positif terhadap perubahan iklim demokrasi yang sedang *booming* saat ini. Tidak terkecuali organisasi sosial keagamaan yang mengklaim dirinya sebagai

---

<sup>9</sup> 20 Tahun Reformasi: Yang Terjadi Sepanjang Januari 1998 dalam <https://tirto.id/20-tahun-reformasi-yang-terjadi-sepanjang-januari-1998-cJBd> diunduh tanggal Agustus 2018

<sup>10</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 123

organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) di negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Menurut hemat penulis bahwa, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, dewasa ini telah dihantam oleh beberapa gelombang. Pertama adalah gelombang masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan globalisasi. Kedua, gelombang dibukanya kran demokrasi yang memberikan ruang gerak kebebasan yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa, sehingga melahirkan era reformasi.

Di era reformasi ini Muhammadiyah harus dapat berinteraksi dan memberikan respon yang positif bagi keberlanjutan organisasinya di masa mendatang. Pada tataran itulah Muhammadiyah telah melakukan reorientasi gerakan dan pemikiran. Kebetulan Muhammadiyah dari kelahirannya, saat ini telah memasuki abad baru, abad seratus tahun yang kedua dari kelahiran Muhammadiyah tahun 1912.

Meskipun demikian Muhammadiyah dalam sejarahnya telah mampu bangkit dan memberikan respon yang sangat positif sesuai dengan kebutuhan zamanya. Dalam buku *Pernyataan Muhammadiyah Abad Kedua* telah disebutkan bahwa:

“Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang sarat dinamika yang dihadapi dengan penuh keikhlasan dan perjuangan tanpa kenal lelah. Di era kolonial Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Menjelang dan pada awal kemerdekaan, Muhammadiyah berperan aktif dalam meletakkan fondasi negara-bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 19945. Pada masa Orde Lama Muhammadiyah istiqamah dalam menegakkan Negara Republik Indonesia agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, disertai usaha-usaha modernisasi sosial untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Di era Orde Baru, Muhammadiyah terus berkiprah dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa, disertai sikap hikmah dalam menghadapi situasi politik nasional. Pada era Reformasi, Muhammadiyah menjadi pilar penting masyarakat madani (*civil society*) dan memelopori era baru Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah. Pergerakan Muhammadiyah dalam lintasan satu abad itu merupakan perwujudan dari pembaruan (*tajdid*) yang dipelopori Kyai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri gerakan Islam ini. Spirit pembaruan telah menjadi kesadaran yang melekat dalam gerakan Muhammadiyah generasi awal untuk memahami dan menerjemahkan kembali ajaran Islam ke dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kemasyarakatan yang mencerahkan. Setiap babakan sejarah telah dilalui Muhammadiyah dengan sikap optimis untuk terus berjuang mewujudkan Islam dalam pencerahan kehidupan.<sup>11</sup>

Pernyataan itu memberi penegasan kepada kita bahwa, dalam sejarahnya, Muhammadiyah mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak kelahirannya, dalam setiap fase perjuangan yang telah dijalani bangsa ini baik masa kolonial, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa orde reformasi Muhammadiyah selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.

Muhammadiyah Kalimantan Tengah sebagai bagian organisasi Muhammadiyah yang berkedudukan dan berada di Provinsi Kalimantan Tengah sejatinya juga akan menghadapi persoalan yang sama seperti dengan Muhammadiyah-Muhammadiyah di Provinsi yang lain yang berada di Indonesia,

---

<sup>11</sup> Zuly Qodir, *Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad kedua*, (Yogyakarta,:Penerbit Kanisius, 2010), h. 51

apalagi di pulau Jawa. Akan tetapi Muhammadiyah Kalimantan Tengah tengah menghadapi persoalan-persoalan yang sangat spesifik internal agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Penulisan kali ini tengah menemukan persoalan-persoalan yang sifatnya lokalistik.

## KONSEP KADERISASI KEPEMIMPINAN PUBLIK MUHAMMADIYAH

### A. Pemaknaan Istilah Kader

**K**aderisasi dalam sebuah organisasi mutlak dibutuhkan dalam rangka proses regenerasi sebuah organisasi. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Indonesia tidak luput dari perhatian regenerasi kaderisasi dalam keberlangsungan Muhammadiyah ke depan.

Memaknai peristilahan *kader* bisa dilihat dari perspektif etimologinya, bahwa istilah *kader* berasal dari bahasa Inggris, *cadre* yang berarti bingkai<sup>12</sup> atau dari bahasa Perancis *la cadres* yang berarti anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan.<sup>13</sup>

Kader adalah orang atau individu yang bakal menduduki posisi penting ataupun sebagai pelengkap dalam tataran organisasi militer, baik pada unit kerja yang sudah ada atau unit kerja yang akan dibentuk.

Kader juga mempunyai arti bingkai yang dimaksud adalah bahwa orang-orang yang terdapat dalam sebuah organisasi mampu

<sup>12</sup>Arti Kader dan Perkaderan oleh Bayu Wandira Yudha dalam <https://www.scribd.com/doc/54057570/Arti-Kader-Dan-Perkaderan>, diunduh 3 Agustus 2018

<sup>13</sup>Majelis Pendidikan Kader, *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*, Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah, 2016, h.

membangkai kelangsungan organisasi karena mempunyai kapasitas pengetahuan yang memadai, kepiawaian, keterampilan yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut.

Sedangkan kader dalam pengertian terminologi, sebagaimana yang terdapat dalam buku *Pedoman Majelis Kader Pasal 1 ayat 4* ditegaskan bahwa, kader adalah anggota inti yang terlatih serta memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita persyarikatan. Jadi, jelas bahwa orang-orang yang berkualitas itulah yang terpilih dan berpengalaman dalam berorganisasi, taat asas dan berinisiatif, yang dapat disebut sebagai kader<sup>14</sup>. Pengertian kader di sini sudah dipakai dalam konteks organisasi persyarikatan Muhammadiyah yakni orang yang terpilih dan terlatih sebagai penggerak dan ujung tombak dalam menjalankan keorganisasian. Maju dan mundurnya serta hidup dan matinya persyarikatan Muhammadiyah tergantung pada kadernya.

Normuslim, salah seorang pengurus di Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, memaknai kader sebagai orang yang dapat menggerakkan organisasi, itulah yang disebut kader.<sup>15</sup> Dia mengatakan bahwa istilah kader ibarat lingkaran yang mempunyai beberapa lapisan. Lapisan pertama sebagai inti yang disebut kader, lapisan kedua disebut pengurus, lapisan ketiga disebutnya anggota, dan lapisan keempatnya disebut simpatisan. Pengibaran istilah kader yang berada pada lingkaran yang paling dalam tersebut untuk mempermudah pembedaan antara kader, anggota, pengurus, dan simpatisan. Seorang kader pasti dia seorang pengurus dan anggota dari organisasi. Tapi seorang pengurus dan anggota belum tentu kader organisasi.

---

<sup>14</sup> Majelis Pendidikan Kader, *Ibid*.

<sup>15</sup> Wawancara dengan informan dilakukan di kediamannya Jl. Zamrut Palangka Raya Pada tanggal 26 Agustus 2018

Sementara Amir, seorang kader Muhammadiyah Barito Timur memaknai kader adalah orang yang dapat membagi waktu (menyisihkan waktu untuk organisasi dan aktivitasnya) apa yang bisa diperbuat untuk Muhammadiyah<sup>16</sup>

Pernyataan itu mengandung makna bahwa sejatinya seorang anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang mempunyai sebutan “kader” adalah orang yang mau bekerja untuk organisasi dengan tanpa pamrih dengan meluangkan dan menyisihkan waktu dalam menggerakkan aktivitas organisasi tersebut.

Dengan kata lain, bahwa kader itu merupakan jantungnya sebuah organisasi yang memicu bergerak dan bekerjanya organisasi tersebut sehingga berfungsi. Organisasi akan bekerja dengan baik yang ditunjukkan melalui aktivitas kerja dalam paruh waktu tertentu sesuai dengan garis yang telah dicanangkan organisasi dapat dinilai sebagai organisasi yang baik. Organisasi yang baik akan selalu digerakkan oleh kader-kader yang baik dan handal. Jika kader dalam suatu kepemimpinan lemah, maka seluruh kekuatan kepemimpinan juga akan lemah. Kader berarti pula pasukan inti. Daya juang pasukan inti ini sangat tergantung dari nilai kadernya yang berkualitas, berwawasan, militan, dan penuh semangat..<sup>17</sup>

Pernyataan itu jelas bahwa kader mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap maju mundurnya sebuah organisasi. Organisasi akan kuat dapat dilihat dari kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat akan digerakkan oleh kader yang kuat juga. Begitu pula sebaliknya, kepemimpinan yang lemah karena digerakkan oleh kader yang lemah pula. Akibatnya organisasinya menjadi lemah juga. Sehingga kader harus mempunyai jiwa seorang pejuang, berwawasan, berkualitas, militan yang sangat

---

<sup>16</sup> Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2018

<sup>17</sup> Majelis Pendidikan Kader, Ibid, h.

diperlukan dalam kepemimpinan sebuah organisasi, termasuk Muhammadiyah.<sup>18</sup>

Kader Muhammadiyah sebagai hasil dari proses perkaderan adalah anggota inti yang diorganisir secara permanen dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta misi di lingkungan persyarikatan, umat dan bangsa guna mencapai tujuan Muhammadiyah. Oleh karena itu, hakekat kader Muhammadiyah bersifat tunggal, dalam arti hanya ada satu profil kader Muhammadiyah. Sedangkan fungsi dan tugasnya bersifat majemuk dan berdimensi luas, baik ke dalam maupun ke luar, yakni sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.<sup>19</sup>

Fungsi dan posisi kader dalam sebuah organisasi termasuk di persyarikatan Muhammadiyah, dengan demikian menjadi sangat penting karena kader dapat dikatakan sebagai inti pergerakan organisasi. Di samping itu kader juga sebagai syarat penting bagi berlangsungnya regenerasi kepemimpinan<sup>20</sup>.

Bagi sebuah organisasi, regenerasi kepemimpinan yang sehat terjadi karena ditopang oleh keberadaan oleh kader-kader yang *qualified* sehingga selain akan menjadikan organisasi bergerak dinamis, juga formasi kepemimpinannya akan segar dan energik.<sup>21</sup>

Jika persyarikatan tidak merancang dan menyiapkan para kadernya secara sistemik dan organisatoris, maka dapat dipastikan bahwa Muhammadiyah akan lemah lunglai, stagnan, tidak berkembang, tidak ada aktivitas, dan tidak memiliki prospek masa depan. Karena itu setiap organisasi haruslah memiliki konsep yang jelas, terencana dan sistematis dalam menyiapkan dan mengembangkan suatu sistem yang menjamin keberlangsungan

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid.

transformasi dan diversifikasi kader serta regenerasi kepemimpinan yang sehat<sup>22</sup>.

Ada istilah yang menarik untuk diungkap dalam penulisan ini bahwa kader Muhammadiyah Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya sebagai kader yang “*muallaf*”. Istilah *muallaf* ini dalam terminologi kajian teologi Islam diartikan sebagai non muslim yang hatinya terpaut dengan Islam yang kemudian masuk Islam. Dalam konteks Muhammadiyah, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang tidak pernah menjadi kader Muhammadiyah, tiba-tiba masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah secara langsung menjadi kader penggerak Muhammadiyah. Yang cukup mengherankan bahwa *muallaf* Muhammadiyah bila ditanya dedikasinya kepada organisasi Muhammadiyah dapat mengalahkan kader yang sejak awal menjadi kader di lembaga organisasi otonom Muhammadiyah.

Varian kader *muallaf* ini pertama kali dikenalkan oleh seorang tokoh intelektual muslim yang bernama Moeslem Abdurrahman (Almarhum). Ketika melontarkan istilah varian kader Muhammadiyah, beliau maksudkan adalah untuk menyebut dirinya yang terlibat kembali dengan Muhammadiyah, setelah lama berkelana di tempat lain. Kang Moeslem *-panggilan akrab almarhum-* tidak pernah menjadi kader organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah, tetapi pernah langsung menjadi Ketua Lembaga Tani, Buruh dan Nelayan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kini, ada banyak *muallaf* Muhammadiyah yang berkhidmat di Persyarikatan. Dedikasi para *muallaf* Muhammadiyah itu tidak

---

<sup>22</sup> Ibid.

kalah dengan kader yang sejak awal berkader di ortom Muhammadiyah.<sup>23</sup>

Muhammadiyah Kalimantan Tengah bisa dibilang mengalami problematika yang sangat serius terkait dengan apa yang disebut dengan istilah **krisis kader**. Secara empiric bisa dilihat dari rasio jumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang telah berdiri di Kalimantan Tengah pada umumnya dan kota Palangka Raya pada khususnya. Pertumbuhan dan perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tidak sebanding dengan kader Muhammadiyah yang ada saat ini. Padahal semestinya kader Muhammadiyah inilah yang sejatinya dapat diharapkan perannya dalam mengurus manajemen dan pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang telah tumbuh dan berkembang pesat saat ini.

Normuslim menyebut, “Kalau dipersen-persen yang betul-betul sebagai kader Muhammadiyah itu tidak kurang dari sepuluh persen....” yang terlibat langsung dalam perkara Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Bahkan dia nampak khawatir jika kondisi ini berlanjut terus, dengan mengatakan, “...ada kekhawatiran kalau mereka-mereka yang datang dari luar kemudian menjadi pejabat di Muhammadiyah (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya). Mereka tidak punya jiwa dan spirit keMuhammadiyah *-kan berbahaya-* sehingga ada pemikiran bagaimana memberikan pemahaman kepada dosen-dosen, pejabat-pejabat, dan karyawan-karyawan tentang perjuangan dan visi misi keMuhammadiyah.”<sup>24</sup>

Dari tahun ke tahun, sejak Majelis Pendidikan Kader Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah diketuai oleh Normuslim yang berakhir 2014 belum pernah lagi dilakukan

---

<sup>23</sup> Muallaf Muhammadiyah, Siapakah Mereka? Dalam <https://pwmu.co/41789/11/14/muallaf-Muhammadiyah-siapakah-mereka/> diunduh tanggal 3 Agustus 2018

<sup>24</sup> Wawancara tanggal 26 Agustus 2018

pendidikan kader Muhammadiyah. Meskipun demikian nampaknya pemaknaan perkaderan di kalangan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dipahami secara agak longgar. Kegiatan-kegiatan ke-Muhammadiyah yang mempunyai orientasi pembinaan, pengajian rutin, pelatihan-pelatihan dimaknai sebagai perkaderan. Mereka tidak terlalu memaknai perkaderan itu secara spesifik dengan pola perkaderan yang secara baku sebagaimana yang telah baku ditentukan dari pusat seperti pelatihan perkaderan Baitul Arqam, Perkaderan Darul Arqam yang berpola perkaderan utama. Ataupun perkaderan yang sifatnya fungsional seperti sekolah kader untuk mencetah ulama Tarjih Muhammadiyah.

Sebagaimana yang diungkap oleh informan Amir bahwa Kendala kaderisasi di Barito Timur ini adalah lembaga pendidikan belum ada. Sehingga kaderisasi yang sifatnya formal sulit dilakukan. Kaderisasi yang selama ini dilakukan adalah secara informal melalui kajian-kajian tafsir, kajian agama, pengajian dan lain-lain yang dilakukan di masjid<sup>25</sup>. Pemaknaan perkaderan “longgar” tersebut dapat megindikasikan betapa sulitnya melakukan perkaderan sesuai dengan pakem yang telah ditentukan sebagaimana yang terdapat dalam Buku *Panduan Sistem Perkaderan Muhammadiyah*.

Padahal Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah sudah sering menghimbau kepada pengurus-pengurus daerah Muhammadiyah untuk dapat melakukan perkaderan sesuai pakem perkaderan yang diatur dari pusat.

Normuslim mengatakan, “sewaktu saya menjadi ketua Majelis Perkaderan. Saya telah menghimbau kepada pengurus-pengurus daerah, lembaga-lembaga ortonom, dan amal usaha Muhammadiyah untuk bisa melakukan perkaderan. Kalian siapkan saja tempat, peserta, dan konsumsi, kami nanti datang turun ke

---

<sup>25</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2018

daerah-daerah sebagai fasilitator dalam perkaderan tersebut. Ternyata himbauan itu tidak jalan. SMP dan SMA Muhammadiyah saja yang ada di depan mata kita, juga tidak pernah mengadakan perkaderan dengan alasan kesibukan sehingga Baitul Arqam belum pernah dilakukan”<sup>26</sup>.

Nampaknya keinginan dari pengurus wilayah untuk bisa turun ke daerah sebagai fasilitator perkaderan kurang mendapatkan respon dengan baik sebagai akibat komunikasi yang kurang baik pula. Misalnya Pengurus Daerah Muhammadiyah Barito Timur merasa bahwa kader-kader dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah tidak pernah mau turun ke daerah. Sumantri mengatakan, “Jadi kalau Kader Muhammadiyah Palangka Raya (PW Muhammadiyah) itu tidak mau turun-turun *Pak, saya akan lebih keras terus pak* siapa yang datang akan saya sampaikan apa adanya”<sup>27</sup>.

Pernyataan dari Sumantri tersebut mengindikasikan bahwa hubungan komunikasi Pengurus Wilayah Muhammadiyah dengan daerah di Kalimantan tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif.

## **B. Pengertian Kepemimpinan Publik Muhammadiyah**

Dalam sebuah pencapaian tujuan organisasi, persoalan strategi menjadi sesuatu hal yang mendasar untuk diperbincangkan lebih jauh. Strategi yang mantap dan handal ikut mempermudah tercapainya apa yang menjadi tujuan organisasi. Sebelum mengkaji Strategi Kaderisasi Kepemimpinan Publik Muhammadiyah, terlebih dahulu untuk membahas istilah kepemimpinan publik.

Istilah *kepemimpinan* publik berasal dari dua kata yakni *pemimpin* dan *publik*. Pemimpin sering dikonotasikan sebagai orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat berdasarkan

---

<sup>26</sup> Weawancara, tanggal 26 Agustus 2018

<sup>27</sup> Wawancara, tanggal 13 Agustus 2018

sikap, perilaku, kepeloporan, dan kemampuan memengaruhi masyarakat (publik).<sup>28</sup> Dengan berdasarkan pada kepeloporannya tersebut sehingga seorang pemimpin dapat mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang benar. Pemimpin yang mempunyai kemampuan mendorong masyarakat untuk melakukan yang benar sejatinya pada diri seorang pemimpin terdapat kharisma dan suri teladan yang baik untuk ditaati tanpa harus diperintah untuk menaati. Pemimpin berbeda dengan manajer. Manajer dikonotasikan sebagai orang yang mampu membawa bawahannya mengerjakan sesuatu dengan benar. Sehingga dengan demikian kepemimpinan sejatinya harus mempunyai sifat dan sikap seorang pemimpin sekaligus manajerial.

Kepemimpinan publik Muhammadiyah yang dimaksudkan di sini memiliki 2 (dua) cakupan pemahaman. *Pertama* adalah kepemimpinan publik Muhammadiyah yang memiliki cakupan yang luas yakni kepemimpinan yang tidak membatasi kader Muhammadiyah mempunyai peran untuk berpartisipasi dalam kancah perpolitikan lokal maupun nasional misalnya partai politik, pemilihan kepala daerah (pilkada), juga mencakup kepemimpinan publik di bidang birokrasi, dan di intern Muhammadiyah seperti kepemimpinan yang sifatnya struktural organisasi serta kepemimpinan dalam Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

*Kedua*, kepemimpinan publik dalam pengertian cakupan yang sempit, yang terbatas pada domain politik praktis, yakni kepemimpinan untuk memperebutkan dalam konteks kontestasi perebutan kekuasaan baik dalam partai politik maupun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

---

<sup>28</sup> Bonosumz, Leadership (Kepemimpinan) dalam <https://www.wattpad.com/121687-leadership-kepemimpinan> diunduh Agustus 2018

### C. Pola Perkaderan Muhammadiyah

Pola perkaderan di organisasi Muhammadiyah diorientasikan ke dalam tiga hal, pertama diorientasikan sebagai kader persyarikatan, kedua diorientasikan sebagai kader umat, dan ketiga diorientasikan sebagai kader bangsa.

*Pertama*, sebagai kader persyarikatan dimaksudkan sebagai penggerak persyarikatan-persyarikatan yang ada dalam organisasi Muhammadiyah. Terdapat ribuan amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang harus dikelola dengan baik dan profesional, berupa amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan panti asuhan.

Dalam konteks pengelolaan amal Usaha Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, kebutuhan dan kesinambungan kader Muhammadiyah menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang telah penulis ungkap di atas bahwa Kalimantan Tengah sejatinya baru mengalami krisis kader. Oleh karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap majelis pendidikan kader yang ada di pengurus wilayah, daerah, cabang, maupun ranting, serta yang ada di organisasi otonom (ortonom) Muhammadiyah. Jika persyarikatan tidak merancang dan menyiapkan para kadernya secara sistematis dan organisatoris, maka dapat dipastikan bahwa Muhammadiyah sebagai suatu organisasi akan lemah lunglai, loyo tidak berkembang, tidak ada aktivitas dan tidak memiliki prospek masa depan. Karena itu setiap organisasi haruslah memiliki konsep yang jelas, terencana dan sistematis dalam menyiapkan dan mengembangkan suatu sistem yang menjamin keberlangsungan transformasi dan diversifikasi kader serta regenerasi kepemimpinan<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Amir Hady, Konsep Dasar Perkaderan Muhammadiyah dalam <http://kaltim.Muhammadiyah.or.id/artikel-konsep-dasar-perkaderan-Muhammadiyah--detail-153.html>, diunduh Agustus 2018

Jika tidak ada pembenahan dalam proses perkaderan, maka persyarikatan akan dikelola oleh orang-orang yang tidak sama visinya dengan organisasi Muhammadiyah.

*Kedua*, sebagai kader umat maksudkan sebagai kader penyampai dakwah Islamiyah. Di tengah-tengah *era post-truth* ini, peran dakwah sangat strategis dalam rangka untuk menangkal berita-berita kebohongan yang secara masif disebarakan melalui media-media sosial oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mendapat keuntungan sesaat. Di era *post-truth* ini kebenaran substantif terabaikan digantikan dengan kebenaran yang sifatnya kuantitas jumlah dukungan kepada sesuatu itu. Kebenaran akan menjadi kesalahan kalau diopinikan secara terus menerus sebagai sebuah kesalahan. Dan sebaliknya, kesalahan akan menjadi sebuah kebenaran kalau kesalahan diopinikan secara terus menerus pula sebagai kebenaran.

Sesuai dengan teori kuasa pengetahuan relasinya dengan kebenaran Michel Foucault bahwa kebenaran dapat diopinikan tergantung pada siapa yang berkuasa atas kebenarannya itu.<sup>30</sup>

*Ketiga*, kader bangsa, kader Muhammadiyah yang memang telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa yang tidak terbatas pada masa Islam, apalagi Muhammadiyah. Namun, skopnya seluruh elemen bangsa. Elemen bangsa Indonesia ini sangat plural. Indonesia dibangun atas dasar keragaman budaya, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Ketika kader Muhammadiyah, proyeksinya sebagai kader bangsa, harus mempunyai wawasan kebangsaan yang sifatnya multi dan kompleks. Karena ia harus dapat berdiri di antara keragaman yang ada, mempersatukan dari realitas perbedaan yang ada dan menjadi

---

<sup>30</sup> Alfarhri Adlin, Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia dalam <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/1694/1140> diunduh tanggal 18 Agustus 2018

pengayom bagi semua elemen dan unsur bangsa Indonesia. Ia akan dimiliki oleh segenap elemen bangsa ini.

Berbeda halnya dengan Buya Syafi'i Ma'arif bahwa orientasi kepemimpinan Muhammadiyah secara radikal dengan urutan logika yang terbalik, sebagai kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat, dan baru menjadi kader persyarikatan.<sup>31</sup> Buya Syafi'i membalik logika orientasi perkaderan kepemimpinan Muhammadiyah didasarkan pada asumsi bahwa tidak jarang organisasi Muhammadiyah hanya sebagai batu loncatan (*milestones*) untuk memperoleh jabatan tertentu baik di persyarikatan maupun kepemimpinan publik. Sehingga ia menambah orientasi perkaderan Muhammadiyah yang pertama harus mampu mencetak kader yang militan terhadap nasib kemanusiaan. Mereka kader Muhammadiyah harus mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bukankah K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah dibangun dari nilai filosofi surat *al-Maun* ayat 1-5. Ada sebuah kisah dari K.H. Ahmad Dahlan dengan santrinya yang dapat direfleksikan ke dalam kehidupan berorganisasi Muhammadiyah,

Kyai Ahmad Dahlan adalah sesosok ulama yang cerdas dan mendalam ilmunya. Suatu ketika Ahmad Dahlan memberikan pengajian tafsir al-Quran yang secara rutin dilaksanakannya di rumah beliau. Ketika sampai pembahasan tafsir al-Quran Surat al-Ma'un, beliau memberikannya berulang-ulang hingga berhari-hari kajiannya surat al-Ma'un terus. Ketika sudah kesekian kalinya ada seorang santri yang dengan hati-hati memberanikan diri bertanya dengan sedikit protes. "Kyai *-biasa dipanggil beliau-*, mengapa kajiannya al-Ma'un terus? Bukankah kami sudah hafal baik ayat

---

<sup>31</sup> Buya Syafi'i Ma'arif dalam Ahmad Sholikin, *Memutar Logika Filosofis Kader Muhammadiyah* dalam [http://www.academia.edu/15028123/Memutar\\_Logika\\_Filosofis\\_Kader\\_Muhammadiyah](http://www.academia.edu/15028123/Memutar_Logika_Filosofis_Kader_Muhammadiyah) diunduh Agustus 2018

maupun maknanya?” Tanya santri tersebut. “Benarkah Kalian sudah hafal ayat dan maknanya?” Kyai balik bertanya. “Sudah Kyai” Jawab santri-santrinya. “Apakah Kalian sudah mengamalkannya?” Tanya Kyai lebih lanjut. Sesaat para santrinya terkejut dan terdiam semua. Sambil tertunduk mereka menjawab, “Belum Kyai”. Seolah-oleh mereka mendengar sesuatu hal yang baru dalam *ngaji* al-Quran. Mereka selama ini mengaji al-Quran hanya sebatas membaca, menghafal, dan menerjemahkan saja. Selain itu tidak. Kyai mengajarkan hal yang baru, yaitu ajaran pengamalan al-Quran, bukan sekedar dibaca dan diterjemahkan saja apalagi hanya sekedar dilombakan. “Nah, kalau belum mari kita cari anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada di perempatan Malioboro kemudian ajak mereka ke sini.” Tutur Kyai. Kemudian para santri pun langsung melaksanakan apa yang diperintahkan Kyai. Setelah beberapa lama kemudian mereka kembali ke Kyai dengan membawa anak-anak gelandangan Malioboro. Oleh Kyai anak-anak tersebut disuruh mandi yang bersih dan diberi pakaian baru, mereka kemudian diberi makan. Sebelum mereka pulang mereka *disangoni* atau diberi uang. Keesokan harinya mereka diminta kembali lagi hingga beberapa kali. Setelah yang kesekian kalinya, baru kyai memberikan pelajaran agama kepada mereka. Itulah ajaran Pengamalan al-Quran surat al-Ma’un oleh K.H. Ahmad Dahlan kepada santrinya.<sup>32</sup>

Kisah tadi menginspirasi kepada kader bahwa betapa K.H. Ahmad Dahlan sangat *concern* terhadap penegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka yang secara ekonomi tidak diuntungkan, harus mendapat perhatian demi kelangsungan kehidupannya di masa mendatang. Surat Al-Ma’un tersebut mengilhami K.H. Ahmad Dahlan untuk berjibaku mendirikan organisasi Muhammadiyah

---

<sup>32</sup> Cahyono, dkk., *Pendidikan Muhammadiyah 5* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2011), h. 2-3

sebagai organisasi sosial keagamaan yang kemanfaatannya dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Jurdi mencatat bahwa setidaknya Surat al-Ma'un tersebut yang telah diajarkan oleh K.H. Ahmad Dahlan setidaknya mempunyai empat macam pesan-pesan sosial dan tauhid. Pertama, orang tidak memiliki naluri kemanusiaan dengan tidak memperhatikan anak yatim dan orang miskin termasuk dalam kategori orang yang mendustakan agama. Kedua, setiap ibadah mahdhoh, seperti sholat memiliki pesan sosial yang jelas. Dengan perkataan lain, sholat menjadi tidak berfaedah ketika mengabaikan dimensi sosial. Ketiga, dalam berbuat kebajikan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Dengan kata lain, setiap amal sholeh tidak boleh dibarengi dengan ria. Keempat, memberi pertolongan kepada orang lain merupakan anjuran agama yang perlu diperhatikan.<sup>33</sup>

Hampir senada dengan apa yang dikatakan oleh Jurdi, Zuli Qodir lebih melihatnya pada tataran implementasi. Menurutnya bahwa dengan mendasarkan pada spirit al-Ma'un, Muhammadiyah berada dalam lanskap organisasi yang bersifat sosial dan pelayan, seperti mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, dan panti-panti asuhan untuk mereka yang kurang mampu, yatim piatu, dan terpinggirkan. Di sini tentu saja bukan K. H. Ahmad Dahlan mempelajari tradisi ilmu-ilmu sosial kritis, mempelajari komunisme, Marxisme, akan tetapi mengamalkan semangat surat al-Ma'un yang menurutnya menjadi surat yang sangat penting dalam A-Quran yang ditunjukkan pada umat Islam agar tidak menjadi pendusta-pendusta agama di muka bumi dengan membiarkan kecongkakan dan kemungkar sosial bebas

---

<sup>33</sup> Syarifuddin Jurdi, *Eli Muhammadiyah dan Kekeasaan Politik: Studi Tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muihammadiyah Sesudah Orde baru*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h.55

berkembang biak di bawah ketiak kapitalisme dan borjuasi kelas menengah. K.H. Ahmad Dahlan dalam konteks ini menurut hemat saya telah berhasil mentransformasikan kajian-kajian kritis dari Marxisme dan Humanisme yang sering dikritik tidak Islami oleh sebagian umat Islam Indonesia dan umat Islam di negara-negara lain. K.H. Ahmad Dahlan sungguh telah mempraktikkan ajaran sosialisme religius yang sangat dalam dan fundamental tanpa mengatakan bahwa apa yang diajarkan adalah amalan-amalan sosialisme religius dan bahkan Marxisme religius.<sup>34</sup>

Ajaran Islam adalah ajaran yang *Rahmatan lil'alamiin.*, yang mana ajarannya harus dapat membumi dalam realitas kehidupan, bukan ajaran yang menggantung di langit di atas bayangan dan angan-angan semata. harus terbumisasikan jangan hanya menjadi ajaran yang menggelayut di langit saja. Semua itu dapat terbumisasikan dalam realitas kehidupan apabila kader-kader diletakkan dalam dirinya sebagai kader kemanusiaan bukan hanya sebagai kader golongan tertentu. Posisi sebagai kader kemanusiaan kita turunkan selangkah lagi menuju kader bangsa, karena sebagai kader Muhammadiyah yang hidup dan bernafas dalam lingkup teritori negara bangsa bernama Indonesia. Sebagai kader bangsa yang hidup dalam lingkup yang sangat pluralistik maka posisi keagamaan para pemeluknya akan merepresentasikan agama yang dianutnya. Sebagai kader bangsa inilah kader-kader Muhammadiyah dituntut untuk cerdas dalam melihat fenomena-fenomena kemasyarakatan yang ada. Misalnya dalam melihat fenomena kemiskinan, kader Muhammadiyah tidak bisa begitu saja dengan menganggap fenomena ini sebagai fenomena kemanusiaan belaka, tanpa melihat apa yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Jika kita gunakan kaca mata kebangsaan maka posisi kader Muhammadiyah dalam mengentaskan kemiskinan bisa melalui

---

<sup>34</sup> Zuly Qodir, .....h. 51

advokasi kebijakan-kebijakan pemerintah agar bisa pro kerakyatan. Mengingat posisi organisasi sosial keagamaan memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat lebih tinggi di Indonesia.

Dalam konteks Kalimantan Tengah, bahwa pemimpin publik yang mempunyai *background* kader Muhammadiyah jumlahnya, baik mereka yang berawal sebagai pengurus Muhammadiyah maupun hanya sebagai anggota ataupun sekedar simpatisan.

#### **D. Sistem Kaderisasi**

Ada dua kosakata yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu untuk bisa memahami sistem perkaderan Muhammadiyah (SPM), yaitu sistem dan perkaderan. Secara leksikal, sistem berarti seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan atau totalitas.

Terkait dengan perkaderan, pengucapan dan penulisannya sering tertukar dengan perkaderan atau pengaderan. Mengenai kosakata ini perlu diklarifikasi sebagai berikut. Pengaderan itu proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Dalam pengaderan ini, posisi kader atau peserta *training* menjadi obyek dan pasif sebagai orang yang dididik atau dibentuk menjadi kader. Adapaun perkaderan berasal dari kata dasar *kader* yang berarti yang berhubungan dengan, antara lain, kader. Dalam perkaderan posisi kader atau peserta *training* menjadi subyek dan aktif. Jadi istilah yang dipilih dan pas yang digunakan adalah dalam SPM adalah perkaderan.

Dengan demikian, pengertian sistem perkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah.

Sebagai sebuah sistem unsur-unsur yang terkandung dalam SPM ini adalah visi, misi dan tujuan perkaderan Muhammadiyah,

penitikberatan perkaderan, kurikulum perkaderan, profil dan kompetensi kader, pengembangan materi perkaderan, jenis dan bentuk perkaderan, struktur penjenjangan perkaderan dan perorganisasian perkaderan. Dalam hal ini, sistem perkaderan yang dimiliki oleh setiap organisasi otonom (ortonom) baik umum dan khusus juga merupakan bagian dari SPM.

Sistem perkaderan Muhammadiyah Kalimantan Tengah tetap mengikuti prosedur, buku petunjuk, dan pedoman perkaderan yang ditetapkan oleh Majelis Perkaderan Muhammadiyah pusat. Majelis Perkaderan Muhammadiyah yang ada di wilayah serta lembaga organisasi otonomnya hingga tingkat ranting hanya mengikuti prosedur dan petunjuk perkaderan pusat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perkaderan tersebut.

Penulis telah menemukan bahwa Muhammadiyah di Kalimantan Tengah sedang mengalami krisis kader. Perkaderan yang diatur secara normatif tidak dilakukan dengan baik pimpinan-pimpinan Muhammadiyah baik tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting. Pertumbuhan dan perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sangat banyak bila dibanding dengan jumlah kader Muhammadiyah yang saat ini ada. Kehadiran kader Muhammadiyah sangat diharapkan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi dalam rangka untuk mengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sudah ada, artinya jumlah kader yang saat ini ada tidak akan mampu mengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Sehingga kemudian yang terjadi adalah problem krisis kader melalui kaderisasi yang seharusnya dilakukan. Muhammadiyah Kalimantan Tengah terkendala dalam melakukan perkaderan dengan alasan kesibukan. Sehingga Majelis Pendidikan Kader bisa dikatakan mengalami stagnasi baik tingkat wilayah, daerah hingga ranting.

Kondisi ini dibenarkan oleh Normuslim, seorang informan yang kebetulan juga seorang pentolan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dengan mengatakan,

“Masalah Perkaderan, justru saya merasa bahwa pada saat kepengurusan saya menjadi ketua majelis kader yang pernah melaksanakan-perkaderan-dengan mengundang PDM-PDM seluruh Kalimantan Tengah, pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Setelah itu tidak ada lagi perkaderan yang dilakukan”.<sup>35</sup>

Pernyataan Pengurus Muhammadiyah tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa perkaderan di Kalimantan Tengah telah mengalami persoalan yang serius. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Amir, informan yang sekaligus aktivis Muhammadiyah di Kabupaten Barito Timur. Beliau mengatakan bahwa, “selama ini kami tidak pernah melakukan hajatan perkaderan di tingkat pengurus daerah Muhammadiyah Barito Timur ini. Bahkan kami juga merasa tidak pernah diundang oleh pengurus wilayah untuk kegiatan perkaderan.”

Secara pakem, Muhammadiyah mengenal perkaderan utama dan perkaderan fungsional dalam Sistem Perkaderan Muhammadiyah. Perkaderan utama dimaknai sebagai sebuah perkaderan yang sifatnya kaderisasi pokok. Bentuk kaderisasi pokok ini berupa kaderisasi melalui pendidikan dan pelatihan dalam memahami visi dan misi keMuhammadiyah dengan nilai ideologis Islam. Kaderisasi ini dilakukan oleh pimpinan persyarikatan atau MPK. Sistem perkaderan utama ini mempunyai sistem perkaderan yang baku dalam sebuah kurikulum yang telah ditentukan dan waktu pelaksanaan. Ada 2 macam sistem perkaderan utama ini, yakni Darul Arqam dan Baitul Arqam<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Wawancara tanggal 26 Agustus 2018

<sup>36</sup> Ibid,

Darul Arqam merupakan bentuk kegiatan kaderisasi yang utama dan khas dalam sistem perkaderan Muhammadiyah yang bertujuan untuk membentuk cara berpikir dan sikap kader dan pimpinan yang kritis, terbuka, dan penuh komitmen terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar*, dan *tajdid*.

Darul Arqam diselenggarakan di tingkat pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Perbedaan pada tingkatan tersebut adalah mengenai waktu, cakupan keluasan materi, segmentasi dan kualifikasi peserta. Darul Arqam tingkat pusat selama satu minggu, tingkat wilayah selama 5 hari. Peserta Darul Arqam diprioritaskan untuk pimpinan persyarikatan, unsur pembantu pimpinan, dan pimpinan tertentu (*top manager*) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)<sup>37</sup>.

Sedangkan Baitul Arqam merupakan modifikasi dan penyederhanaan dari Darul Arqam yang diselenggarakan untuk tingkat Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting, serta AUM. Sasarannya mulai simpatisan, anggota dan pimpinan Muhammadiyah, dan pimpinan (*middle manager* ke bawah) serta karyawan AUM. Modifikasi dan penyederhanaan ini dilakukan dari sisi waktu penyelenggaraan serta kurikulumnya. Baitul Arqam untuk tingkat daerah selama dua hari satu malam, tingkat cabang dan ranting selama dua hari satu malam, untuk pimpinan AUM (*middle manager*) selama dua hari satu malam dan karyawan dua hari satu malam. Penyederhanaan ini sengaja dirancang agar kegiatan kaderisasi dapat menjangkau peserta yang lebih luas terutama para anggota, simpatisan dan pimpinan yang tidak dapat mengikuti Darul Arqam dalam waktu yang relatif lama karena berbagai kendala.

---

<sup>37</sup> Ibid,

Perkaderan Fungsional, yaitu kegiatan kaderisasi yang dilakukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus dan kajian intensif yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk mencukupi kebutuhan dana fungsi tertentu dari majelis atau lembaga. Perkaderan fungsional dilaksanakan sebagai pendukung perkaderan utama dan guna pengembangan sumber daya kader. Kurikulumnya dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai jenis pelatihan serta kebutuhan dan kreativitas masing-masing penyelenggara. Bentuk kaderisasi yang masuk perkaderan fungsional di antaranya adalah:

Sekolah Kader, sekolah kader merupakan lembaga pendidikan formal di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan khusus serta diprogramkan secara resmi sebagai tempat pendidikan kader (pelajar dan mahasiswa), seperti kader uama tarjih. Lembaga pendidikan yang termasuk sekolah kader Muhammadiyah sekarang ini adalah *muallimin* Muhammadiyah Yogyakarta, Madrasah *Mu'allimat* Muhammadiyah Yogyakarta, pondok-pondok pesantren Muhammadiyah (Darul Arqam Garut Jawa Barat), Sipirok (Sumatera Utara), Gombara (Sulawesi Selatan) dan Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan (Jawa Timur). Untuk Tingkat menengah, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk tingkat Perguruan Tinggi adalah Pondok Hajjah Nuriyah Shabraan UM Surakarta dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, baik yang putra maupun yang putri, di Yogyakarta. Ketentuannya untuk penetapan dan pendirian Sekolah Kader hanya bisa dilakukan atas dasar rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pelatihan Instruktur. Pelatihan Instruktur merupakan salah satu bentuk kegiatan kaderisasi pendukung yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kader Muhammadiyah sebagai pelatih (instruktur) dalam mengelola dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan kaderisasi di lingkungan Prsyarikatan Muhammadiyah,

ortom, dan AUM. Pelatihan instruktur tingkat pusat selama lima hari, tingkat wilayah selama empat hari, tingkat daerah dan cabang selama 3 hari.

*Dialog Ideopolitor.* Ideopolitor (Ideologi, politik, dan organisasi) merupakan kaderisasi bagi pimpinan persyarikatan dan AUM yang didesain dalam bentuk dialog dengan panelis dan diskusi dengan sesama peserta dalam bentuk dinamika kelompok untuk memberikan pemahaman bagi kader dan pimpinan organisasi Muhammadiyah tentang peta mutakhir ideopolitik---ekonomi dan gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia, baik dalam skala lokal maupun regional dan nasional. Di samping itu dialog ideopolitor juga untuk memperkuat basis ideologis bagi kader dan pimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik Indonesian kontemporer yang berimbas pada kehidupan di daerah. Memberikan pemahaman tentang peta politik nasional dan lokal serta pengaruhnya bagi warga Muhammadiyah di pelbagai tingkatan, dan mempertajam kemampuan kader dan pimpinan Muhammadiyah dalam merumuskan kebijakan organisasi yang implementatif.

Pengajian yang dilakukan oleh majelis dan lembaga pelatihan-pelatihan di lingkungan unsur pembantu Pimpinan Muhammadiyah di antaranya, pelatihan kader hisab dan falak (Majelis Tarjih dan Tajdid), Pelatihan kader *muballigh* (majelis Tabligh), pelatihan kewirausahaan (majelis Ekonomi dan kewirausahaan), pelatihan kader lingkungan (majelis lingkungan hidup), dan berbagai bentuk pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh majelis dan lembaga.

*Pengajian Pimpinan.* Pengajian pimpinan merupakan kegiatan terbatas bagi pengembangan wawasan dan pendalaman nilai-nilai ideologi gerakan Muhammadiyah yang diikuti oleh pimpinan persyarikatan, pimpinan ortom, dan pimpinan AUM. Serta ditambah kalangan tertentu yang dipandang perlu dari warga

atau tokoh Muhammadiyah. Salah satu bentuk pengajian pimpinan yang rutin adalah pengajian Ramadhan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah melalui majelis pendidikan kader yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun secara terstruktur dan berkesianmbungan.

*Pengajian Khusus.* Bentuk pengajian ini dirancang dan diselenggarakan secara khusus sebagai media internalisasi dan peneguhan paham agama dan ideologi gerakan Muhammadiyah bagi segenap warga persyarikatan di lingkungan masing-masing.

*Pelatihan Tata Kelola Organisasi.* Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kemampuan manajerial dan administratif bagi Pimpinan Persyarikatan serta Pengelola Amal Usaha Muhammadiyah agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dan pengelolaan secara profesional dan dinamis dengan tetap berpijak pada visi dan misi Muhammadiyah.

*Diklat Khusus.* Pendidikan dan pelatihan ini berorientasi pada pengembangan sumber daya kader dan pemekaran potensinya sehingga bisa mendukung peran kader di luar persyarikatan dan menjadi pintu masuk bagi simpatisan dan calon kader Muhammadiyah. Di antara calon diklat khusus ini adalah; diklat jurnalistik, pelatihan pengembangan kapasitas keerdasan emosional dan spiritual, Diklat Kepemimpinan, dan *out Bound Training*.

Termasuk dalam bentuk perkaderan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan pendekatan personal atau kelompok kecil berbasis komunitas tertentu, seperti: kaderisasi di lingkungan keluarga, pelibatan dalam kepanitiaan, kelompok profesi, transformasi dan diversifikasi kader serta asistensi dan pemagangan serta bentuk-bentuk kegiatan kaderisasi dan yang tidak terstruktur namun dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan internalisasi ideologi bagi kader dan calon kader Muhammadiyah.

Struktur Penjenjangan dalam praktik pelaksanaan perkaderan di persyarikatan Muhammadiyah memiliki perbedaan dengan

perkaderan yang dilaksanakan oleh ortom. Perbedaan ini misalnya terletak pada struktur penjenjangan yang tidak dibuat dalam jenis dan bentuk perkaderan seperti yang disusun dalam sistem perkaderan ortom.

Struktur penjenjaangan ini dalam sistem perkaderan Muhammadiyah ditentukan berdasarkan pada pimpinan di Tingkat apa yang menjadi penyelenggaranya, Sebagai contoh jika pimpinan pusat atau majelis pendidikan kader PP Muhammadiyah yang menyelenggarakan Darul Arqam, atau jenis dan bentuk perkaderan lainnya, maka perkaderan tersebut berada di jenjang nasional atau tingkat pusat. Kalau penyelenggaranya PWM atau MPK di tingkat wilayah, maka perkaderan tersebut berjenjang provinsi atau regional. Begitu seterusnya sampai dengan tingkat cabang atau ranting.

Dalam hal penjenjangan ini pula, maka perkaderan fungsional yang dilaksanakan oleh unsur pembantu pimpinan yang lain diserahkan kepada kebijakan dan kebutuhan masing-masing majelis atau lembaga penyelenggaranya. Begitu pula dengan perkaderan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bisa menyesuaikan tingkatan dan penjenjangannya dengan melakukan koordinasi bersama MPK PP Muhammadiyah. Dalam hal ini sinkronisasi dalam kesatuan sistem perlu dijaga bersama, guna keberlangsungan pelaksanaan kaderisasi yang sejalan dengan sistem perkaderan Muhammadiyah.

Sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka SPM berlaku menyeluruh bagi semua jajaran dan komponen persyarikatan. Konsekuensinya SPM juga memuat atau mencakup seluruh bentuk dan jenis kaderisasi dan pelatihan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal.

Yang dimaksud dengan vertikal adalah SPM berlaku bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pusat hingga ke ranting, sebagai acuan dan pola dalam pelaksanaan kaderisasi

secara optimal sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan horizontal adalah SPM dan berlaku dan mengikat seluruh unsur pembantu pimpinan (majelis dan lembaga) organisasi otonom (umum dan khusus) dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di seluruh jenjang kepemimpinan Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagai acuan dan pola kaderisasi.

Karena bersifat mengikat dan menyeluruh seperti itu, maka sistem perkaderan yang dimiliki masing-masing ortom (Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muihammadiyah, IPM, IMM, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) menjadi bagian dari SPM. Masing-masing ortom melakukan program dan kegiatan perkaderanya berdasarkan kekhsanya masing-masing, dengan tetap mengacu dan mengindahkan konsep dasar, prinsip dan kurikulum dalam SPM ini secara konsisten.

Pelatihan dan taraining yang ada dan dimiliki oleh mejelis atau lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan untuk mendukung fungsi masing-masing semuanya juga termasuk bagian SPM yang dikategorikan sebagai jenis perkadean fungsional. Karena termasuk bagian SPM, maka dalam perkaderan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh ortom dan majelis atau lembaga tersebut harus mengandung muatan materi pokok dari kurikulum SPM.

Kemudian, sebagai bagian dari SPM, maka untuk kegiatan pelatihan dalam program kegiatan yang diselenggarakan oleh unsur pembantu pimpinan, masing-masing cukup menyusun panduan pelatihan atau pedoman pelaksanaan saja. Jadi tidak perlu menyusun sistem perkaderanya sendiri, untuk menghindari kesalahpahaman ada lebih dari satu sistem perkaderan di Muhammadiyah.

Dalam kesatuan sistem, maka pelaksanaan perkaderan baik di lingkungan unsur pembantu pimpinan, ortom, maupun AUM harus

selalu dalam koordinasi dengan majelis pendidikan kader di masing-masing tingkatan pimpinan persyarikatan. Untuk efektivitas perencanaan dan perkaderan, pimpinan AUM Muhammadiyah bersama majelis yang membawahnya berkoordinasi langsung dengan majelis pendidikan kader. Sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada MPK, maka hal ini menjadi bagian dari fungsi dan tugas MPK dalam perkaderan, sebagaimana tertulis dalam Pedoman Majelis Pendidikan Kader Bab III, Pasal 3 dan 4.

Dalam Pedoman Majelis Pendidikan Kader pasal 3 disebutkan: Majelis berfungsi sebagai penyelenggara program dan kegiatan bidang pendidikan kader sesuai dengan kebijakan persyarikatan. Kemudian pasal 4 dinyatakan Majelis tingkat pusat sampai dengan cabang bertugas mneyelenggarakan program dan kegiatan bidang pendidikan kader, meliputi:

- a. pembinaan ideologi Muhammadiyah;
- b. pendidikan Kader oleh Majelis;
- c. pengkoordinasian pendidikan kader yang diselenggarakan oleh majelis lain, lembaga, organisasi otonom, dan amal usaha Muhammadiyah;
- d. perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengawasan program dan kegiatan.
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;
- f. pengembangan kualitas dan kuantitas program dan kegiatan;
- g. penulisan dan pengembangan dalam bidang pendidikan kader;
- h. penyampaian masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan kader.

Kemudian terkait dengan wewenang pasal 5 disebutkan; (1) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan kader di lingkungan persyarikatan sesuai dengan kebijakan pimpinan pusat. (2) majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang melaksanakan ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan kader.

Sebagai sebuah sistem, SPM bukanlah sekedar konsep dan gagasan saja, tetapi mengandung kerangka acuan dan arahan bagi pelaksanaan kaderisasi dan pelatihan di seluruh jajaran persyarikatan, ortom, dan AUM, secara sistemik dan terorganisir. Untuk kepentingan ini, maka koordinasi dan sinkronisasi dari segenap komponen persyarikatan sangat diperlukan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing secara konsisten.

Sebagai sistem, tujuan perkaderan Muhammadiyah berarah pada visi di depan dan berpijak pada misi yang diemban dalam proses dinamis pelaksanaan perkaderan yang sistemik, koordinatif dan berkesinambungan. Dengan alur pertimbangan seperti itu maka rumusan visidan misi perkaderan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Visi: kader Muhammadiyah paripurna untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Misi:

1. Mengintensifkan peneguhan ideologi Muhammadiyah di seluruh lini persyarikatan, ortom, dan AUM;
2. Menyambungkan Pewarisan nilai-nilai ber-Muhammadiyah;
3. Mengoptimalkan revitalisasi kader.

Tujuan: terbentuknya kader Muhammadiyah yang berjiwa Islam berkemajuan serta mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan dalam persyarikatan, kehidupan umat, dinamika bangsa, dan konteks global.

## STRATEGI KADERISASI KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH

Setidaknya ada tiga strategi pendekatan dalam mewujudkan Kepemimpinan Publik Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, yaitu pendekatan Birokratis, pendekatan Amal Usaha Muhammadiyah, dan Pendekatan Politis.

### A. Pendekatan Birokratis

Pendekatan birokrasi dimaknai sebagai sebuah pendekatan melalui jalur birokrasi pemerintahan. Kader Muhammadiyah berupaya untuk menduduki posisi-posisi jabatan yang ada dalam birokrasi pemerintahan. Hal itu merupakan bentuk pengabdian diri terhadap bangsa.

Kader Muhammadiyah adalah kader yang militan. Mereka dapat memberikan warna dalam birokrasi pemerintahan. Era reformasi adalah era yang menuntut kepengurusan dan pengelolaan birokrasi dengan semangat transparansi. Pemerintahan yang baik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah pemerintahan yang cara pengelolaan didasarkan pada 9 aspek fundamental yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta bervisi strategis.<sup>38</sup>

Pemerintahan yang bersih memerlukan partisipasi masyarakat dalam penentuan dan pengambilan keputusan, melalui representasi wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>38</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, ..... h. 182

(DPRD) secara tidak langsung maupun secara langsung disampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari fungsi *check and balances*.

Pemerintahan yang baik mempunyai paradigma *centre for publik* yakni orientasi pengelolaan dan pengurusan pemerintahanya berpusat pada kepentingan masyarakat. Aturan-aturan kebijakan yang dibuat merupakan pengejawantahan (*break down*) yang menyokong terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga jalur birokrasi yang teramat panjang, apalagi potensial terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai sudah tidak lagi nampak dalam pelayanan birokrasi kita. Pegawai yang bermental *bossy* yang selalu minta dilayani dan dihormati harus segera berganti menjadi mental *publik server* yakni melayani dengan sepenuh hati, ramah tamah, humanis, memberikan pelayanan yang efisien dan tepat waktu serta dengan biaya murah. Pelayanan semacam itu selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat dengan memberikan legitimasi yang kuat terhadap pemerintah yang berkuasa jika dilihat dari perspektif yang makro.

Di tengah-tengah masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi akan mengubah cara pandanganya terhadap negara dan pemerintahan. Mereka tergolong masyarakat yang terpelajar dengan sendirinya mempunyai kemampuan untuk memberikan respon dan penilaian terhadap kinerja pemerintah, terutama terkait dengan hak dan kewajibanya sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang pada saat yang sama sebagai wajib pajak misalnya dengan patuh dan kesadaran diri untuk membayar pajak kepada negara. Mereka tentu tidak akan memberikan cek kosong (bayar pajak) begitu saja tanpa ada timbal balik yang diberikan oleh negara, misalnya mendapatkan pelayanan yang baik ketika berurusan dengan birokrasi pemerintahan.

Saat ini kader Muhammadiyah tersebar diberbagai instansi pemerintahan baik yang berprofesi sebagai pegawai fungsional umum maupun fungsional tertentu, serta yang mendapatkan

amanah untuk memimpin instansi pemerintahan dalam level tanggung jawab kecil maupun level yang mempunyai tanggung jawab yang besar mempunyai tanggung jawab sebagai kader untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai keMuhammadiyah yang sama yang tersimpul dalam jargon *amar ma'ruf nahi miungkar*.

Kader Muhammadiyah mampu berperan dalam transformasi nilai-nilai birokrasi, dari birokrasi yang minta dilayani menuju birokrasi yang melayani masyarakat. Kader Muhammadiyah dibentuk dan dikader untuk memiliki jiwa militansi yang kuat yang sangat dibutuhkan dalam proses transformasi budaya melayani kepada kepentingan masyarakat. Letak militansi mereka terlihat *kekeuh* dalam memegang prinsip yang benar.

Selanjutnya adalah penegakan hukum yang merupakan prinsip dasar yang dicanangkan dalam pemerintahan yang bersih. Penegakan hukum sebagai bentuk kelanjutan dari prinsip yang pertama yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum dan pengambilan kebijakan hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat, maka penegakan hukum harus menjadi agenda selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan hukum harus diimbangi ke dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang berorientasi pada masyarakat juga, karena hak-hak masyarakat mendapat pembelaan dari aparat penegak hukum. Hukum menjadi panglima di negeri ini, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum.

Adanya transparansi pengelolaan birokrasi pemerintah merupakan aspek fundamental dalam pembentukan pemerintahan yang baik selanjutnya. Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal rezim kekuasaannya. Korupsi sebagai tindakan, baik dilakukan individu maupun lembaga yang secara langsung merugikan negara, merupakan salah satu yang harus dihindari dalam upaya menuju

cita pemerintahan yang baik (*Good governance*), karena selain merugikan negara korupsi bisa menghambat efektifitas dan efisiensi proses birokrasi dan pembangunan sebagai ciri utama pemerintahan yang baik.<sup>39</sup>

Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberikan ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Oleh karena itu, Michael Camdessus (1997), dalam salah satu rekomendasinya pada PBB untuk membantu pemulihan (*recovery*) perekonomian Indonesia menyarankan perlunya tindakan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, khususnya transparansi dalam transaksi keuangan negara, pengelolaan keuangan negara di bank sentral (BI), serta transparansi sektor-sektor publik.<sup>40</sup>

Pihak IMF yang sangat serius dalam mempertahankan kebijakan pemberantasan korupsi untuk membantu proses *recovery* ekonomi, karena walaupun sudah menjadi fenomena universal, tapi di Indonesia, korupsi sudah menimbulkan efek metastarik, yakni penyebaran ke seluruh elemen birokrasi pemerintahan dari puncak pimpinan sampai pada pegawai yang paling rendah sekalipun.<sup>41</sup>

Gaffar<sup>42</sup> menyimpulkan setidaknya ada 8 aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu:

- a. penetapan posisi jabatan dan kedudukan;
- b. kekayaan pejabat publik;
- c. pemberian penghargaan;
- d. penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan;
- e. kesehatan;
- f. moralitas pejabat dan aparatur pelayanan publik;

---

<sup>39</sup> Ibid., h. 185

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid., h. 184-184

- g. keamanan dan ketertiban;
- h. kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, di masa reformasi yang telah bergulir ini, transparansi dalam sebuah pengelolaan pemerintahan menjadi suatu keharusan dan prasyarat untuk tidak membawa negara ini kepada kehancuran. Syafi'i Ma'arif menyebut, "janganlah berperilaku koruptif, bahwa bangsa ini sudah mau karam".

Aspek fundamental lain dalam pemerintahan bersih adalah responsif. Sikap responsif yang ditunjukkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melakukan pelayanan masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat adalah sikap yang amat ditunggu-tunggu masyarakat. Tidak perlu memberitahukan dan melaporkan kepada pemerintah tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat meskipun hal itu bisa saja dilakukan, akan tetapi yang diinginkan oleh masyarakat adalah sikap proaktif dari pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan masyarakat menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah yang dapat ditunjukkannya.

Sehingga dengan demikian sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki 2 etik, yakni etik individual dan etik sosial. Kualifikasi etik individual menuntut mereka agar memiliki kapabelitas dan loyalitas profesional. Sedangkan etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.<sup>43</sup>

Terkait dengan asas responsif ini, pemerintah harus terus merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial terhadap semua kelompok sosial dalam karakteristik kulturalnya. Dalam upaya mewujudkan asas responsif pemerintah harus melakukan

---

<sup>43</sup> Ibid.

upaya-upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok masyarakat tanpa pandang bulu.<sup>44</sup>

Selanjutnya adalah kesetaraan dan keadilan yang harus dihadirkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemahaman pemerintah terhadap kesetaraan dan keadilan ini harus berangkat dari kenyataan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang plural, majemuk, berbeda-beda suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Kenyataan ini mau tidak mau, suka dan tidak suka memaksa pemerintah untuk nerbuat adil dan setara terhadap kenyataan yang berbeda tersebut. Keragaman sejatinya akan membuat kelemahan dan perpecahan manakala tidak dikelola dengan baik. Yang mempunyai kewajiban mengelola adalah penyelenggara negara yakni pemerintah. Akan tetapi potensi keragaman akan menjadi sebuah kekuatan dan energi yang kuat manakala pemerintah mampu mengelolanya dengan baik, yakni perlakuan yang adil dan setara. Keragaman dapat melahirkan sifat dan sikap egoisme, individual, menang sendiri, mendzalimi yang lain yang pada gilirannya menimbulkan persoalan kebangsaan yang rumit, sulit untuk diselesaikan.

Sebagai sebuah bangsa yang beradab, dan terus menuju cita pemerintahan yang baik, proses pengelolaan pemerintahan itu harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada seseorang atau kelompok orang pun yang teraniaya dan memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pemerintahan yang seperti ini akan memperoleh legitimasi kuat dari rakyatnya dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.<sup>45</sup>

Persoalan selanjutnya adalah akuntabilitas publik penyelenggara negara, pemerintah masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggung-

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

jawaban pemerintah terhadap masyarakat terkait dengan sederet tanggung jawab yang telah diberikannya oleh negara. Semua bentuk kebijakan, perbuatan, moralitas, netralitas dan sikap para pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat.

Akuntabilitas publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pada hakekatnya adalah bentuk kesepadanan dari tanggung jawab masyarakat yang telah diberikan kepada mereka. Pemberian tanggung jawab untuk menyelenggarakan birokrasi yang baik oleh masyarakat harus dijawab berupa karya yang nyata dari pemerintah bahwa kinerjanya dapat terukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya Kinerja pemerintah harus dapat memberikan kepuasan kepada yang diperintah. Sehingga paradigma pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dipahami sebagai bentuk sikap yang menempatkan masyarakat sebagai obyek dari pensejahteraan oleh negara.

Secara teoritik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya. Rakyat melalui partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan institusi-institusi lainnya berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemegang kekuasaan negara. Pemegang kekuasaan atau jabatan publik dalam struktur kenegaraan harus menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang, dan telah dilakukannya di masa yang akan datang, sebagai wujud akuntabilitas manajerialnya kepada publik yang memberi kewenangan. Kemudian akuntabilitas vertikal juga bermakna bahwa setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya terhadap atasan yang lebih tinggi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid. h . 188

Sementara akuntabilitas *horisontal* adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara, seperti gubernur dan DPRD tingkat I, Bupati dengan DPRD Tingkat II, dan Presiden dengan DPR Pusat, yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para menteri sebagai pembantu presiden. Selain akuntabilitas profesional, para pejabat publik atau unsur-unsur pengelola urusan umum dan juga kenegaraan harus memiliki akuntabilitas personal, baik dalam aspek profesi dan kewenangan delegatifnya, maupun dalam aspek moralitasnya. Oleh sebab itu, setiap anggota DPR harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap konstituennya. Demikian pula dengan pejabat publik dalam struktur pemerintahan, harus mampu mempertanggungjawabkan kapabelitas dan loyalitas individualnya, baik dalam lingkungan profesi setaranya maupun terhadap atasannya. Jika mereka melakukan pelanggaran etika dan moralitas mereka harus dengan berani mempertanggungjawabkan pelanggaran itu.<sup>47</sup>

Itulah diantara penjelasan komponen mendasar indikasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kader Muhammadiyah mempunyai peran terhadap transformasi nilai-nilai ke-Muhammadiyah ke lingkungan Birokrasi. Prinsip-prinsip *good governance* ini sebetulnya akan memperoleh afirmasi (penguatan) dari nilai dan budaya organisasi yang dimiliki Muhammadiyah. Bahkan budaya organisasi dan modal sosial-spiritual di kalangan Muhammadiyah bukan tidak mungkin dapat menjadi nilai tambah dan penguat prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Dalam konteks ini Muhammadiyah merupakan salah satu pilar *good governance* dari unsur *civil society*.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., h. 189

<sup>48</sup> Asep Purnama Bahtiar, *Komitmen Muhammadiyah dalam Konteks Kebangsaan dan Good Governance*, Dalam Jurnal Tajdid, Vol. 15, No. 2

## B. Pendekatan Amal Usaha Muhammadiyah

Pada awal Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, keadaan masyarakat pada saat itu dalam keadaan memperhatikan dari berbagai aspek, di antaranya pada aspek keagamaan (Islam), aspek pendidikan, kemiskinan, dan keterbelakangan.<sup>49</sup>

Dari permasalahan di atas, KH. Ahmad Dahlan berinisiasi untuk melepaskan keterpurukan yang dialami oleh masyarakat pada saat itu, melalui jalan perenungan yang panjang yang pada akhirnya KH. Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan dakwah kepada umat Islam yang merupakan agama mayoritas, namun aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan suri teladan umat Islam Nabi Muhammad Saw, inilah yang sesungguhnya yang menjadi pemicu umat Islam hidup dalam kesusahan dalam berbagai aspek. Kemudian, untuk mewujudkan gerakannya, menyampaikan visi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* Muhammadiyah sangat berkeyakinan cara yang paling efektif adalah dengan mendirikan amal usaha dalam bidang pendidikan. Strategi inilah yang menjadikan Muhammadiyah fokus utama untuk menyebarkan dakwah kepada umat Islam.<sup>50</sup>

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) adalah istilah yang dipakai organisasi Muhammadiyah untuk menyebut suatu usaha dan dakwah persyarikatan. AUM ditempatkan sebagai kendaraan dan sarana untuk mencapai suatu tujuan persyarikatan yang telah ditentukan. Sehingga dengan kata lain bahwa AUM adalah usaha atau kegiatan yang dirintis dan dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuan

---

<sup>49</sup> Milana Abdillah Subarkah, Muhammadiyah dan Amal Usaha di Bidang Pendidikan dalam Jurnal Rausyan Fikr. Vol.13 No.2 September 2017 ISSN.1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187 diunduh Agustus 2018

<sup>50</sup> Ibid.

Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.<sup>51</sup>

AUM mempunyai peran dan fungsi dalam:

- a. penyebaran agama Islam, mendalami ajaran Islam;
- b. mendalami ajaran agama Islam;
- c. memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat berjihad dan mempertinggi akhlak;
- d. membimbing masyarakat dan menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf;
- e. memajukan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa;
- f. membangun dan memakmurkan tempat ibadah;
- g. membina generasi muda, dalam rangka mempersiapkan kader penerus;
- h. membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh;
- i. menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah<sup>52</sup>

AUM kemudian bentuknya diperjelas menjadi Amal Usaha di bidang Dakwah/Tabligh, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang olah raga dan kesenian.

Tabel 2  
Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)  
di Kalimantan Tengah

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah									
		TK/ PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	PT	RS/ Klinik	Panti asuhan	Masji	Lazis
1	Palangka Raya	1	1	2	3	1	1	1	1	2	1
2	Kotim	4	1	1	1	1	2	1		8	1
3	Kapuas	5	3	2	1	1	1	1	1	3	1

<sup>51</sup> Cahyono, dkk., Ibid. h 5

<sup>52</sup> Ibid., h.5-6

4	Pulang	3	-	-	1	-	1	-	-	2	-
5	Kobar	3	2	1	-	1	-	1	1	2	1
6	Barsel	1	1	1	1	-	-	1	-	3	
7	Bartim	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1
8	Barut	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1
9	Murung	6	-	1	2	-	-	-	2	1	-
10	Gunung	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Sukamara	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
13	Katingan	5	-	2	2	2	1				-
14	Seruyan	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Jumlah										

Sumber: PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tahun 2016

Tabel di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa hampir semua kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah ini sudah terdapat Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) itu artinya bahwa persebaran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang mempunyai visi dan misi sudah dapat berjalan dengan baik, terkecuali Gunung Mas, keberadaan Pengurus Daerah Muhammadiyah di Kabupaten ini belum terbentuk. Hal ini bisa dimaklumi bahwa Islam dilihat dari segi jumlahnya sangat sedikit. Meskipun demikian sudah ada upaya-upaya untuk membentuk kepengurusan Muhammadiyah di Kabupaten Gunung Mas.

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Bidang Dakwah yang menjadi *icon* perjuangannya adalah masjid, dapat dilihat dari segi jumlahnya. Jumlah masjid di Kalimantan Tengah cukup signifikan yakni berjumlah 27 buah masjid. Meskipun Masjid Muhammadiyah tercatat sebagai aset organisasi Muhammadiyah akan tetapi mempunyai fungsi dan kegunaan yang sifatnya terbuka. Maksudnya adalah bahwa jamaah masjid tersebut tidak hanya sebatas anggota Muhammadiyah saja akan tetapi siapapun dengan latar belakang organisasi sosial keagamaan yang berbeda dapat

melakukan peribadatan sholat 5 waktu misalnya. Masjid Muhammadiyah terbuka untuk umum dan menerima donasi yang sifatnya umum pula.

Masjid Muhammadiyah yang dibangun di Kalimantan Tengah ini dengan mengandalkan donasi sumbangan dari warga Muhammadiyah, simpatisan, dan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Sebagaimana yang diungkap oleh informan Mukhtar bahwa dana pembangunan Masjid Muhammadiyah tetap mengandalkan warga Muhammadiyah, simpatisan, kaum muslimin, dan bantuan pemerintah kota ataupun propinsi<sup>53</sup>.

Masjid Muhammadiyah dalam hal pengelolaannya dikelola oleh kader Muhammadiyah. Orang dengan latar belakang organisasi keagamaan selain Muhammadiyah tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus masjid, apalagi menguasai kegiatan masjid dalam hal peribadatan. Menurut Mukhtar juga, "...bahkan pernah Masjid al-Mujahidin yang terletak di Jalan Pilau Palangka Raya mau dikuasai oleh organisasi jamaah tertentu...dengan sigap kader Muhammadiyah melakukan penegasan dan pengambilalihan."<sup>54</sup>

Muhammadiyah mendirikan masjid sebagai sarana peribadatan, memakmurkan dengan kegiatan ibadah, pengajian, majelis ta'lim, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Masjid yang dibangun oleh Muhammadiyah diselenggarakan oleh majelis Wakaf dan dimakmurkan dan dikelola sebagai sarana dakwah oleh majelis Tabligh Muhammadiyah. Masjid yang dibangun oleh Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan, yaitu:

1. terawat, bersih dan terjaga kesuciannya;
2. makmur jama'ah dan kegiatannya;
3. memiliki perpustakaan masjid atau taman bacaan;

---

<sup>53</sup> Wawancara tanggal 31 Agustus 2018

<sup>54</sup> Wawancara tanggal 31 Agustus 2018

4. memiliki keta'miran atau pengurus masjid dari anggota atau pimpinan Muhammadiyah;
5. memiliki kegiatan Remaja Masjid sebagai bentuk kaderisasi;
6. memiliki Taman Pendidikan Al-Quran yang dikelola oleh Remaja Masjid.<sup>55</sup>

Persyaratan itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga, merawat, dan memakmurkan masjid sehingga memiliki daya fungsi yang besar yang diperuntukkan bagi warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Muslim pada umumnya. Sehingga Masjid sebagai sarana efektif untuk melakukan penggalangan, kaderisasi terhadap keberlangsungan visi dan misi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan.

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) selanjutnya adalah di Bidang Pendidikan. Bentuk amal Usaha di bidang pendidikan ini sesuai dengan tabel yang tersebut di atas, merupakan AUM yang memiliki jumlah yang besar mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi.

Secara organisatoris bahwa Lembaga Pendidikan Taman kanak-kanak Muhammadiyah didirikan dan dikelola oleh Pimpinan Aisyiah berjumlah 34 buah se-Kalimantan Tengah. Sedangkan Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikelola oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di pengurus Cabang Muhammadiyah, pengurus Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 10 buah, SMP/MTs berjumlah 11 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 5 buah, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 5 buah.

---

<sup>55</sup> Cahyono, dkk., Ibid. h. 7

Pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan yang dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah melalui PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai ideologi yang berbasis pada visi dan misi Muhammadiyah.

Pendidikan Muhammadiyah mempunyai multiperan. Bagi persyarikatan, pendidikan Muhammadiyah didesain dan dikelola sebagai pusat kaderisasi, penyiapan lulusan yang mampu menjadi kader pemimpin persyarikatan di masa depan. Bagi masyarakat, pendidikan Muhammadiyah merupakan taman ilmu yang lulusannya berkompeten menjadi pendidik, pemimpin dan penggerak umat menuju kesejahteraan dan kemajuannya. Bagi bangsa dan negara, pendidikan Muhammadiyah merupakan institusi nirlaba yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu pemerintah memberikan layanan pendidikan yang terbaik, dan sekaligus menyiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan siap mengabdikan untuk kepentingan umat dan bangsa. Sedangkan bagi Islam dan umatnya, pendidikan Muhammadiyah merupakan lahan subur untuk menanam dan mengembangkan peradaban Islam yang berkemajuan.<sup>56</sup>

Besarnya peran tersebut belum berbanding lurus dengan potret kaderisasi. Banyak angkatan muda yang kurang memiliki penguasaan dan pemahaman agama Islam yang mendalam. Fenomena ini terjadi di kalangan organisasi otonom seperti Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Nasyyatul Aisyiyah (NA), dan Pemuda Muhammadiyah. Kondisi ini dapat dibuktikan pada tingkat ranting, cabang, daerah, atau wilayah yang semakin kesulitan mencari kader

---

<sup>56</sup> Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta:MTT PP Muhammadiyah, 2017), h. 14

pimpinan persyarikatan yang ditokohkan sebagai pemimpin yang memiliki penguasaan dan pemahaman agama Islam yang mendalam.<sup>57</sup> Fenomena ini juga sedang dihadapi oleh Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Masalah yang mendasar adalah tidak jarang keluarga pengurus-pengurus Muhammadiyah sendiri, baik tingkat wilayah, daerah ataupun cabang yang enggan mengkader anggota keluarganya sendiri dengan pola perkaderan di Muhammadiyah. Hal inilah yang dikeluhkan oleh informan Normuslim yang mengatakan:

“... seperti keluarganya pengurus-pengurus Muhammadiyah sendiri itu tidak diikuti sebagai kader Muhammadiyah. Boro-boro ikut perkaderan, pergi bersama keluarga untuk sholat di Masjid Muhammadiyah saja tidak pernah. Saya, jika tidak ada tugas jadwal untuk ceramah terawih atau khotib di masjid lain....saya mengajak keluarga saya untuk sholat di Masjid Muhammadiyah. Itu menurut saya sebagai cara yang efektif melakukan perkaderan di kalangan keluarga sendiri. Coba lihat Bapak X, Bapak Y tidak pernah membawa keluarganya pergi ke Masjid Muhammadiyah. Apakah seperti itu yang disebut sebagai kader?”<sup>58</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa krisis kader mempunyai pengaruh yang hebat bagi kelanjutan sebuah organisasi. Menurut informan Mukhtar, “yang mengilhami berdirinya Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya adalah PKU Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang hilang itu.”<sup>59</sup> Kondisi seperti itu tidak perlu terjadi manakala kader Muhammadiyah yang berpendidikan di bidang kesehatan berusaha untuk menghidupkan rumah sakit demi keberlangsungannya sebagai sarana dakwah dalam bentuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Wawancara tanggal 26 Agustus 2018

<sup>59</sup> Wawancara tanggal 31 Agustus 2018

Pengalaman *historis* menunjukkan bahwa kegagalan regenerasi di bidang kepemimpinan pendidikan sering kali menjadi masalah yang serius bagi keberlanjutan lembaga pendidikan itu. Hal itu disebabkan karena lambatnya kaderisasi dan regenerasi yang solid, beberapa lembaga pendidikan yang tadinya besar dan berwibawa, kualitasnya semakin menurun dan bahkan mundur sama sekali. Oleh karena itu sistem kepemimpinan dan regenerasi di lingkungan pendidikan Muhammadiyah harus bersifat kolektif kolegial, tidak mengandalkan pada figur tertentu, melainkan menyinergikan aneka potensi kader untuk memimpin, mengabdikan, dan memajukan umat.<sup>60</sup>

Konsen Muhammadiyah Kalimantan Tengah dalam bidang dakwah *bi al-hal* yang diwujudkan dalam bentuk Amal usaha kesehatan tidak dapat diragukan kembali. Terbukti bahwa di beberapa Pengurus Muhammadiyah Kalimantan Tengah telah berdiri Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Palangka Raya, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Pangkalan Bun, Klinik Muhammadiyah di Sampit, Kapuas, dan Buntok.

Amal Usaha Muhammadiyah sebagaimana yang tersebut di atas telah berdiri dan sudah beroperasi. Sebelum Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya menjadi rumah sakit, statusnya masih Poliklinik PKU. Muncul pemikraan bahwa poliklinik PKU agar dinaikkan statusnya menjadi rumah sakit pada tahun 2000. Ide itu muncul sewaktu Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah diketuai oleh Drs. H. Saiful Fadlani dan Gubernur Kalimantan Tengah Drs. Asmawi Ghani. Sehingga tahun 2001 Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah berdiri secara bertahap. Dana pembangunan RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya diperoleh dari donasi yang tidak mengikat baik pemerintah maupun swasta. Masyarakat Kalimantan

---

<sup>60</sup> Divisi Kaderisasi..., Ibid., 15-16

Tengah pada umumnya dan masyarakat Palangka Raya khususnya sangat mengharapkan kehadiran RSI PKU Muhammadiyah ini. Sehingga pihak swasta yakni, H. Hadiyani berani dan bersedia menjaminkan diri untuk memperoleh pembiayaan uang dari perbankan di Kalimantan Tengah demi terwujudnya rumah sakit tersebut. Antusiasme masyarakat terbukti pada saat penyelesaian RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya, niat untuk dapat mendapat pelayanan kesehatan sudah mulai dilakukan. Pasien mulai berdatangan meskipun pembangunan RSI PKU Muhammadiyah belum dinyatakan selesai. Direktur Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah pertama adalah dr. Wildan, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah.<sup>61</sup> Sejak saat itulah Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya tidak pernah putus berusaha memberikan pelayanan yang terbaiknya kepada masyarakat Kalimantan Tengah hingga saat ini.

Spirit pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya tidak terlepas dari spirit K.H. Ahmad Dahlan, tokoh penggagas “hospital” pribumi pertama di Indonesia. K.H. Ahmad Dahlan selalu mendiskusikan tentang pelayanan kesehatan, hospital, dan Islam dengan H. Muhammad Syoeja’ yang sedang mengembangkan pemikiran tentang Rumah Sakit Islam. Melalui proses yang cukup monumental (kisah *Gegere Aro ‘aital*), mulai berdirilah Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) di Yogyakarta pada tahun 1923 Misi PKO pada waktu itu adalah merawat orang Islam yang sakit sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan *Al-Sunnah Nabiyullah*. PKO pada waktu itu menyalurkan jariah untuk menolong orang sakit dan H. Muhammad Syoeja’, menjadi ketua MPKO pertama. Rumah Sakit, dan Klinik yang ada diselenggarakan oleh pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Aisyiah dari berbagai tingkatan, dari

---

<sup>61</sup> Norssanie Darlan, dkk., *Sejarah Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: SDM Perkasa Palangka Raya, 2013), h. 18

pimpinan cabang hingga pimpinan pusat yang pada hakekatnya semua itu adalah amal usaha kesehatan yang *notabene* milik Persyarikatan Muhammadiyah

Meskipun demikian, ternyata berdirinya Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya menyisakan persoalan baru dalam hal pengelolaannya. Kader Muhammadiyah yang sejatinya dapat diharapkan melakukan pengelolaan Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah tersebut, terkendala dengan minimnya kader yang dapat diandalkan.

Menurut Informan Normuslim bahwa:

“Rumah sakit PKU ini ibaratnya lepas gitu *lho*. Anggota BPH (Badan Pelaksana Harian) saja untuk rumah sakit tidak punya kantor, malah kita mengadakan rapat di masjid, itu kan aneh. Ada semacam kekhawatiran terhadap pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan ini. Pasalnya pengelolaan, misalnya Rumah Sakit Muhammadiyah di Kota Palangka Raya dilakukan sebagian besar oleh bukan kader Muhammadiyah, bahkan direktur Rumah Sakitnya pun bukan orang Muhammadiyah”.<sup>62</sup>

Kekhawatiran itu beralasan, menurut hemat penulis bahwa ketika pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah berupa Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah dikelola oleh orang yang tidak mempunyai latar belakang keMuhammadiyah, tentu tidak akan mendukung apa yang menjadi visi dan misi serta tujuan didirikannya rumah sakit tersebut.

Sehingga yang perlu dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah adalah persoalan rekrutmen perkaderan Muhammadiyah dalam menjaga sustainabilitas pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah ke depan. Rekrutmen kader Muhammadiyah yang dimaksudkan adalah untuk regenerasi baik regenerasi kepemimpinan struktural organisasi

---

<sup>62</sup> Wawancara tanggal 26 Agustus 2018

Muhammadiyah maupun regenerasi Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang dakwah, kesehatan, pendidikan, sosial seperti panti asuhan, lembaga amil zakat Muhammadiyah (Lazismu). Mengingat persoalan kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah sedang mengalami krisis kader, maka pembenahan level organisasi perkaderan mutlak segera dilakukan.

Rekrutmen kepemimpinan dalam Muhammadiyah menggunakan mekanisme yang bervariasi. Selain lewat seleksi perkaderan formal dan non-formal, digunakan pula cara-cara lain seperti jaringan dan koneksi yang dimiliki oleh seorang pengurus dalam melengkapi kepengurusan organisasi sepanjang mekanismenya sesuai dengan semangat Muhammadiyah. Segala sesuatu dari figur yang direkrut menjadi pemimpin dipertimbangkan umpamanya pengaruh, dukungan, kapasitas moral, intelektual, wawasan keagamaan, komitmen pada perjuangan dakwah Islam dan pertimbangan lain yang dapat mendukung kerja amal organisasi. Dengan pertimbangan tersebut, akan muncul barisan yang tangguh. Kehadiran mereka pada prinsipnya tidak bertentangan dengan semangat ijtihad Muhammadiyah meskipun kehadirannya atas dasar ikatan emosional, kekerabatan, dan ikatan-ikatan lainnya.<sup>63</sup>

Muhammadiyah Kalimantan Tengah dalam merekrut person yang akan dijadikan pengurus dan pimpinan di lingkungan struktural dan amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mensyaratkan secara formal harus sudah mengikuti perkaderan yang ada di lingkungan Muhammadiyah dan organisasi otonomnya dengan bukti menunjukkan sertifikat perkaderan dan kartu anggota Muhammadiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan Syairi mengatakan, “Setiap kegiatan Baitul Arqam dikeluarkan

---

<sup>63</sup> Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta:MTT PP Muhammadiyah, 2017), h. 170

sertifikat sebagai syarat untuk menduduki jabatan pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan pimpinan dan pengurus-pengurus organisasi<sup>64</sup> Persyaratan itu barangkali masuk kategori yang ideal, jika dilihat dari kenyataan bahwa organisasi Muhammadiyah Kalimantan Tengah terjadi krisis kader. Padahal kader Muhammadiyah sebagai kader inti yang menggerakkan organisasi dan mencurahkan waktunya untuk organisasi Muhammadiyah.

Melihat kenyataan tersebut, maka catatan penting yang diberikan oleh Pimpinan Muhammadiyah kepada mereka yang akan direkrut menjadi penerus kelangsungan organisasi adalah kepedulian sosial, komitmen pada pemberdayaan, kesungguhan untuk berbuat bagi umat dan bangsa dan kesediaan menyemarakkan syiar Islam. Pemimpin pada umumnya adalah orang-orang terpilih. Pilihan tersebut didasarkan kepada berbagai pertimbangan yang memungkinkan yang bersangkutan dapat menjadi pemimpin, yakni latar belakang organisasi, komitmen pada perjuangan Islam, istiqamah, jujur, ikhlas dan tawaduk. Di samping itu mereka bersedia merelakan waktunya untuk kepentingan dakwah Islam dan pengembangan organisasi.<sup>65</sup> Jadi pengangkatan kader yang akan dijadikan pimpinan dan pengurus baik Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan struktural organisasi bukan didasarkan pada formalitas semata dengan sertifikat perkaderan Baitul Arqam misalnya akan tetapi lebih kepada kualitas dan komitmen kepada ke-Muhammadiyah dan keislaman.

Penekanan pada nilai komitmen dan loyalitas yang dipersyaratkan kemudian kepada pimpinan dan pengurus baru menunjukkan ada ketegasan dalam menentukan sosok pemimpin. Mereka harus punya komitmen yang harus dapat membawa gerakan ini semakin berkembang. Masalah pembinaan dan

---

<sup>64</sup> Wawancara tanggal Agustus 2018

<sup>65</sup> Syarifuddin Jurdi, Ibid.h.170

perkaderan bukan persoalan yang temporal dan lokal Muhammadiyah, melainkan merupakan persoalan bersama Muhammadiyah pada level semua kepemimpinan. Dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian adalah pembinaan anggota dan masyarakat. A.R. Facrudidin mengingatkan kepada semua pemimpin Muhammadiyah yang baru di semua level kepemimpinan untuk mengaktifkan pengajian dan pembinaan anggota. Pertama, ranting, cabang, daerah Muhammadiyah harus memiliki pengajian anggota. Tanpa ada pengajian dan pembinaan anggota, semuanya seperti tiada atau mati. Kedua setiap anggota Muhammadiyah baik laki-laki maupun perempuan harus menjadi *muballigh/muballighat* dengan mengembangkan dan menyebarkan Muhammadiyah ke berbagai tempat, termasuk ke dalam daerah yang belum ada keMuhammadiyahannya. Selain itu dalam menunaikan shalat fardhu setiap warga Muhammadiyah hendaknya melakukannya di masjid atau berjamaah, baik di *mushalla* ataupun dengan keluarga di rumah. Ketiga, setiap anggota Muhammadiyah harus memiliki kesadaran untuk membantu kegiatan dakwah dengan caranya masing-masing.<sup>66</sup>

Pergantian kepemimpinan dan kepengurusan Muhammadiyah tingkat wilayah, sebenarnya mendapat kritikan dari sejumlah pengurus dan kader dari daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Sumantri pernah mengutarakan kritiknya kepada kepengurusan di wilayah terkait dengan regenerasi di tingkat wilayah telah macet. Beliau mengatakan:

“Sebenarnya kami di daerah menginginkan orang-orang yang masuk pada kepengurusan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah tidak hanya itu-itu terus. Perlu peremajaan dan penggantian yang muda-muda kayak

---

<sup>66</sup> Ibid. h 171

*sampeyan* ini yang masih energik, bukannya yang tua-tua terus hanya bergeser dan bertukar kedudukan.”<sup>67</sup>

Keluarnya pernyataan tersebut bisa dikatakan wajar karena selama ini mereka yang di daerah merasa kurang mendapatkan perhatian dari pengurus-pengurus wilayah. Mereka tak pernah melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Sehingga mereka mengharapkan kader-kader yang muda dan energik yang mampu melakukan kunjungan ke daerah-daerah seperti yang mereka harapkan. Keluhan yang sama juga diutarakan oleh kader dari Sampit. Ramadhansyah mengatakan, “kepengurusan Pengurus Wilayah Muhammadiyah saya kira bisa dilakukan penyegaran dengan tidak terlalu mengandalkan pada kaum yang tua saja. Apalagi selama ini orang yang duduk dijabatannya hanya tukar posisi...”<sup>68</sup>

Pergantian kepengurusan dalam sebuah organisasi adalah mutlak dilakukan, dalam rangka untuk memberi energi baru dalam regenerasi di tubuh organisasi tersebut. Di dalam organisasi Muhammadiyah terdapat mekanisme yang sudah baku untuk melakukan regenerasi melalui apa yang dinamakan musyawarah. Konsep musyawarah yang dipakai dalam Muhammadiyah adalah sebagai berikut: untuk pusat dipakai dengan istilah Muktamar, wilayah (provinsi) disebut Muswi (musyawarah Wilayah), daerah kabupaten atau kota disebut Musyawarah Daerah (Musda), Kecamatan disebut Musyawarah Cabang (Muscab), serta desa atau kelurahan disebut dengan Musyawarah Ranting (Musrat).<sup>69</sup>

Perputaran kekuasaan (sirkulasi kekuasaan) sejatinya merupakan kebutuhan dalam tubuh setiap organisasi. Individu-individu baru akan mengambil peran dalam proses kepemimpinan

---

<sup>67</sup> Wawancara tanggal 26 Agustus 2018

<sup>68</sup> Wawancara tanggal 19 Agustus 2018

<sup>69</sup> Syarifuddin Jurdi, *Ibid.*, h. 171

organisasi. Sirkulasi pengurus yang terjadi melalui mekanisme musyawarah itu tidak hanya merupakan perputaran di kalangan pengurus yang telah diketahui sebelumnya, tetapi memunculkan individu baru untuk kemudian menjadi pengurus.<sup>70</sup> Sehingga kritik formasi Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah layak untuk diakomodir. Apalagi selama ini orang-orang daerah bisa dikatakan tidak terlibat dalam kepengurusan.

### C. Pendekatan Politis

Strategi Kepemimpinan Publik selanjutnya adalah melalui pendekatan politis. Muhammadiyah bukanlah partai politik akan tetapi merupakan organisasi sosial keagamaan. Meskipun demikian kader Muhammadiyah didorong untuk menjadi *pioneer* dalam segala lini jenis kepemimpinan di negeri ini. Artinya organisasi Muhammadiyah sebagai lembaga yang tidak memposisikan terjun ke dunia politik praktis, akan tetapi memberikan ruang gerak kebebasan kepada kader Muhammadiyah untuk tampil dalam konfigurasi politik dalam kepemimpinan baik tingkat lokal, daerah dan nasional. Justru karena Muhammadiyah mengambil jarak dengan politik praktis dapat *survive* untuk menjalankan visi. Misi, dan tujuan dengan baik, bahkan berkembang dan menempatkan organisasinya yang mempunyai umat terbesar kedua setelah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Azyumardi Azra, cendekiawan muslim mengatakan:

“Peran Muhammadiyah dalam politik nasional juga sangat penting. Muhammadiyah memang bukan partai politik, tidak terlibat dalam *power politic* dan *day-to-day politics*. Muhammadiyah adalah organisasi *Islamic-based civil society* (mayarakat madani) dan sekaligus sebagai *interest group* (kelompok kepentingan). Dengan begitu Muhammadiyah memiliki posisi sangat penting dan strategis

---

<sup>70</sup> Ibid. h. 172

dalam dinamika politik nasional. Besarnya Muhammadiyah dalam berbagai segi dan juga dengan keluasan ruang geraknya membuat daya tekan politik (*political leverage*) persyarikatan ini dalam kancah politik nasional tidak bisa diabaikan, meski sekali lagi, ia bukanlah organisasi politik. Walau begitu Muhammadiyah seyogyanya tidak tampil “terlalu politis” dalam berbagai perkembangan dan dinamika politik nasional. Sebaliknya, Muhammadiyah mestinya senantiasa lebih menampilkan diri sebagai *civil society* dan *interest group*, yang sekaligus memainkan peran sebagai *pressure group* (kelompok penekan) dan *moral force* (kekuatan moral). Salah satu kebertahanan dan keberhasilan Muhammadiyah sepanjang sejarah dalam menjalankan misinya adalah kemampuan memelihara jarak (*disengagement*) dengan negara, kekuasaan (*power*) dan politik sehari-hari (*day-to-day politics*). Muhammadiyah dalam banyak sejarahnya cenderung melakukan *political disengagement*, menghindari diri dari keterlibatan langsung dalam politik, apakah politik negara (*state politics*) maupun politik kepartaian (*party politics*), atau politik kekuasaan (*power politics*). Dengan watak seperti ini Muhammadiyah dapat terhindar dari kooptasi negara atau lebih parah lagi, bahkan menjadi bagian dari negara itu sendiri. Dengan begitu pula mengambil jarak dengan parpol-parpol, sehingga tidak terjadi identifikasi Muhammadiyah dengan parpol tertentu. Hasilnya Muhammadiyah dapat memelihara karakter dan *muruh*nya sebagai organisasi *civil society*. Sebaliknya, dalam ekspresinya sebagai organisasi *civil society vis-a-vis* negara, Muhammadiyah tidak menjadikan dirinya sebagai alternatif bagi negara, berusaha menumbangkan kekuasaan negara untuk kemudian menjadi tulang punggung bagi negara itu sendiri. Sebaliknya Muhammadiyah lebih cenderung akomodatif terhadap negara, meski dalam kasus-kasus tertentu, Muhammadiyah melakukan resistensi sangat kuat terhadap negara, seperti dalam hal Asas Tunggal Pancasila pada paruh pertama dasawarsa 1980-an, dengan demikian ekspresi dan aktualisasi *civil society* Muhammadiyah berbeda dengan pemahaman klasik dan konvensional tentang *civil*

*society* yang dipandang sebagai gerakan dan kelompok oposisional yang bertujuan menumbangkan rezim yang tengah berkuasa.”<sup>71</sup>

Penilaian Azra tersebut bukanlah pujian yang berlebihan bagi keberadaan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam, memberikan penilaian yang obyektif tanpa prasangka sesuai dengan kenyataannya. Keputusan Muhammadiyah untuk tidak terlibat politik praktis secara langsung merupakan keputusan yang sudah final. Artinya Muhammadiyah sudah merasa bahwa mengambil jarak dengan kekuasaan adalah posisi yang aman. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua umumnya sendiri bahwa, “Pengurus Pusat Muhammadiyah menegaskan secara institusi tetap istiqamah tidak terlibat politik praktis. Kalau ada warga Muhammadiyah dan warga bangsa terlibat dalam parpol (partai politik), itu hak warganya,”<sup>72</sup> Muhammadiyah sebagai organisasi memberikan ruang gerak kebebasan kepada kadernya bergabung dengan kekuatan-kekuatan partai politik yang ada. Itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap rakyat Indonesia dalam hak politiknya, yakni hak untuk memilih dan dipilih.

Menurut Jurdi, untuk memperkuat basis gerakan sosial-kulturalnya, Muhammadiyah melalui Mukhtamar yang ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang (sekarang Makassar) telah memutuskan untuk tidak terlibat politik praktis, bersikap netral dan tidak mempunyai hubungan apaun dengan partai politik. Penegasan ini

---

<sup>71</sup> Azyumardi Azra: Muhammadiyah dan Politik, dalam *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*, (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government-Pustaka Pelajar, 2015), h. 29-31

<sup>72</sup> Haidar Nashir, *PP Muhammadiyah tak Larang Warganya Terlibat Politik Praktis* dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/23/pdvn17384-pp-Muhammadiyah-tak-larang-warganya-terlibat-politik-praktis> diunduh September 2018

merupakan titik balik bagi Muhammadiyah untuk kembali ke khittah awalnya sebagai gerakan sosial keagamaan yang berbasis pada strategi perjuangan kultural (penyadaran masyarakat). Keinginan gerakan ini untuk kembali kepada khittah merupakan langkah strategis bagi eksistensinya sebagai gerakan kultural, bukan sebagai gerakan politik. Hal ini didasarkan atas berbagai fenomena aktual yang mana para elit pemimpinya banyak terlibat dalam politik praktis di masa lalu.<sup>73</sup>

Selanjutnya dia juga mengatakan persentuhan Muhammadiyah dengan dunia politik praktis terutama pada masa demokrasi liberal dan parlementer adalah sesuatu yang sulit dihindari. Keterlibatan tersebut lebih disebabkan oleh situasi politik yang ada dan didukung pula oleh keadaan bangsa yang dilanda oleh berbagai persoalan bangsa, terutama di kalangan elit pemimpin bangsa, dan adanya upaya mencari format kehidupan kenegaraan yang tepat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Meskipun demikian, perhatian elit terhadap kerja-kerja yang berorientasi pada perjuangan dan pemberdayaan umat tetap terus dilakukan. Sepertinya orientasi struktural dan kultural berjalan seimbang tanpa mengabaikan salah satu di antaranya. Bagi pimpinan Muhammadiyah, keduanya harus dijalankan secara seimbang<sup>74</sup>

Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-43 pada tahun 1995 di Banda Aceh, menguatkan dan menegaskan kembali terhadap Keputusan Muktamar yang ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang (sekarang Makassar) untuk tidak berpolitik praktis. Muktamar yang ke-43 pada tahun 1995 juga memilih Amin Rais sebagai ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak berafiliasi pada kekuatan politik manapun serta tidak menjadi bagian dari kekuatan organisasi apapun. Benar-

---

<sup>73</sup> Suyarifuddin Jurdi, *Ibid.* h.57

<sup>74</sup> *Ibid.*

benar Muhammadiyah sebagai organisasi yang mandiri. Organisasi yang hanya bergerak pada ranah penguatan basis sosial- kultural.

Muhammadiyah pada awal berdirinya memikirkan dan mengembangkan kemandirian, bukan ketergantungan pihak lain, termasuk para pendonor asing, para *aghniya* yang kebingungan menyedekahkan materi pada masyarakat. Muhammadiyah dibangun dengan mengembangkan tradisi dan jiwa yang mandiri, sehingga tidak pernah mau didikte oleh kekuasaan politik dan kekuasaan modal (kapital). Hal ini yang membawa Muhammadiyah sampai sekarang ditempatkan sebagai organisasi sosial keagamaan yang menjadi kekuatan masyarakat sipil yang berkarakter mandiri, yang mampu mengontrol negara dan sekaligus menjadi mitra negara. Muhammadiyah tidak didirikan dalam rangka melawan kekuasaan negara, tetapi menjadi mitra negara agar negara tidak terjerumus pada kekacauan dan kedhaliman yang menyedekahkan dan menyengsarakan rakyat.<sup>75</sup>

Amin Rais membahasakan relasi Muhammadiyah dengan politik praktis dengan istilah *high politics*, (politik adi luhung/ politik yang tinggi). Menurut Amien Rais, sikap Muhammadiyah yang netral dari partai dan menjalankan visinya tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah memakai *high politics*. *High politics* bukan berarti memainkan politik tingkat tinggi, tetapi politik yang berdimensi moral-etis, serta mengutamakan kepentingan publik. Sedangkan *low politics* adalah praktik politik sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik atau dikenal dengan istilah politik praktis yang cenderung mengedepankan *vested interest*.<sup>76</sup>

Kendati bersikap netral terhadap partai, Muhammadiyah tetap memiliki perhatian pada proses politik seperti proses legislasi di

---

<sup>75</sup> Zuly Qadir, Muhammadiyah Studies:....., h.78

<sup>76</sup> Joko A Rizal, *Meninjau Peran Muhammadiyah Pasca Reformasi* dalam <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/529-meninjau-peran-muhammadiyah-pasca-reformasi> diunduh tanggal 3 Setember 2018

parlemen dan pengambilan kebijakan pemerintah. Prinsip netral itu juga bukan berarti Muhammadiyah mencegah dan melarang warga Muhammadiyah terlibat dalam partai politik. Memasuki partai politik adalah hak pribadi tapi tidak memiliki kaitan dengan organisasi. Maka kita tidak heran melihat warga Muhammadiyah yang terlibat dalam politik praktis tersebar di berbagai partai, baik partai berasaskan agama maupun nasionalisme.<sup>77</sup>

Salah satu contohnya adalah ijtihad politik Amien Rais untuk mendirikan partai politik. Saat itu, ia tengah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Maka dengan rela hati ia melepaskan jabatan tersebut. Kemudian, setelah mendapat restu melalui Tanwir Semarang, Amien mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) bukan atas nama Muhammadiyah, melainkan pribadi. Dalam rangka menegaskan ketidakterkaitan Muhammadiyah dengan PAN atau partai politik manapun, Amien memberikan prinsip-prinsip yang harus dipegang bagi warga Muhammadiyah berkeinginan terlibat dalam politik praktis dan mengingatkan bahwa Muhammadiyah tidak mendirikan partai politik.<sup>78</sup>

Pada kesempatan ini pula penulis akan menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengambil jalan aman untuk tidak terlibat politik praktis maupun menjadi partai politik pada tataran *historiknya*.

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah pernah melakukan gerakan politik sehingga melahirkan partai-partai politik. Partai-partai politik yang pernah dibidani oleh Muhammadiyah adalah PII, MIAI, Masyumi, PAN, Parmusi, PPP. Meskipun melakukan gerakan politik, akan tetapi Muhammadiyah masih sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial. Muhammadiyah melakukan gerakan

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid.

politik bukan berarti ia menjadi partai politik. Muhammadiyah pada waktu itu sifatnya hanya sebatas memfasilitasi terhadap berdirinya partai politik sebagaimana yang tersebut di atas.

Begitu juga “godaan” kepada Muhammadiyah untuk menjadi partai politik pernah terjadi, setidaknya dua kali Muhammadiyah pernah diminta untuk menjadi partai politik, yaitu ketika tahun 1927. Pada tahun tersebut K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah menolak dengan tegas ketika beliau diminta oleh K.H. Agus Salim agar Muhammadiyah dijadikan sebagai partai politik. Selain itu juga pada pemerintahan Soeharto, beliau meminta kepada K.H. Fachruddin AR menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik. Beliau dengan santun menjawab dengan sikap yang tegas bahwa Muhammadiyah tetap sebagai organisasi sosial kemasyarakatan.

Mereka kader, pengurus, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah jelas telah melakukan kalkulasi matematis di atas kertas tentang keuntungan dan kerugian ketika Muhammadiyah menjadi partai politik. Mereka telah melakukan kalkulasi dari berbagai segi dan posisi Muhammadiyah jika menjadi partai politik. Mereka berpendapat, jika Muhammadiyah menjadi partai politik maka banyak kemadharatan yang ditimbulkannya. Mereka mempunyai keyakinan yang penuh, jika berubah menjadi gerakan politik apalagi parpol maka akan lebih besar madharatnya daripada manfaatnya bagi Muhammadiyah. Sebab parpol jelas kental akan nuansa intrik dan konflik kepentingan, merugikan amal usaha, mempersempit lahan dakwah, menghilangkan ukhuwah Islamiyah dan hanya berorientasi pada kekuasaan. Selain itu jika sejak awalnya Muhammadiyah telah menjadi parpol, maka barangkali nasibnya akan sama dengan Masyumi atau Ikhwanul Muslimin di

Mesir yang dibubarkan rezim Sukarno dan rezim Abdul Fatah Sisi, sementara para pemimpinnya ditangkapi dan dipenjara.<sup>79</sup>

Itulah hasil kalkulasi seluruh komponen Muhammadiyah, sebagai jawaban dengan penuh keyakinan atas godaan nafsu syahwat politik kekuasaan yang ditawarkan berbagai pihak untuk melakukan perubahan haluan organisasi sosial keagamaan menjadi organisai politik.

Arahan dari pengurus pusat untuk tidak berpolitik praktis dengan menggunakan baju Muhammadiyah cenderung ditaati oleh kader-kader Muhammadiyah di tingkat wilayah, daerah dan cabang. Mereka satu komando dalam hal loyalitas mengamankan keputusan yang telah diambil oleh organisasi pusat sebagai sebuah kebijakan yang sifatnya nasional. Oleh karena itu, loyalitas kader Muhammadiyah sesungguhnya tidak dapat diragukan kembali.

Pengurus Wilayah Muhammadiyah di Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan keputusan Muktamar Muhammadiyah untuk tidak berpolitik praktis dengan megggunakan baju organisasi Muhammadiyah mempunyai sikap yang loyal. Mukhtar mengatakan, “Muhammadiyah sebagai organisasi tidak melakukan politik praktis. Artinya siapapun orang kader Muhammadiyah yang ingin maju dalam pilihan kepala daerah, pilihan bupati/walikota, serta ingin menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus melepaskan baju keMuhammadiyahannya.”<sup>80</sup> Sikap ini jelas dan tegas untuk mengambil jarak organisasi muhammadiyah dengan intrik-intrik politik sesaat yang hanya akan merugikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dalam jangka panjang.

---

<sup>79</sup>Noname, Muhammadiyah dan Politik Praktis dalam <http://gema.uhamka.ac.id/2016/08/13/Muhammadiyah-dan-politik-praktis/> diunduh September 2018

<sup>80</sup> Wawancara tangga 31 Agustus 2018

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sumantri terkait dengan implementasi warga Muhammadiyah untuk tidak melakukan politik praktis menggunakan baju Muhammadiyah. Sumantri bisa dikatakan sebagai orang yang menginisiasi lahirnya Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Barito Timur. Beliau mengatakan,

“.....Pak Anton sebagai kader Muhammadiyah, kita kader sebagai anggota DPRD Barito Timur. Kita dukung penuh. Pada saat pak Anton sebagai Anggota Dewan, saya sebagai Kabag Kesra, maka kader-kader Muhammadiyah yang belum ada jabatan maka kita inventarisir untuk menduduki jabatan tertentu”.<sup>81</sup>

Pernyataan itu memberikan pemahamann kepada kita bahwa sesepuh Muhammadiyah yang masuk sebagai Dewan Penasehat Pengurus Daerah Muhammadiyah Barito Timur, secara organisatoris memberikan dukungan penuh kepada kader Muhammadiyah untuk terjun ke politik praktis. Namun dukungan itu tidak secara serta merta membawa Muhammadiyah sebagai oragnisasi sosial keagamaan. Pemberian dukungan kepada kader Muhammadiyah yang ingin maju sebagai pemimpin publik berupa dukungan secara informal organisasi, dan yang paling penting memberikan dukungan moral yang sifatnya pribadi-pribadi pengurus Muhammadiyah. Dukungan pribadi-pribadi pengurus Muhammadiyah terhadap kader Muhammadiyah yang maju sebagai calon pemimpin publik bisa dikatakan dukungan dari “balik layar” organisasi Muhammadiyah. Dukungan pengurus Muhammadiyah itu pada tataran praksisnya memang sulit untuk dipisahkan antara mereka dikenal masyarakat sebagai pengurus Muhammadiyah atau dikenal masyarakat sebagai pendukung calon tertentu. Justru dengan mengeluarkan Muhammadiyah sebagai

---

<sup>81</sup> Wawancara tanggal 13 Agustus 2018

organisasi secara formal mendukung calon tertentu akan menguntungkan calon tersebut bahwa ia secara tidak langsung telah didukung oleh orang yang selama ini dikenal sebagai pengurus Muhammadiyah. Akan tetapi mereka mendukungnya tidak mengatasnamakan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan. Sehingga dengan demikian Organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan tidak dicampuri oleh urusan dukungan terhadap calon tertentu.

Dukungan seperti itu juga dilakukan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah kepada kadernya untuk kepemimpinan publik. Menurut Mukhtar yang juga sekaligus Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah mengatakan, “..kalau ada kader-kader kita yang ingin maju, kita dorong untuk menjadi calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalimantan Tengah seperti Pak Yamin Mukhtar. Kita dorong itu, kita nanti bantu melalui orang-orang PDM-PDM untuk ikut menjadi pengumpul KTP-KTP sebagai syarat secara formal dan tertulis untuk mendaftar sebagai calon Dewan Pimpinan Daerah di KPU.” Dukungan semacam itu efektif dilakukan untuk mengantarkan kader Muhammadiyah menjadi pemimpin publik di Kalimantan Tengah. Berikut akan ditampilkan kader-kader Muhammadiyah yang mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan dalam wilayah kepemimpinan publik.

Selain Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah memberikan dukungan penuh kepada kader untuk terjun ke politik praktis dalam perebutan kekuasaan, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh pengurus Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur. Adalah Ramadhansyah mengatakan,

“kami sebagai pengurus Daerah Muhammadiyah Kotim telah mendorong kepada siapapun kader yang mempunyai kemampuan untuk memasuki arena perebutan kekuasaan pada politik praktis agar bisa masuk ke dalam kepengurusan partai-partai politik yang ada. Silahkan kalian masuk ke

partai-partai yang berbeda, akan tetapi jangan membawa baju Muhammadiyah. Kalian secara moral membawa Muhammadiyah dan dipersatukan dengan nilai-nilai keMuhammadiyah.”

Menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah besar dalam melakukan aktivitas perpolitikannya dengan mengadopsi nilai keMuhammadiyah, diharapkan dapat memberikan warnanya ke dalam organisasi partai politiknya. Mereka membawa misi nilai-nilai Muhammadiyah. Masuk dunia politik bagian dari melakukan Amal Usaha Muhammadiyah dengan tidak membawa-bawa nama Muhammadiyah.

Tabel 3

Daftar Kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang Menjabat Kepemimpinan Publik Pasca Reformasi

No.	Nama	Jabatan	Wilayah	Keterangan
1	Drs. Taufik Mukri	Wakil Bupati Periode 2017-2022	Kotim	Status Ketua PDM Kotim
2	Drs. H.Zain Alkim	Bupati Periode 2003-2008 dan 2008-2013	Bartim	Kader Muhammadiyah
3	H.Suriyansyah	Wakil Bupati Periode 2013-2018	Bartim	Ketua PDM Bartim
4	Edi Raya	Bupati Periode 2017-2022	Barsel	Simpatisan Muhammadiyah
5	Dr.H.M Riban Si	Walikota Periode 2008-2013 dan 2013-2018	Palangka Raya	Kader Muhammadiyah
6	H.Maryono, S.HI	Wakil Walikota Periode 2008-2013	Palangka Raya	Kader Inti Muhammadiyah
7	Dr. Mofit Saptono Subagiyo, MP	Wakil Walikota Periode 2013-2018	Palangka Raya	Kader Inti
8	Ir. H. Muhajirin	Bupati Periode 2013-2018	Kapuas	Simpatisan Muhammadiyah
9	Ir. H. Achmad	Wagub 2005-2010 dan 2010-2015	Wagub Kalteng	Penasehat PWM
10	Anton	Anggota DPRD	Barito Timur	Kader Muhammadiyah
11	Ade Supriadi, S.P., MH	Anggota DPRD dari PAN 2009-2014 2014-2019	DPRD Propinsi Kalteng	Kader Muhammadiyah

12	Jum'atni	Anggota DPRD dari PAN Kota	DPRD Kota Palangka Raya	Kader Muhammadiyah
----	----------	----------------------------	-------------------------	--------------------

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber*

Daftar kader Muhammadiyah baik yang di wilayah maupun yang di daerah yang telah berhasil menduduki jabatan politik sebagai pimpinan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut menunjukkan keterlibatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan di Kalimantan Tengah mempunyai peran yang strategis dalam menyiapkan dan melakukan perkaderan, mengantar, mendorong dan memberikan dukungan penuh, meskipun bentuknya bukan dukungan secara formal. Akan tetapi dukungan yang sifatnya moral, pengaruh organisasi Muhammadiyah melauai pengurus-pengurusnya.

Meskipun mendapat dukungan penuh kepada kader-kader yang mengikuti kontestasi kepemimpinan Muhammadiyah, tidak jarang memberikan pertimbangan dan catatan kepada mereka yang berusaha maju sebagai pemimpin publik. Sebagaimana terjadi pada H. Zain Alkim Bupati Barito Timur periode 2008-2013 dan periode 2013-2018 ketika akan maju sebagai calon Bupati untuk periode ke-2. Menurut Amir, informan dan sekaligus Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Barito Timur mengatakan,

“...itu respon PDM (Pengurus Daerah Muhammadiyah) positif, mendukung beliau (H. Zain Alkim) dibantu secara *all out* Pilkada tahun 2013 itu bagai buah simalakama orang bilang kan kebetulan waktu itu saya itu satu-satunya yang melawan beliau, walaupun akhirnya mendukung juga karena sudah mempunyai hubungan emosional baik dengan beliau. Tapi tidak sukanya itu, dua kali salah beliau sebagai wakil calbupnya perempuan dan non muslim lagi. Saya juga diajak untuk mengumpulkan teman-teman, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian partai yang berbasis Islam seperti PAN.

Kebetulan saya ada di PAN telah menyarankan untuk tidak maju lagi sebagai calon bupati karena sudah dua kali menjadi bupati. Yang kedua calon wakil bupatinya perempuan dan non muslim lagi”

Sebagai Pengurus Daerah Muhammadiyah, ia mempunyai pertimbangan tersendiri kepada H. Zain Alkim<sup>82</sup> untuk tidak maju sebagai calon Bupati pada periode ketiganya. H. Zain Alkim berpasangan dengan Pancani Gandrung (non Muslim) pilkada periode 2013-2018. Menurut Amir bahwa ketika pak Zain mengikuti pilkada yang kedua kalinya sudah diperingatkan untuk berpasangan dengan yang muslim, tapi jawab beliau “untuk Bartim belum saatnya pasangan dalam pilkada Islam-Islam”.

Kebetulan waktu itu ada pasangan lain H. Suriansyah<sup>83</sup> sebagai calon wakil bupati maju berpasangan dengan Ampera A.Y. Mebas, S.E yang kebetulan non muslim. Ternyata betul kalkulasi politiknya bahwa H. Zain Alkim tidak terpilih untuk periode ketiganya itu. Justru yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Barito Timur adalah pasangan Ampera A.Y. Mebas, S.E dan H. Suriansyah.

Tidak terpilihnya H. Zain Alkim untuk masa pencalonan Pilkada periode 2013-2018 karena sudah dua kali beliau menjabat sebagai Bupati Barito Timur untuk periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. Di samping itu kompetitornya adalah H. Suriansyah, meskipun dia sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Ampera A.Y. Mebas, S.E yang non muslim, akan tetapi pada waktu itu dia sebagai ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Barito Timur.

---

<sup>82</sup> H. Zain Alkim adalah Bupati Barito Timur periode 2008-2013 dan periode 2013-2018 seorang kader Muhammadiyah dari Barito Utara. Kalimantan Tengah

<sup>83</sup> H. Suriansyah adalah Wakil Bupati yang berpasangan dengan Ampera A.Y. Mebas, S.E. periode 2013-2018. Beliau juga sebagai Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Barito Timur sewaktu mencalonkan diri sebagai wakil bupati.

Pada kontestasi pemilihan kepala daerah periode 2013-2018 sudah ada upaya dari Pengurus Daerah Muhammadiyah Barito Timur untuk mengonsolidasikan terkait ada dua kader Muhammadiyah untuk maju sebagai kontestan. Amir mengatakan,

“Kita *Alhamdulillah* setiap momen Pilkada. Kita Muhammadiyah ini..harus sudah mempunyai gagasan untuk menyatukan. Contohnya ...*anu* kita ini di kota harus berani II (Islam-Islam), tapi masing-masing mempunyai keegoan untuk maju sebagai calon peserta pilkada. Mereka saling ingin menjadi nomor satu tidak mau yang nomor dua. Masing-masing mempunyai ambisi berkuasa.”<sup>84</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas bahwa sudah ada upaya Pengurus Daerah Muhammadiyah untuk memberikan pertimbangan kepada mereka kader Muhammadiyah yang ingin maju sebagai kontestan Pilkada daerah, akan tetapi faktor “ego berkuasa” yang bersangkutan, yang memupuskan harapan untuk dipersatukan dalam satu suara. Artinya Pengurus Muhammadiyah hanya memberi pertimbangan saja tanpa mempunyai kekuatan untuk ditaati dalam hal urusan seperti ini. Apalagi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang secara formal menjaga jarak dengan gerakan politik maupun politik praktis.

---

<sup>84</sup> Wawancara tanggal 13 Agustus 2018

## PROBLEMATIKA MUHAMMADIYAH DI KALIMANTAN TENGAH

### A. Krisis Kader Muhammadiyah

**K**ader merupakan sosok pribadi yang sangat diharapkan kiprahnya oleh Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, yang akan membawa dan mengantarkan organisasi untuk lebih maju dan modern sesuai dengan cita-cita dan platformnya. Kader Muhammadiyah yang dapat berkiprah, berjuang, mau meluangkan waktunya untuk organisasi, baik tingkat wilayah maupun daerah bisa dibilang langka. Krisis kader menjadi persoalan yang sangat serius ketika dilihat dari perspektif estafet kepemimpinan Muhammadiyah yang berujung pada nasib organisasi ke depannya.

Penulisan ini juga berusaha untuk memetakan tipologi kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Menurut Normuslim kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah mempunyai setidaknya 4 (empat) tipe. *Pertama, kader inti*. Kader inti merupakan seseorang orang yang mempunyai aktivitas pikir dan kerjanya sebagian besar diperuntukkan bagi organisasi Muhammadiyah. Tipe orang ini menjadi inti penggerak, lokomotif sebuah organisasi. Hidup dan matinya organisasi bergantung pada peran dari kader-kader inti. Mereka akan merasa bisa meluangkan waktu untuk menjalankan, mengelola dan menggerakkan roda organisasi agar bisa fungsional. Kader inti ini jelas jumlahnya sedikit.

*Kedua, kader pengurus*. Kader pengurus ini sejatinya masuk kategori kader inti. Tapi yang membedakan adalah perhatian dan

karya nyata yang diperbuat oleh sang kader tersebut. Secara formal bahwa dia adalah kader yang diminta untuk dapat menggerakkan, mengelola, serta meluangkan waktu untuk kegiatan Muhammadiyah, akan tetapi yang terjadi adalah keikutsertaannya dalam kepengurusan hanya sebatas pasang nama saja.

***Ketiga, kader anggota.*** Kader anggota adalah kader yang tidak masuk sebagai penggerak organisasi sebagai kader inti dan juga tidak tercatat sebagai pengurus. Mereka juga bisa aktif dalam kegiatan pengajian yang diadakan oleh majelis dakwah, dan tercatat sebagai anggota Muhammadiyah yang dilihat dari kepemilikan kartu anggota Muhammadiyah. Karena dengan tipologi kader anggota merasa bahwa dirinya Muhammadiyah, mudah memberikan bantuan kepada Muhammadiyah secara materi maupun non materi. Kader Muhammadiyah, baik kader inti, kader pengurus, dan kader anggota, sejatinya disebut kader Muhammadiyah harus terpatri dalam dirinya spiritualitas dengan jiwa dan ruh ideologi Muhammadiyah. Apa yang terjadi di Kalimantan Tengah tidak demikian. Itulah uniknya kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Meminjam istilah yang pernah dipakai oleh Muslim Abdurrahman (alm) seorang cendekiawan muslim dengan istilah kader Muallaf. Istilah muallaf ini untuk menarasikan kader Muhammadiyah yang secara ideologi tidak memahami Muhammadiyah tapi berjuang dan berusaha menghidupkan Muhammadiyah. Sementara dalam bahasanya Munir Mulkan kader Muhammadiyah semacam itu masuk kategori varian kader MUNU (Muhammadiyah Nahdlatul Ulama). Artinya orang dengan aktivitas keorganisasiannya di Muhammadiyah akan tetapi pemahaman ideologinya tetap memakai paham Nahdlatul Ulama.

Kader Muhammadiyah yang mempunyai tipologi/varian seperti ini jelas mempunyai nalar logika yang membenarkan pilihannya tetap di organisasi Muhammadiyah. Mereka mempunyai

alasan tersendiri bergabung dengan Muhammadiyah sebagai organisasi yang sifatnya pragmatis. Mereka secara sadar membedakan Muhammadiyah sebagai organisasi dan Muhammadiyah sebagai ideologi. Mereka tidak mengambil kedua-duanya. Mereka hanya pilih Muhammadiyah sebagai organisasi dengan meninggalkan praktik-praktik ibadah yang senafas dengan ideologi Muhammadiyah.

Sehingga lebih jauh lagi Normuslim mengatakan,

“orang yang bergabung di organisasi Muhammadiyah adakalanya orang yang paham dan ideologinya Muhammadiyah saja tapi tidak ikut aktif menggerakkan organisasi (tidak ikut di organisasi). Tapi adakalanya juga orang hanya ikut di organisasi Muhammadiyah saja tapi ideologinya tidak ikut Muhammadiyah. Dan yang terakhir adakalanya orang yang ikut aktif (menggerakkan organisasi Muhammadiyah) dan juga ikut paham/ideologi Muhammadiyah.”<sup>85</sup>

***Keempat, kader simpatisan.*** Kader simpatisan berada pada lapisan yang paling luar dari organisasi Muhammadiyah. Mereka pada dasarnya orang yang secara organisatoris berada di luar. Mereka tidak berstatus sebagai anggota, juga tidak sebagai pengurus, apalagi sebagai kader inti dan penggerak organisasi. Mereka hanya simpatik pada organisasi Muhammadiyah yang dilakukan dengan cara terkadang memberi bantuan dana atau bantuan lain seperti tenaga atau pikiran kepada Muhammadiyah. Keterkaitan dengan Muhammadiyah sebagai organisasi adalah sebagai anggota komite sekolah yang kebetulan menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah.

---

<sup>85</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2018

Agus Sukoco<sup>86</sup> membagi kader simpatisan ini ke dalam beberapa istilah. *simpatisan aktif*, yakni simpatisan Muhammadiyah yang sudah aktif mengikuti pengajian-pengajian atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Ada juga *simpatisan yang ada dalam pembinaan Muhammadiyah*, yakni simpatisan Muhammadiyah yang sedang mengikuti pendidikan formal Muhammadiyah. Mereka ini antara lain siswa/mahasiswa perguruan Muhammadiyah, pegawai Amal Usaha Muhammadiyah yang belum menjadi anggota Muhammadiyah. Ada juga *simpatisan keluarga aktivis Muhammadiyah*. Simpatisan aktivis keluarga Muhammadiyah ini berada di dekat dan berasal dari hubungan keluarga pemimpin Muhammadiyah, keluarga kader dan muballig Muhammadiyah, keluarga anggota Muhammadiyah.

Sukoco juga menyebut *simpatisan akibat jasa Amal Usaha Muhammadiyah*. Mereka adalah orang yang bersimpati kepada Muhammadiyah karena jasa Muhammadiyah melalui amal usaha yang mereka rasakan, seperti orang tua murid/mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah, pasien rumah sakit, keluarga pasien, yang anggota keluarganya diasuh di Panti Asuhan Muhammadiyah. Dan yang terakhir ada istilah simpatisan relasi anggota Muhammadiyah adalah orang-orang yang bersimpati kepada Muhammadiyah karena berhubungan baik dengan anggota Muhammadiyah, seperti teman sekerja, tetangga, teman kegiatan olahraga, dan lain-lain.

Krisis kader ini akan mempunyai efek yang hebat dalam memegang tongkat estafet kepemimpinan struktural organisasi Muhammadiyah dan kepemimpinan dalam pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah. Sehingga yang harus dilakukan adalah

---

<sup>86</sup> Agus Sukaca, *Mengemban Misi Muhammadiyah: Mwujudkan Masyarakat yang sebenar-benarnya*, (Yogyakarta,:Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009), h.27-28

perbaikan pola-pola rekrutmen kader Muhammadiyah dengan mengikuti standar baku dalam sistem perkaderan Muhammadiyah yang telah ditentukan. Selain dari itu pola-pola pembinaan kader-kader Muhammadiyah dilakukan secara intensif seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah berupa pengajian-pengajian yang secara rutin dilakukan oleh Muhammadiyah.

## **B. Krisis Kader Ideologi**

Krisis ini pula berpusat pada keberadaan kader Muhammadiyah yang tidak memahami ideologi Muhammadiyah baik dari segi cara pemahaman keagamaan paham Muhammadiyah yang melahirkan amalan keagamaan yang tidak sama dengan Muhammadiyah, maupun dari segi tujuan dan cita-cita secara organisatoris. Kader merupakan aset dalam sebuah organisasi. Kader Muhammadiyah juga merupakan aset yang sangat besar dalam sebuah organisasi Muhammadiyah. Orang yang bergabung dalam sebuah organisasi Muhammadiyah mempunyai kecenderungan kesamaan motivasi, misi dan tujuan yang sama dengan organisasi Muhammadiyah, sehingga ia bergabung. Ada juga orang yang bergabung dengan Muhammadiyah karena mempunyai motivasi yang sifatnya pragmatis. Saat ini Fenomena bergabungnya orang-orang dengan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah dengan motivasi yang sifatnya pragmatis tidak dapat dihindari. Mereka bergabung dengan Muhammadiyah karena secara langsung mendapatkan manfaat secara pribadi dari keberadaan Muhammadiyah.

Perkembangan Muhammadiyah dewasa ini di tengah pemekaran yang cemerlang itu tumbuh kecenderungan adanya pelanggaran nilai-nilai serta menipisnya semangat dan keterkaitan ruhaniah tersebut di sebagian lingkungan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan unit. Bahkan sinyalemen menunjukkan adanya kesenjangan antara pemudaran antara nilai-nilai ruh Islam

dalam kesatuan lisan dan perbuatan, dalam gerak kepemimpinan, dan pengelolaan persyarikatan dan amal usahanya.

Demikian pula dengan meluasnya gejala konflik status yang bermuara pada konflik nilai dan tercermin dalam konflik kedudukan serta konflik kepentingan. Sinyalemen tersebut mengisyaratkan dan sekaligus mengharuskan pimpinan Muhammadiyah untuk bertanya tentang krisis ideologi Muhammadiyah.

Berkembangnya fenomena persyarikatan Muhammadiyah melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), khususnya amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai magnitudo (daya tarik) sendiri bagi seseorang dan dapat menarik secara dahsyat untuk bergabung dengan Muhammadiyah. Mereka berusaha untuk bisa berkarir di Muhammadiyah melalui Amal Usaha Muhammadiyah tersebut. Di Kalimantan Tengah terdapat 6 (enam ) layanan kesehatan yang dua di antaranya adalah Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah yang ada di Kota Palangka Raya dan Pangkalan Bun di kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu di bidang pendidikan ada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Akademi Kebidanan dan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIKIP) Muhammadiyah di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, serta sekolah-sekolah dari PAUD/ TK , SD, SMP, SMA, SMK yang tersebar di 14 Kabupaten dan Kota. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang ada baik di bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan tenaga fungsional, tenaga struktural, dan tenaga administrasi yang dapat mengelolanya. Amal Usaha itu membutuhkan dokter, perawat, administrasi, dosen, guru, dan tenaga-tenaga yang lain yang jumlahnya bisa dibilang tidak sedikit. Lantas siapa yang akan mengisi pos-pos tersebut.

Menurut Mukhtar,

“pengisian tenaga-tenaga baik fungsional maupun struktural di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya adalah mereka yang mempunyai latar belakang

Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah juga sering melakukan pembinaan kader Muhammadiyah yang dilakukan oleh lembaga LPPKK (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keislaman KeMuhammadiyah) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Mereka mempunyai program-program seperti perkaderan melalui Baitul Arqam I dan II, Reorientasi KeMuhammadiyah, Kultum setelah Sholat Zhuhur, dan hapalan Al-Qur'an".<sup>87</sup>

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Normuslim bahwa, " di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, sistem perkaderannya sudah cukup baik yang dilakukan oleh LPPKK." Sebaliknya, tidak demikian halnya dengan Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah yang berdiri megah di Jalan R.T.A. Millono yang sebagian besar pegawainya bukan dari kader Muhammadiyah. Begitu juga kasus PAUD Aisyiyah di Barito Timur dengan ibukotanya di Tamiang Layang, tenaga pendidiknnya bukan orang Muhammadiyah juga.

Kenyataan ini yang membuat miris kader Muhammadiyah yang seharusnya dapat mengurus, mengelola amal usaha Muhammadiyah lantaran terjadinya krisis kader yang memiliki ideologi Muhammadiyah maka visi, misi, dan tujuan dari Muhammadiyah terjadi terkendala.

Sulit memang terkadang membedakan antara orang yang bergabung ke Muhammadiyah dan aktif di Muhammadiyah yang benar-benar mempunyai pemahaman ideologi Muhammadiyah dengan orang yang bergabung dengan Muhammadiyah aktif di Muhammadiyah akan tetapi mempunyai motivasi yang lain yang sifatnya pragmatis. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) ibaratnya gula yang memiliki daya tarik orang untuk bergabung dengannya.

---

<sup>87</sup> Wawancara tanggal 31 Agustus 2018

Hal itu perlu dicermati karena krisis ideologi yang pada hakekatnya adalah krisis ruh Islam itu akan berakibat buruk pada strategi, langkah perjuangan Muhammadiyah serta dalam ber-Muhammadiyah. Jika krisis tersebut terus berlangsung, maka tidak mustahil dalam waktu bersamaan persepsi mengenai ibadah, keikhlasan, dan amaliah akan bergeser ke arah baru bahkan mengalami pemudaran karena munculnya persepsi tentang upaya kompensasi, krisis apresiasi, dan kelayakan hidup di Muhammadiyah<sup>88</sup>.

Selain itu dengan datangnya pengaruh luar yang membentuk tren atau kecenderungan lain berupa nilai-nilai non Muhammadiyah juga telah melahirkan tujuan-tujuan serta pola perilaku baru dalam ber-Muhammadiyah sehingga menjadi masalah sendiri. Nilai-nilai baru itu merupakan pengaruh dari materialism individualistik dan pragmatisme yang merubah persepsi masyarakat mengenai makna ibadah, keikhlasan, dan amanah. Jika kecenderungan baru itu meluas dalam Muhammadiyah maka bukan sekedar akan menjadi sumber konflik, pergeseran motivasi dan perilaku ber-Muhammadiyah, akan tetapi sekaligus merupakan referensi baru yang akan menyentuh aspek ideologi Muhammadiyah baik dalam persepsi nilai-nilai Islam maupun dalam perilaku organisasi, sehingga menjadi persoalan mendasar.<sup>89</sup>

Sebagai contoh Muhammadiyah pernah mengalami pengaburan akibat terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau gerakan Muhammadiyah yang didasari nilai-nilai Islam oleh perkembangan lahiriyah serta masuknya pengaruh nilai luar yang begitu kuat. Situasi demikian mendorong dan menjadi

---

<sup>88</sup> MPK PP Muhammadiyah, Sistem Perkaderan Muhammadiyah: Majelis Pendidikan Kader PK Pimpinan Pusat Muhammadiyah , (Yogyakarta:MPK PP Muhammadiyah, 2016), h. 42-43

<sup>89</sup> Ibid.,

latar belakang dirumuskannya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (1945/1951). Demikian juga dengan lahirnya rumusan kepribadian Muhammadiyah(1962), muatan keyakinan dan cita-cirta hidup Muhammadiyah (1970) Khitthah perjuangan Muhammadiyah (Ujungpandang 1971), Surabaya (1978) mempunyai latar belakang yang terkait dengan krisis ideologi di tubuh Muhammadiyah.<sup>90</sup>

Dengan munculnya kecenderungan di dalam dan pengaruh faktor luar tersebut, di samping merupakan pemicu konflik dan pergeseran nilai serta penyimpangan perilaku ber-Muhammadiyah, juga memberikan pengaruh terhadap strategi dasar dan pengelolaan Amal usaha Muhammadiyah baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, layanan sosial dan amal usaha lainnya sebagai aset dan sumber daya Muhammadiyah. Pengaruh negatif ini mengarah pada orientasi pengelolaan AUM yang pragmatis, lepas dari visi dan misi Muhammadiyah.<sup>91</sup>

Jika masing-masing sektor AUM itu memiliki arah, strategi dan operasionalisasi yang tidak berpijak pada dasar yang ideologis persyarikatan, maka dapat dinilai terdapat terjadi kesalahan dalam rekayasa sosial dan pengelolaan AUM serta gerakan Muhammadiyah. Ekses dan dampak negatif dari penyimpangan ideologis tersebut jika tidak sekarang, maka baru bisa dirasakan satu atau dua generasi yang akan datang.<sup>92</sup>

Kelahiran rumusan-rumusan ideologis tersebut tampak sebagai karya filosofis. Pada satu sisi hal ini dapat diartikan sebagai jawaban ideologis akibat kekaburan serta pergeseran nilai pada kehidupan pimpinan, kader dan anggota Muhammadiyah sehingga

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid., h. 44

<sup>92</sup> Ibid.

bisa memagari pengaruh-pengaruh luar secara filosofis dengan tidak meremehkannya.<sup>93</sup>

Demikianlah untuk menjawab kecenderungan di atas dan dalam batas-batas tertentu untuk memecahkan masalah yang sekarang ini timbul, bagi Muhammadiyah tidak sekedar membutuhkan langkah pelurusan kembali manajemen gerakan agar tidak bebas nilai, akan tetapi menuntut adanya pendekatan filosofis dan sosiologis yang tepat. Urgensi dari kedua pendekatan ini dikaitkannya dengan Muhammadiyah dalam kedudukannya sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid* secara sebenar-benarnya.<sup>94</sup>

Dengan pendekatan filosofis tersebut maka akan dapat dipahami peta permasalahan secara mendasar dan menyeluruh, yang pada akhirnya dapat dilakukan terapi ideologis dalam rangka pemecahan masalah dan mendudukan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang dimaksud, di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan pendekatan filosofis tersebut juga dapat diupayakan langkah internalisasi ideologi dalam bentuk pembinaan nilai-nilai Islam dan akhlaq kepemimpinan serta berperilaku ber-Muhammadiyah bagi segenap pimpinan dan anggota Muhammadiyah secara terprogram dalam sistem Perkaderan.<sup>95</sup>

Kemudian dengan pendekatan sosiologis bisa ditelusuri akar persoalan dan faktor penyebab yang berlainan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi, secara mikro dan makro yang memengaruhi pudarnya ideologi Muhammadiyah. Melalui gerakan ini juga bisa dipetakan dan diprediksikan arah perubahan dalam kehidupan berbangsa, baik

---

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Ibid., h. 45

<sup>95</sup> Ibid.

secara lokal, nasional, maupun global yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap keberadaan Muhammadiyah dan kehidupan warga persyarikatan. Dalam hal ini perlu diperhatikan dengan seksama dinamika politik dan ekonomi, baik yang melibatkan partai politik maupun organisasi keagamaan lainnya, yang kerap ingin masuk dan memengaruhi Muhammadiyah.<sup>96</sup>

Dalam konteks masalah tersebut, peneguhan ideologi perlu dirancang sedemikian rupa, antara lain melalui perkaderan, sehingga dapat memberikan daya respon yang produktif bagi kepentingan persyarikatan dan kepercayaan diri para kader dan anggota Muhammadiyah. Peneguhan ideologi merupakan ikhtiar untuk meneguhkan dan menanamkan kembali paham dan perjuangan Muhammadiyah kepada seluruh anggota dan kader yang sangat penting dan strategis guna memelihara dan memperkokoh eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Segenap pemimpin, kader, dan anggota persyarikatan dan siapapun yang berada di lembaga-lembaga persyarikatan dituntut untuk memahami dan mengaktualisasikan gerakan Muhammadiyah sesuai dengan idealisme gerakannya.<sup>97</sup>

Revitalisasi dan penguatan kembali ideologi merupakan tuntutan yang niscaya dalam gerakan Muhammadiyah. Secara faktual, kepentingan akan peneguhan atau penguatan ideologi didasarkan atas pertimbangan untuk menghadapi perkembangan baru yang mempengaruhi Muhammadiyah, didasarkan atas latar belakang situasi kehidupan yang tumbuh dan berkembang khususnya yang menyangkut aspek ideologis dari berbagai kelompok sosial pada era reformasi sejak 1998.

Fakta menunjukkan bahwa era reformasi telah melahirkan kecenderungan baru, yakni tumbuh dan berkembangnya berbagai

---

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Ibid.

gerakan seperti gerakan keagamaan, partai politik, kelompok kepentingan dan sebagainya yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa. Gerakan-gerakan baru tersebut tampil bukan sekadar memperjuangkan kepentingan tetapi juga paham dan ideologinya baik yang bercorak moderat maupun yang bercorak radikal, termasuk di dalamnya paham dan gerakan keagamaan di lingkungan umat Islam.<sup>98</sup>

Kepentingan revitalisasi ideologi dalam Muhammadiyah saat ini bukanlah sesuatu yang baru juga bukan sebagai tuntutan kondisional semata. Kepentingan tersebut juga bukan merupakan suatu hal yang penting dan melekat dengan sejarah perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sekaligus merupakan tuntutan yang mendasar untuk menjaga keteguhan dan kelangsungan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memiliki keyakinan dan cita-cita hidup sebagaimana telah menjadi alam pikiran yang fundamental selama ini.<sup>99</sup>

Berdasarkan tuntutan dan keharusan tersebut, termasuk dalam penanaman nilai-nilai ideologis pada perilaku ber-Muhammadiyah, maka dituntut adanya fungsi Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Di situlah letak urgensi perkaderan Muhammadiyah yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan dengan dasar dan pijakan yang kuat dan orientasi gerakan yang jelas. Dalam kaitan inilah, proses reformasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid dengan upaya internalisasi dan penyadaran nilai-nilai Islam di bawah tuntutan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang kemudian menuntut fungsi dari seluruh elemen Muhammadiyah untuk melaksanakan kaderisasi yang dimaksud.

---

<sup>98</sup> Ibid., h.46

<sup>99</sup> Ibid., h. 47

## **RESPON KADER MUHAMMADIYAH TERHADAP KEPEMIMPINAN PUBLIK KALIMANTAN TENGAH DI ERA REFORMASI**

**P**ada bagian ini, penulis ingin memaparkan tentang respon keterlibatan 3 (tiga) orang kader Muhammadiyah dalam rekrutmen politik pada kepemimpinan publik Kalimantan Tengah di Era Reformasi. Mereka adalah Achmad Diran yang berhasil terpilih sebagai wakil gubernur Kalteng dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015, Ade Supriyadi yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kalteng dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019, dan Muhammad Riban Satia yang berhasil terpilih sebagai walikota Palangka Raya dua periode, 2008-2013 dan 2013-2018.

Di samping itu akan dipaparkan pula respon mereka terhadap isu-isu demokrasi. Isu demokrasi merupakan isu *update* dan menjadi isu sentral yang dituntut oleh para reformis, sehingga mengantarkan bangsa ini ke alam era reformasi.

### **A. Achmad Diran**

#### **1. Biografi Singkat**

Ir. H. Achmad Diran lahir pada tanggal 1 Januari 1949 di Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan dasar di SRN Jatipurno, Wonogiri (1962). Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke STN VI Semarang (1965) dan SMAN Semarang (1969). Kemudian ia meneruskan studinya ke Akademi Pertanian Tanjungsari, Sumedang (1973). Pendidikan S1 ditempuhnya di

Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (1979).

Achmad Diran mulai berkarir di Kalimantan Tengah sebagai guru di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Buntok Kabupaten Barito Selatan. Kemudian sebagai PNS, ditugasi menjadi Kepala UPP Perkebunan Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Kapuas. Setelah itu ia ditugasi menjadi Kasubdin Program Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ia diangkat menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (1990–1996). Kemudian ia terpilih menjadi Bupati Barito Selatan periode 1995–2001. Selesai menjabat bupati ia ditugasi menjadi Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Prov. Kalteng (2001–2005). Kemudian ia diangkat menjadi Pj. Bupati Kotawaringin Barat (2005).

Di Era Reformasi pada Pilihan Gubernur Kalteng 2005 Achmad Diran berpasangan dengan Agustin Teras Narang mencalonkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Hasil pilgub Kalteng 2005, menempatkan pasangan Teras-Diran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih karena mendapat suara terbanyak dibandingkan dengan empat pasangan yang lain. Dengan demikian pasangan Teras-Diran mendapat amanat untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2005-2010.

Kemudian pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010 Achmad Diran kembali berpasangan dengan Agustin Teras Narang mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Masyarakat Kalimantan Tengah kembali mempercayakan kepada pasangan Teras-Diran untuk memimpin Kalteng periode 2010-2015. Achmad Diran merupakan kader Muhammadiyah yang secara pribadi terjun ke dunia politik praktis Kalimantan Tengah di Era Reformasi.

Menurut hemat penulis, jabatan publik yang pernah dijabat oleh Achmad Diran seperti menjadi Bupati Barito Selatan di masa Orde Baru merupakan keberhasilan Diran menggunakan jalur ABRI (militer), birokrat (B), dan Golkar yang lebih dikenal dengan pendekatan ABG-nya. Berbeda dengan Era Reformasi, sistem pemilu eksekutif tidak lagi menggunakan pendekatan ABG karena dwifungsi ABRI (TNI) telah dihapuskan, dan birokrasi tidak boleh memengaruhi proses rekrutmen politik. Demikian pula partai politik mempunyai kedudukan yang sama, sehingga ketiga unsur tersebut harus kembali kepada fungsinya masing-masing.

Langkah Achmad Diran untuk maju di Pilkada Kalteng 2005 merupakan langkah strategis meskipun hanya pada posisi orang nomor “2” yakni menjadi wakil gubernur. Hal ini dikatakan strategis karena posisi itulah yang paling memungkinkan bagi Diran dengan pertimbangan bahwa dirinya bukan putra asli daerah Kalteng tetapi sebagai pendatang dari pulau Jawa. Di sisi lain Achmad Diran merupakan figur pendatang dari pulau Jawa yang mempunyai kans yang kuat sebagai pemimpin daerah antara lain karena konstelasi politik di mana penduduk Kalteng diperkirakan lebih dari 35% adalah pendatang dari pulau Jawa.

Ketokohan dan kedekatan Achmad Diran dengan masyarakat pendatang dari pulau Jawa inilah salah satu pertimbangan Agustin Teras Narang untuk melamar Achmad Diran sebagai pasangannya dalam Pilgub Kalteng 2005. Hal ini mengingat bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak lagi dipilih oleh wakil rakyat di DPRD melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Era Reformasi. Pertimbangan ini pula mengapa dalam setiap kampanye di kantong-kantong masyarakat pendatang dari Jawa, tim pasangan Teras-Diran sudah barang tentu memanfaatkan ketokohan dan kedekatan Achmad Diran dengan karakter dan budaya masyarakat setempat .

## 2. Ideologi Pancasila Tidak Bertentangan dengan Agama

Menurut Achmad Diran, agama sangat penting dan negara sangat berkepentingan dengan agama. Oleh karena itu pembinaan kerukunan umat beragama juga sangat penting. Dengan trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama (sesama muslim ada Muhammadiyah, NU, LDII, dsb. harus rukun), kerukunan antar umat beragama (Umat Islam dengan umat yang berbeda agama: Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dsb.), dan kerukunan umat beragama (umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) dengan pemerintah.

Berkenaan dengan pandangan sekuler bahwa Islam dan politik (agama dan negara) adalah dua institusi yang berbeda dan keduanya terpisah tidak ada hubungan apa-apa. Achmad Diran menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut paham sekuler dan Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama.

Sebagaimana paham *mainstream* umat Islam khususnya Muhammadiyah, yang memahami hubungan agama dan negara sebagai dua institusi yang berbeda, dan keduanya saling melengkapi dan membutuhkan. Pandangan ini menepis anggapan paham bahwa Islam dan politik (agama dan negara) adalah satu institusi, menyatu, tidak dapat dipilah dan tidak dapat dipisahkan.

Diran setuju terhadap pandangan bahwa Islam dan politik (agama dan negara) adalah dua institusi yang berbeda namun keduanya dapat saling mendukung dan menguatkan. Pandangan yang bersifat simbiotik ini menegaskan bahwa negara dan agama adalah dua institusi yang dapat dibedakan namun keduanya saling melengkapi dan membutuhkan.

Diran setuju jika dikatakan bahwa antara prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip Islam tidak jauh berbeda. Menurutnya banyak nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keterbukaan, kejujuran, musyawarah dan keadilan sosial.

Menurut Achmad Diran bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sesuai dengan konsensus para pendiri bangsa dan negara ini yang menyepakati dan menetapkan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Menurut Diran, para pemimpin yang beragama Islam ketika itu secara ikhlas menghapus tulisan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Sesuai dengan konsensus tersebut maka tidak dibenarkan apabila ada orang yang mempertentangkan antara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan nilai-nilai Islam.

Apabila ada yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara hendaknya diberi penjelasan dan pemahaman. Menurut Diran, perbedaan pendapat boleh namun tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan orang tersebut hendaknya mendapat pemahaman yang benar tentang hubungan agama dan negara.

Menurut hemat penulis, pandangan Achmad Diran mengenai hubungan agama dan ideologi Pancasila di Indonesia sudah cukup menggambarkan tipologi pemikiran muslim Indonesia yang cenderung moderat dalam melihat hubungan Islam dan demokrasi. Pandangan tersebut juga sejalan dengan pandangan ideologis Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai persyarikatan menyadari posisinya sebagai organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan lainnya adalah organisasi kultural bukan organisasi politik.

Namun demikian, Muhammadiyah sendiri sebagai persyarikatan atau organisasi kultural memiliki pandangan dan sikap politik yang berorientasi pada politik kenegaraan yang diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh

pendirinya KH Achmad Dahlan bahwa Muhammadiyah sebagai persyarikatan adalah bukan organisasi politik akan tetapi Muhammadiyah tidak buta politik dan tidak anti-politik. Hal ini mengindikasikan ajaran Muhammadiyah kepada para kadernya untuk melek terhadap politik dan sedapat mungkin berkontribusi terhadap perkembangan politik meskipun tidak berada di jalur politik praktis.

### 3. HAM, Kesetaraan Jender, dan Terorisme

Mengenai hak asasi manusia dalam pandangan Islam, menurut Achmad Diran bahwa Islam sangat menjunjung HAM. Namun demikian, menurutnya, HAM di Indonesia harus disesuaikan dengan norma-norma agama dan adat istiadat dalam masyarakat. Menurut Diran, selama ini terkesan bahwa pelanggaran HAM itu hanya dilakukan oleh aparaturnegara padahal warga masyarakat biasa juga ada yang melanggar HAM seperti pembunuhan dan penganiayaan kepada orang lain.

Menurut Diran, konsep HAM yang ditawarkan Barat secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun apabila dalam HAM itu ada kebebasan yang tidak mengindahkan norma-norma agama dan adat istiadat setempat maka itu bertentangan dengan ajaran agama.

Mengenai kesetaraan jender dalam Islam, menurut Achmad Diran bahwa Islam menghendaki kesetaraan jender namun sesuai dengan kodrat manusia. Konsep kesetaraan jender yang ditawarkan Barat, menurut Diran ada yang diterima ada juga yang ditolak apabila tidak sesuai dengan norma-norma agama dan adat istiadat

Konsep kesetaraan jender yang ditawarkan Barat bertentangan dengan Islam, menurut Diran seperti kebebasan perkawinan sejenis dan sebagainya yang intinya bertentangan dengan kodrat manusia. Konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam, menurut Diran pada dasarnya laki-laki dan perempuan boleh memimpin. Namun di sektor publik laki-laki lebih diutamakan.

Menurut hemat penulis, konsepsi hak asasi manusia yang dikemukakan Achmad Diran sangat sederhana dan sosiologis yaitu HAM yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat. Formulasi kalimat yang dikemukakan Diran terkesan sangat sederhana namun dalam implementasinya tentu tidak mudah. Ada dua hal yang perlu digaris bawahi yaitu HAM harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan HAM harus sejalan dengan nilai-nilai adat istiadat.

HAM yang sejalan dengan nilai-nilai agama tentunya adalah HAM yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia sesuai dengan sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dalam Pancasila. Titik temunya adalah nilai-nilai HAM, dan nilai-nilai universal dari jaran agama serta adat istiadat terdapat pada prinsip-prinsip demokrasi seperti kejujuran, keadilan, persamaan, persatuan dan toleransi. Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang menentang prinsip-prinsip tersebut. Demikian pula dengan adat istiadat di masing-masing daerah. Hanya saja sering terjadi kesalahpahaman dalam memahami norma-norma HAM, norma-norma agama dan norma-norma adat sehingga terkesan kontradiksi antara satu dengan yang lainnya.

Mengenai terorisme dan radikalisme, menurut Diran, hal itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Diran menegaskan bahwa Islam rahmatan lil’alamien, yang berarti bahwa Islam memberikan kedamaian untuk semua umat manusia dan seluruh makhluk. Diran juga menekankan agar umat Islam memiliki pemahaman moderat, tidak terjebak pada ekstrimisme dalam pola pikir, pola sikap dan bertindak. Intinya terorisme yang menggunakan kekerasan dan merugikan orang lain untuk mencapai tujuannya bertentangan dengan ajaran Islam.

#### 4. Demokrasi, Partisipasi Rakyat dan Kebebasan Berpendapat

Achmad Diran setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena

menurutnya, pemimpin itu berasal dari rakyat dan tampilnya dia memimpin harus ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Namun perlu partisipasi rakyat secara keseluruhan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Achmad Diran setuju bahwa demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila bukan demokrasi ala Barat. Menurut Diran, berbagai bangsa dan negara di dunia ini menggunakan ideologi masing-masing maka sesuai dengan konsensus pendiri bangsa ini bahwa bangsa Indonesia mendirikan negara dengan dasar Pancasila. Karena itu Indonesia menganut demokrasi yang berdasarkan Pancasila, bukan demokrasi liberal.

Salah satu ciri dari kehidupan demokrasi adalah adanya kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat. Cara yang baik untuk menyalurkan pendapat menurut Diran adalah dengan menyampaikannya baik lisan maupun tertulis karena hal itu sudah dijamin di dalam undang-undang. Kecuali kalau mengemukakan pendapat dengan cara merusak fasilitas umum maka hal itu tidak dibenarkan karena hal itu bertentangan dengan dasar-dasar ketertiban umum.

Mengenai kebebasan pers, menurut Achmad Diran, adalah kebebasan yang bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, kontrol sosial pers terhadap pemerintah di era keterbukaan ini hendaknya konstruktif dan tidak menimbulkan anarkisme. Kalau ada pers yang “mengkritik” pemerintah tidak perlu dibredel hanya perlu ada komunikasi dan dialog.

Achmad Diran setuju apabila dikatakan bahwa bahwa reformasi 1998 telah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan sosial politik Indonesia. Perubahan itu misalnya dalam sistem pemilu, khususnya dalam pilkada, rakyat dapat memilih langsung pemimpinnya melalui pemungutan suara. Oleh karena itu

ia juga setuju bahwa di Era Reformasi ini pemerintahan Indonesia dijalankan secara lebih demokratis apabila dibandingkan dengan di masa Orde Baru karena kran demokrasi telah dibuka lebar.

Menurut Achmad Diran, birokrasi di Kalteng berjalan baik hanya saja perlu ditingkatkan lagi. Demikian pula reformasi di bidang hukum sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi. Begitupun dengan reformasi di bidang ekonomi, budaya dan pendidikan dalam penilaian Achmad Diran, sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi.

Menurut hemat penulis, demokrasi dalam praktiknya tidak boleh lepas dari partisipasi rakyat karena seyogianya rakyat yang melakukan kontrol terhadap pemerintah. Inilah partisipasi rakyat dalam arti sesungguhnya. Boleh jadi pejabat yang sering berkunjung (blusukan) ke pelosok-pelosok untuk menyerap aspirasi rakyat menemukan secara langsung di mana saja titik lemah pemerintahan yang ia jalankan. Pejabat publik tidak boleh menerima laporan hanya di atas kertas atau di atas meja saja akan tetapi ia harus terjun langsung melihat dan menyaksikan sendiri kenyataan di lapangan.

Inilah mungkin yang menjadi prinsip pemerintahan di bawah pimpinan Teras-Diran yang sering berkunjung (blusukan) ke daerah-daerah pelosok sehingga Achmad Diran dan Agustin Teras Narang mempunyai kesepakatan apabila Agustin Teras Narang sebagai gubernur berkunjung ke daerah-daerah maka Achmad Diran yang stand by di Kantor Wakil Gubernur dan apabila Achmad Diran sebagai wakil gubernur berkunjung ke daerah-daerah pelosok maka Agustin Teras Narang yang harus *stand by* di Kantor Gubernur. Dengan demikian akan meningkatkan intensitas kunjungan gubernur dan wakil gubernur ke daerah-daerah pelosok seantero Kalimantan Tengah.

Sementara itu kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sering dikategorikan sebagai salah satu pilar demokrasi di suatu

negara. Komunikasi Teras-Diran dengan masyarakat Kalteng dirasakan cukup lancar. Pemerintah provinsi yang dipimpin pasangan duet Teras-Diran dikenal sangat familiar dengan para awak media dan terbuka berkomunikasi langsung dengan rakyat. Komunikasi mereka terjalin baik dalam kunjungan langsung ke daerah-daerah maupun komunikasi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

#### 5. Rekrutmen Politik dan Sistem Pemilu

Diran setuju bahwa sistem politik negara kita sudah sejalan dengan cita-cita reformasi 1998. Hanya saja, menurutnya, pemimpin yang dipilih secara langsung baik itu gubernur maupun bupati/walikota terkadang kurang memperhatikan latar belakang pengalaman dan pendidikan mereka. Menurut Diran, sebaiknya syarat pencalonan dalam pemilu kada baik pilgub maupun pilbup/walikota memperhatikan latar belakang pengalaman dan pendidikan, sekurang-kurangnya calon berpendidikan sarjana strata satu.

Diran setuju apabila dikatakan bahwa otonomi daerah di Era Reformasi membawa perubahan positif bagi rakyat di daerah. Begitu pula terhadap pemerintah daerah. Karena dengan otonomi daerah menurutnya, rakyat dapat dengan leluasa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah. Diran tidak setuju apabila dikatakan bahwa otonomi daerah di Era Reformasi membawa dampak negatif bagi pemerintah daerah.

Salah satu ciri dari kehidupan demokrasi adalah adanya pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah dan kepala negara. Perbedaan yang mencolok antara Orde Baru dan Era Reformasi ini adalah adanya pemilu langsung di mana rakyat memilih langsung calon pemimpinnya melalui pemungutan suara baik itu pemilihan legislatif maupun eksekutif.

Dalam pandangan Diran bahwa penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)

sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemilu legislatif selama Era Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014) menurut Achmad Diran, sudah berjalan dengan baik, hanya saja di beberapa segi perlu ditingkatkan lagi.

Menurut Diran, penyelenggaraan pemilihan umum presiden, selama Era Reformasi telah berjalan dengan baik, rakyat dapat memilih langsung siapa pemimpinnya. Dengan memilih langsung maka rakyat dapat menentukan pilihannya kepada pasangan yang diyakini mampu dan menjadi tumpuan harapan mereka.

Penyelenggaraan pilkukada di Kalimantan Tengah selama Era Reformasi menurut Diran, telah berjalan dengan baik. Dalam penilaian Diran, regulasi atau aturan tentang pemilu sudah memadai hanya saja perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Begitu pula dengan penyelenggaraan pemilu presiden ke depan agar ditingkatkan kualitasnya.

Berkenaan dengan isu-isu terjadinya *money politic* dan kecurangan lainnya dalam Pilkada Kalteng, Diran menanggapi “Kita harus objektif. Bila ada isu *money politic* harus dibuktikan secara nyata”.

Diran menilai, selama Era Reformasi ini terlalu banyak partai politik. Ia berpendapat dan cenderung jumlah partai politik tidak banyak, sedikit saja. Namun Diran tidak menyebut berapa jumlah yang ideal. Untuk perbaikan penyelenggaraan Pilkada Kalteng ke depan, menurut Achmad Diran, pemimpin hendaknya memahami apa keinginan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah.

Menurut Diran, kelebihan yang ada dalam Pilkada Kalteng di Era Reformasi dibandingkan dengan era Orde Baru adalah pemilihan langsung oleh rakyat karena kebebasan dalam demokrasi makin terbuka. Menurut Diran penyelenggaraan Pilkada Kalteng selama ini sudah baik, hanya saja ke depan perlu terus ditingkatkan. Menurut Diran, rakyat Kalteng pada umumnya sudah matang dan

dewasa dalam persoalan politik khususnya dalam menentukan pilihannya dalam pilkada.

Achmad Diran mengingatkan jangan sampai ada dendam, setelah pemilu selesai maka semua pihak hendaknya menerimanya dengan ikhlas. Yang menang laksanakan tugas dan amanat dengan baik, yang kalah tidak perlu kecewa. Intinya konflik harus dihindari dan jangan ada dendam, tandas Diran .

Menurut hemat penulis, beberapa catatan yang dikemukakan oleh Achmad Diran mengenai rekrutmen politik di daerah menggambarkan sistem pemilu yang berjalan selama ini memang harus menerima banyak pembenahan dan perbaikan. Pertama, sistem kepartaian yang menurut Diran saat ini terlalu banyak jumlah partai politik. Ia setuju apabila jumlah partai politik sedikit saja namun tidak disederhanakan jumlahnya seperti di zaman Orde Baru. Boleh jadi jumlah partai politik dari pemilu ke pemilu akan semakin berkurang karena terseleksi secara alamiah dan masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berpolitik. Dalam beberapa tahap pemilu ke depan akan lebih sedikit jumlah partai politik yang mengikutinya.

Kedua, persyaratan calon kepala daerah dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai. Diran mensyaratkan calon gubernur dan bupati/walikota minimal berlatar belakang pendidikan sarjana strata satu dan memiliki pengalaman yang memadai. Hal ini hendaknya dilihat dari tingkat selektifitas pada masyarakat, apakah tingkat pendidikan dan pengalaman itu mampu menghasilkan pemimpin yang lebih berbobot. Pendidikan dan pengalaman memang salah satu persyaratan pokok yang tidak boleh diabaikan untuk menyaring dan menjaring calon pemimpin yang diidamkan di masa depan. Persyaratan yang dikemukakan Diran di atas sangat masuk akal karena tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia sudah sangat memadai.

Ketiga, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Diran tidak menepis isu bahwa dalam pemilu masih terjadi kecurangan seperti *money politic* (politik uang) namun hal itu sulit dibuktikan di sidang pengadilan. Secara makro bahwa pengawasan pada penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan. Belajar dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya bukan hanya pengawasan yang perlu ditingkatkan akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti penting pemilu itu sendiri. Hal ini dimungkinkan apabila masyarakat memperoleh pendidikan politik yang memadai. Inilah salah satu tugas partai politik yang selama ini sering terabaikan yaitu memberikan pendidikan politik secara praktis kepada masyarakat.

## 6. Motivasi dan Latar Belakang

Apa yang mendorong Achmad Diran untuk terjun ke dunia politik praktis. Menurut Achmad Diran, dirinya ingin berbakti dan mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui kepemimpinan di daerah. Sebagai kader Muhammadiyah tentu ingin lebih berperan di tengah-tengah masyarakat. Dengan pertimbangan itu Diran bersedia dicalonkan sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Agustin Teras Narang pada pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2005.

Begitu pula pada pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2010 Achmad Diran kembali diajak dan dilamar oleh Agustin Teras Narang untuk dicalonkan sebagai calon wakil gubernur. Dalam kalkulasinya, Achmad Diran merasa cukup untuk dicalonkan sebagai calon wakil gubernur saja. Ia menyadari bahwa ia tidak berpeluang untuk dicalonkan sebagai gubernur karena bukan putra daerah.

Mengingat persaingan yang ketat dalam pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah, Achmad Diran merasa bersyukur menerima kepercayaan dari masyarakat. Seandainya pasangan

Teras-Diran kalah atau tidak terpilih pun ia menerimanya dan tidak perlu merasa kecewa.

Secara eksternal apa yang mendorong Diran bersedia dicalonkan sebagai calon wakil gubernur pada pilkada Kalteng 2010 menurut Achmad Diran bahwa dirinya diajak dan dilamar kembali untuk berpasangan dengan Agustin Teras Narang pada pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2010. Di samping itu adanya keinginan untuk melanjutkan visi dan misi pasangan Teras-Diran lima tahun ke depan.

Pengalaman yang berkesan selama Diran meniti karir di dunia birokrasi. Dia meniti karir dari bawah. Apabila diurut sejak awal Diran meniti karirnya sejak menjadi guru di SMK, kemudian bertugas sebagai kepala sub dinas perkebunan hingga kepala Kanwil Perkebunan Kalimantan Tengah, bupati dan pejabat bupati, hingga asisten gubernur Kalteng yang dialami di masa pemerintahan Orde Baru. Pengalaman tersebut menjadi modal dalam menjalankan kepemimpinan di Kalteng di Era Reformasi.

Beberapa keberhasilan program yang dicangkan oleh pasangan Teras-Diran di antaranya di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian. Di bidang kesehatan Achmad Diran sebagai wakil gubernur bersama Agustin Teras Narang selaku gubernur menggulirkan program Kalteng Barigas. Program ini antara lain bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti diperlukan data kesehatan yang baik yang berbasis fasilitias maupun komunitas yang dikumpulkan secara berkesinambungan.

Di bidang pendidikan, pasangan Teras-Diran menggulirkan program Kalteng Harati. Program tersebut antara lain bertujuan mempercepat peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Kalimantan Tengah sejalan dengan tuntutan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, berkompeten dan berkarakter.

Di bidang pertanian dalam arti luas, gubernur dan wagub, Teras-Diran menggulirkan program Kalteng Besuh. Program ini merupakan bentuk keperpihakan pemerintah Kalimantan Tengah terhadap kelestarian kearifan lokal sebagai upaya untuk memantapkan dan memperkokoh ketahanan pangan, ketersediaan pangan dan kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah.

Pengalaman yang berkesan selama Diran memimpin Kalteng mendampingi Agustin Teras Narang di antaranya sering terjun ke daerah-daerah dan menyaksikan langsung kehidupan masyarakat dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Tidak jarang Achmad Diran dan Agustin Teras Narang secara bergantian terjun ke masyarakat di berbagai pelosok di pedalaman untuk menengok langsung dan berdialog dengan rakyatnya.

Di Era Reformasi pada pilgub Kalteng 2005 Achmad Diran berpasangan dengan Agustin Teras Narang mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan Teras-Diran diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hasil pilgub Kalteng 2005 menempatkan pasangan Teras-Diran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih karena mendapat suara terbanyak dibandingkan dengan empat pasangan yang lain. Dengan demikian pasangan Teras-Diran mendapat amanat untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2005-2010.

Kemudian pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010 Achmad Diran kembali berpasangan dengan Agustin Teras Narang mencalonkan diri (kembali) sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan Teras-Diran kembali diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pilgub Kalteng langsung kedua di era reformasi ini. Masyarakat Kalimantan Tengah kembali mempercayakan kepada pasangan Teras-Diran untuk memimpin Kalteng periode 2010-2015.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Gamawan Fauzi, pada masa kepemimpinan pasangan Teras-Diran pembangunan di Kalteng sangat jelas hasilnya. Misalnya pada saat Indonesia diterpa krisis, pertumbuhan ekonomi Kalteng justru naik hingga 5%. Peningkatan APBD dari semula Rp 590 miliar naik menjadi Rp 2 triliun (400%) dalam 5 tahun. Dalam kepemimpinannya, Teras Narang dan Achmad Diran memprioritaskan lima sektor pembangunan, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan dan lingkungan hidup.

Sebagai wakil gubernur, Achmad Diran dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dari berbagai golongan. Bersama Teras Narang, beliau bersedia memimpin langsung pembangunan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya sejak Mei 2010 dan diresmikan penggunaannya pada Agustus 2015.

Pada bulan April 2010, ia pernah menyatakan bahwa selama lima tahun pertama kepemimpinan, ia berusaha menjauhkan diri dari praktik KKN. Ia berjanji untuk tidak akan pernah memberikan fasilitas kemudahan bagi anak-anak dan kerabatnya untuk ikut dalam proyek pemerintahan. Sebelum menjadi wagub, Achmad Diran sudah cukup lama menapaki dunia birokrasi. Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Barito Selatan ini membangun karirnya dari nol.

Menurut hemat penulis, kemauan Achmad Diran untuk mengabdikan kepada masyarakat melalui kepemimpinan daerah adalah iktikad yang sangat mulia bagi seorang kader Muhammadiyah. Karir Diran di birokrasi dan politik bisa dikatakan sempurna meski hanya menjabat sebagai orang nomor “2” di Kalteng. Kemauan Achmad Diran untuk memimpin Kalteng selama dua periode bersama Agustin Teras Narang menunjukkan kemauan yang kuat untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Kemauan yang tulus dari Achmad Diran untuk memimpin daerah Kalimantan Tengah selama dua periode seperti tidak ada kerikil-kerikil yang menghalanginya. Boleh jadi hal itu terjadi karena sifat religius yang tertanam pada diri seorang Diran sebagai kader Muhammadiyah. Kebesaran dirinya berdampingan dengan Agustin Teras Narang tidak membuatnya sombong dan angkuh. Di saat lain ketika dirinya mencalonkan diri sebagai calon gubernur ke PDIP dan ditolak pada pilgub Kalteng 2015, tidak membuat dirinya kecewa berat. Setelah purna tugas sebagai wakil gubernur, Diran tetap ingin mengabdikan kepada masyarakat dengan cara yang lain yakni dirinya tetap ingin mengabdikan kepada masyarakat melalui persyarikatan Muhammadiyah.

Peristiwa di atas membuktikan bahwa Achmad Diran adalah kader Muhammadiyah yang tulus ingin mengabdikan kepada masyarakat dalam situasi apapun. Achmad Diran juga membuktikan dirinya bukan orang yang haus jabatan dan kekuasaan. Diran menyadari roda kehidupan dalam politik kekuasaan, ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Ketulusan Diran juga tercermin saat menjabat wakil gubernur. Dia membatasi keluarganya dan anak-anaknya supaya tidak menggunakan istilah “mumpang berkuasa” dan tidak boleh terlibat dalam proyek-proyek besar pembangunan di Kalimantan Tengah.

#### 7. Pendekatan kepada Masyarakat

Achmad Diran termasuk figur yang dekat dengan masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai lapisan etnis, suku dan budaya. Lebih-lebih terhadap masyarakat pendatang dari Jawa, Achmad Diran adalah salah satu dari sesepuh Paguyuban Kulowargo Jowo (Pakuwojo) Kalimantan Tengah yang merupakan paguyuban masyarakat pendatang dari Jawa. Menurut Achmad Diran, tidak jarang ia ditunggu pendapatnya bagi warga pendatang asal Jawa kepada siapa pilihan dijatuhkan saat pemilukada di Kalteng.

Achmad Diran juga termasuk figur pemimpin yang dekat dengan media massa daerah dan nasional baik media cetak maupun elektronik. Bagi awak media (jurnalis) di Kalteng sosok dan figur Achmad Diran sudah tidak asing lagi bagi mereka. Diran adalah bagi siapa saja termasuk para awak media. Oleh karena itu komunikasi awak media kepada Achmad Diran sangat lancar dan tanpa hambatan. Kedekatan Diran kepada awak media ini sudah barang tentu berdampak terhadap kedekatan Diran dengan publik atau masyarakat Kalteng.

Kedekatan Achmad Diran dengan masyarakat terlihat nyata melalui kerukunan antar suku dan agama di Kalimantan Tengah yang multietnis, di mana suku terbesarnya adalah suku Dayak. Mereka dapat hidup rukun dengan suku-suku lain maupun para pendatang karena saling-menghargai perbedaan masing-masing. Achmad Diran sendiri adalah seorang penganut agama Islam yang taat dan berasal dari Jawa, namun hal itu tidak jadi masalah dan malah saling melengkapi ketika bersanding dengan Teras Narang yang asli suku Dayak Ngaju dan beragama Kristen Protestan.

Dalam kedudukannya sebagai wakil gubernur, tidak jarang Achmad Diran memberikan nasihat inklusif kepada umat beragama agar, selain menjaga kerukunan dan toleransi, juga rajin dan taat dalam menjalankan ritual keagamaan, bagi yang muslim rajin mengaji Qur'an, salat dan pergi ke masjid, yang Kristen rajin ke gereja dan seterusnya. Secara internal umat Islam, Diran juga tidak jarang mengingatkan pentingnya dijaga kerukunan internal umat beragama, antara warga Muhammadiyah, NU, LDII dan sebagainya. Ia juga menekankan pentingnya kerukunan antara pemerintah dengan umat beragama. Menurutnya, pemerintah harus berlaku adil untuk semua umat beragama.

Achmad Diran sering melakukan lawatan dan safari ke daerah-daerah untuk menampung aspirasi warga untuk disampaikan kepada Gubernur, atau sekedar memperkuat persatuan. Sebagai

contoh pada malam takbiran Lebaran 2006 beliau tak segan-segan turun langsung menghampiri para petugas yang sedang menjalankan Operasi Ketupat Telabang 2006 di posnya di Bundaran Besar Palangka Raya. Achmad Diran yang juga seorang sarjana pertanian memang lebih banyak menjalankan operasional sehari-hari seperti menjadi penanggungjawab pemberantasan *illegal logging*.

Dalam programnya untuk memberantas *illegal logging* ini Pemprov sudah membentuk Tim Terpadu melalui SK Gubernur Kalteng Nomor 164 Tahun 2005 tanggal 2 Agustus 2005, yang kemudian direvisi dengan Keputusan Nomor 371 Tahun 2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pembentukan Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan hutan Provinsi Kalteng, yang unsurnya terdiri dari TNI, Polri dan Instansi Pemerintah terkait.

Pada bulan Februari 2012, Achmad Diran mengirim surat ke Menkopolhukam untuk menyampaikan keberatan atas tuduhan Front Pembela Islam (FPI) terhadap segenap tokoh masyarakat Kalimantan Tengah karena telah menolak pembentukan FPI di sana, yang sebetulnya didasari alasan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah .

Achmad Diran juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan apa adanya. Ia tidak pernah mau jika ditawarkan berkunjung ke negara-negara bersuhu dingin seperti Eropa lantaran takut terserang asma. Diran mengaku bahwa belum tentu setahun sekali ia pergi keluar negeri meski tawaran kunjungan sebenarnya cukup banyak.

Berkaitan dengan isu akan dinaikkannya harga BBM pada bulan April 2012, Diran dengan tegas melarang kepala daerah di wilayahnya untuk ikut melakukan aksi unjukrasa menolak kenaikan harga BBM karena kepala daerah adalah aparat pemerintah yang merupakan saluran resmi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada pemerintah pusat. Achmad Diran adalah ibarat seekor ikan yang masuk ke dalam air, bila berhadapan dan bergaul dengan kalangan masyarakat biasa.

Pengabdian Achmad Diran untuk Kalimantan Tengah telah menjadi bagian nyata di bumi Tambun Bungai ini. Salah satunya adalah Achmad Diran merupakan orang yang pertama kali menggagas Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Kalimantan Tengah. Rencana Induk tersebut menjadi komponen utama Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pengembangan perkebunan yang terjadi pada bagian Tengah wilayah Kalimantan Tengah yang membentuk sabuk perkebunan kelapa sawit yang produktif dimulai pada saat Diran menjadi staf dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah .

Menurut hemat penulis, Achmad Diran adalah figur pemimpin yang dekat dengan masyarakat bawah dan kalangan birokrat. Faktor-faktor kedekatan tersebut antara lain (a) Achmad Diran berlatar belakang orangtua petani dan dibesarkan dalam keluarga petani, masyarakat yang dipimpin oleh Diran yakni masyarakat Kalteng sebagian besar juga adalah petani dalam arti luas, Diran sangat menghayati dan dekat dengan karakter dan budaya masyarakat petani, (b) berkarir sebagai guru di bidang pertanian (guru SMK Pertanian), dengan latar belakang akademik di bidang pertanian, bahkan menjadi kepala dinas perkebunan, lagi-lagi membuat Achmad Diran mudah menangkap dan menyelami kehidupan petani, (c) karir dan jabatan yang ditempuh Achmad Diran dari bawah dan terus menanjak ke atas, dari kasubdin, kepala dinas, hingga bupati dan asisten gubernur, tidak hanya membuatnya dekat masyarakat bawah tetapi juga dekat dengan kalangan birokrat dari tingkat bawah hingga atas.

Selain faktor-faktor di atas, Achmad Diran juga dekat dengan kalangan wartawan dan awak media. Kalangan media menyebutnya sebagai pribadi yang *low profile* karena mudah bergaul dengan siapa saja termasuk dengan para awak media. Achmad Diran adalah pribadi yang murah senyum sehingga dalam komunikasi mudah mencair dan jauh dari ketegangan. Achmad Diran

menempatkan kalangan awak media sebagai mitra kerjanya yang setia dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik.

#### 8. Mendaftarkan Diri sebagai Calon Gubernur

Di akhir masa jabatannya sebagai wakil gubernur Kalteng periode kedua, pada 2015 menjelang pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah, Achmad Diran “terdorong” untuk ikut bertarung sebagai calon gubernur Kalteng dalam pilkada Kalteng 2015 dengan landasan pemikiran adanya aspirasi berbagai golongan masyarakat yang disampaikan kepadanya. Diran kemudian mendaftarkan diri di DPD PDIP Kalteng. Proses rekrutmen calon gubernur melalui DPD PDIP Kalteng diikuti oleh Achmad Diran setahap demi setahap hingga saatnya pengajuan dan pengumuman calon gubernur oleh PDIP Kalteng.

Namun ketika DPD PDIP Kalteng mengajukan nama-nama calon gubernur kepada DPP PDIP ternyata yang disetujui adalah Willy M. Yoseph sebagai calon gubernur dari PDIP dan nama Achmad Diran tidak tercantum. Dengan pertimbangan yang matang akhirnya Achmad Diran mengundurkan diri sebagai fungsionaris PDIP. Bahkan ia kemudian masuk sebagai tim pemenang pasangan calon Sugianto-Ismail (Sohib) pada pilkada Kalteng 2015. Terpilihnya pasangan calon Sugianto-Ismail sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 tidak lepas dari kiprah dan peran dari Achmad Diran.

Diran membantah bahwa ia mendukung salah satu pasangan calon di pilkada Kalteng tahun 2015 sebagai bentuk kekecewaan karena tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur. Diran menegaskan:

“Saya tidak kecewa karena tidak dicalonkan. Namun saya diajak oleh sponsor pasangan Sohib yaitu H. Rasyid seorang pengusaha di Kobar untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Sohib (Sugianto Sabran dan Habib Ismail)”.

Apa yang menjadi obsesi Achmad Diran ke depan. Menurut Achmad Diran dirinya ingin terus mengabdikan di Muhammadiyah. Tentu yang dimaksud Diran terus mengabdikan di Muhammadiyah tidak harus diartikan secara leterik karena Muhammadiyah juga hanya sebagai sarana untuk mengabdikan kepada umat. Intinya adalah bahwa Diran akan terus mengabdikan kepada umat dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Achmad Diran saat ini memang telah menjadi aset umat, aset persyarikatan Muhammadiyah dan aset bangsa. Achmad Diran juga adalah salah satu putra terbaik Kalteng meski ia tidak terlahir di Kalteng.

Harapan dan pesan Achmad Diran kepada gubernur dan wakil gubernur Kalteng terpilih pada pilkada Kalteng 2015 agar dapat menjalankan dan melanjutkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terdahulu yang sudah bagus dan semakin memperhatikan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan. Harapan dan pesan Achmad Diran kepada rakyat Kalteng untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kalteng di masa mendatang, masyarakat Kalteng agar bersatu padu mendukung kepemimpinan pasangan gubernur dan wakil gubernur Kalteng terpilih (Sugianto-Ismail) dengan tetap menjaga keutuhan NKRI, kesatuan dan persatuan bangsa.

Achmad Diran saat ini sebagai senior di jajaran politisi Kalimantan Tengah dan anggota tim sukses pasangan Sohib dalam pilkada 2015 tentu tidak melepas jalinan komunikasi dan kedekatannya dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2016-2021 (Sugianto Sabran dan Habib Ismail), sebagaimana yang ia tegaskan, “Tentu saya dapat memberikan nasihat-nasihat kepada gubernur dan wakil gubernur Kalteng terpilih yang baru terutama dalam mengambil kebijakan” .

Menurut hemat penulis, Achmad Diran adalah figur pemimpin yang dapat dicontoh oleh generasi muda di belakangnya. Ia memainkan peran yang bagus untuk pendidikan politik dan

demokrasi di kalangan pemuda. Ketika Achmad Diran mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Kalteng 2015 tahap demi tahap ia ikut prosedur pencalonan tersebut akan tetapi kenyataan Diran tidak dicalonkan oleh partai politik tersebut. Kenyataan ini tidak membuat Achmad Diran kecewa berat. Ia tetap bertekad ingin mengabdikan kepada masyarakat dengan cara yang lain.

Di sisi lain, Achmad Diran juga berperan dalam tim pemenangan pasangan Sugianto-Habib (Sohib) pada Pilgub Kalteng 2015. Kemudian dalam Muswil PAN Kalteng 2016 Achmad Diran terpilih sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Tengah. Achmad Diran juga tetap menjadi sesepuh dari Paguyuban Kulowargo Jowo (Pakuwojo) Kalimantan Tengah. Tentunya bagi Achmad Diran tidak ada tempat untuk berhenti mengabdikan kepada masyarakat. Ia akan terus mengabdikan kepada masyarakat melalui jalan dan jalur yang berbeda-beda.

## **B. Ade Supriyadi**

### **1. Biografi Singkat**

Ade Supriyadi, S.P., M.H. lahir di Sukabumi, 27 Agustus 1975. Ia menempuh pendidikan SD dan SMP di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Peternakan Pembangunan Muhammadiyah (SPPM) Palangka Raya. Setelah itu ia meneruskan ke program S1 di Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya (UPR). Kemudian studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Barwijaya Malang. Ade Supriyadi aktif di organisasi sejak menjadi pelajar yaitu di Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) sejak 1996, kemudian Pemuda Muhammadiyah (PM) Kalimantan Tengah. Semasa mahasiswa S1 ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya.

Ade Supriyadi aktif di organisasi sejak masa remaja. Ia aktif di Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) sejak 1996,

kemudian Pemuda Muhammadiyah (PM) Kalimantan Tengah. Semasa mahasiswa S1 ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya (1995-1999). Ia juga pernah aktif di DPD KNPI Kalteng dan KONI Kalteng. Kemudian di Era Reformasi sejak 1998 ia mulai aktif di Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) Kalimantan Tengah (1998-2000).

Aktivitasnya merambah tidak hanya di BM PAN tetapi ia kemudian dipercaya sebagai fungsionaris DPW Partai Amanat Nasional Kalimantan Tengah. Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan Tengah, Ade Supriyadi merintis karirnya sejak menjadi sekretaris (2000-2005), kemudian menjadi wakil ketua (2005-2010) hingga menjadi ketua terpilih Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Kalimantan Tengah dua periode (2005-2010 dan 2010-2015).

Dengan bekal ketrampilan, ilmu dan pengalaman yang ia miliki, Ade merasa mantap berkiprah dan berjuang melalui partai politik dan lembaga legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pada pemilihan legislatif Kalimantan Tengah tahun 2009, Ade mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah dan mendapatkan suara yang signifikan untuk menjadi seorang legislator. Ia terpilih sebagai anggota DPRD Kalimantan Tengah periode 2009-2014.

Ade ketika mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kalteng pada pemilu legislatif Kalteng tahun 2009 ia bertekad untuk sosialisasi hingga ke kecamatan-kecamatan dan beberapa desa prioritas dengan kemampuan dana menghadapi pemilu 2009 hanya sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) saja, namun, kata Ade, masyarakat memaklumi dirinya sebagai calon pemula.

Kemudian Ade kembali mencalonkan dirinya pada pemilu legislatif Kalteng tahun 2014 dan berhasil terpilih kembali sebagai

anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019. Di satu sisi Ade merasakan keberhasilan dirinya menjadi calon anggota DPRD Kalteng pada periode kedua ini karena posisinya sebagai ketua DPW PAN Kalteng dan sebagai caleg petahana, jaringan PAN yang ada sangat mendukung dirinya. Namun di sisi lain perjuangan untuk meraih suara masyarakat juga tidak mudah karena persaingan yang ketat. Menurut Ade, kemampuan dana dirinya menghadapi pemilu 2014 hanya sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hal ini tidak menyurutkan dirinya untuk mencalonkan diri di pemilu legislatif dan masyarakat konstituen pun memaklumi dirinya sebagai calon petahana.

Ade Supriyadi merupakan figur pemimpin dan politisi yang matang dalam berorganisasi. Ade karena aktifitasnya di dunia kepemudaan dan keolahragaan Kalimantan Tengah, membuat ia mudah dikenal dan dekat dengan para angkatan muda. Dengan pengalaman sebelumnya di organisasi pelajar dan kemahasiswaan, Ade tidak terlalu sulit untuk menggerakkan organisasi Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) Kalimantan Tengah yang merupakan sayap organisasi PAN Kalteng. Ketertarikan Ade pada dunia politik tidak lepas dari pengalamannya di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

## 2. Dikaderkan di Muhammadiyah

Ade, demikian panggilan akrabnya, mengaku mengenal persyarikatan Muhammadiyah dari guru al-Islam dan Ke-Muhammadiyahannya sewaktu ia belajar di SPPM Palangka Raya. Kemudian ia bergabung dalam kepengurusan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Kalimantan Tengah sekitar tahun 1996. Apa yang membuatnya tertarik masuk ke persyarikatan Muhammadiyah, menurut Ade, dirinya tertarik karena Muhammadiyah memberantas *taqlid*, *bid'ah* dan *khurafat* yang dulu dikenal dengan akronim TBC (*taqlid*, *bid'ah* dan *churafat*).

Ade mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dianggap berjasa dalam menumbuhkan dan membesarkan organisasi Muhammadiyah baik dalam skala daerah maupun nasional. Dalam skala nasional ia menyebut KH Ahmad Dahlan, Syafii Maarif dan M Amin Rais. Untuk skala daerah Kalteng seperti Darbi Zainullah, Dase Durasid, Rinco Norkim dan Muchtar.

Menurut Ade, persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan untuk menegakkan *amar makruf nahi munkar*. Menurutnya, program kerja Muhammadiyah saat ini setidaknya mencakup empat bidang yaitu (a) peningkatan kualitas cabang dan ranting, (b) peningkatan sistem gerakan, (c) peningkatan sumber daya manusia dan (d) pengembangan amal usaha.

Menurut penilaian Ade, keempat bidang program itu belum berjalan dengan baik. Meski menghadapi kendala serta dengan keterbatasan yang ada program kerja harus diupayakan agar terlaksana, sedangkan sumber pendanaan kegiatan Muhammadiyah adalah dari anggota, hasil amal usaha dan bantuan dari pemerintah.

Mengenai kaderisasi di perserikatan Muhammadiyah, menurut Ade, setidaknya ada pelatihan kaderisasi formal dan kader AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah), dan amal usaha Muhammadiyah. Ade sendiri sudah aktif di persyarikatan Muhammadiyah sejak bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah kemudian Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

### 3. Motivasi dan Latar Belakang

Mengenai latar belakang mengapa ia terjun ke arena politik, menurut Ade, dirinya memang asalnya hobi berorganisasi. Kemudian ia berpikir dengan hobi berorganisasi sekaligus mencari masa depan yang lebih baik serta bagaimana ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa. Untuk itu Ade pada awalnya aktif di Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) Kalimantan Tengah. Dari aktivitasnya di BM PAN Ade merasa mendapat

peluang untuk dicalonkan sebagai calon legislatif pada pemilihan legislatif Kalimantan Tengah.

Selain itu Ade merasa mendapat dukungan dari jaringan PAN yang ada di kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan. Begitu pula ketika ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kalteng tahun 2014 Ade merasa mendapat dukungan dari jaringan pengurus PAN dari tingkat kabupaten, kecamatan dan sejumlah kepala desa serta tokoh masyarakat di desa-desa.

Sebagai anggota DPRD Kalteng, dan duduk sebagai Ketua Komisi C, Ade terobsesi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai berhasil. Di samping itu ia bisa melihat dan berkunjung ke banyak daerah di tanah air. Suka duka dialami Ade ketika mengikuti pemilihan legislatif. Sukanya karena ada harapan menjadi wakil rakyat dan dukanya karena harus berusaha maksimal dengan tenaga dan biaya. Sedangkan suka duka sebagai anggota DPRD Kalteng di antaranya senang ketika berhasil memperjuangkan usulan masyarakat seperti bantuan rumah ibadah, dan lain-lain. Dukanya apabila masyarakat konstituen banyak yang minta bantuan dana namun kemampuan dirinya terbatas. Ketika ditanya bagaimana kalau dirinya tidak terpilih pada pemilu legislatif 2009 dan 2014, Ade menegaskan bahwa dirinya tidak perlu kecewa. Namun, menurutnya, hal itu akan dijadikan bahan introspeksi diri untuk perbaikan di masa berikutnya.

Selama memimpin DPW PAN Kalteng Ade merasa mendapat pengalaman yang berkesan di antaranya ketika konsolidasi ke daerah bisa makan hingga sebanyak 6 kali sehari yang disiapkan oleh konstituen dan pernah berhasil menyelenggarakan kegiatan besar dengan persiapan hanya sehari. Ade juga merasa sangat terkesan ketika ia dan rombongan berkunjung ke sebuah rumah sakit jiwa. Selain itu di awal-awal periode ia bisa berkunjung ke sejumlah daerah dan objek wisata Indonesia tanpa mengeluarkan biaya sendiri.

#### 4. Rekrutmen Politik dan Sistem Pemilu

Menurut Ade, kelebihan pemilihan legislatif di Era Reformasi apabila dibandingkan dengan masa Orde Baru adalah adanya sistem suara terbanyak dan multi partai. Begitu pun kelebihan pemilihan kepala daerah di Era Reformasi apabila dibandingkan dengan masa Orde baru adalah bahwa setiap orang bisa maju mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Sedangkan kelemahan yang ada dalam pemilihan legislatif di Era Reformasi ini, menurut Ade bahwa orang penggiat organisasi ataupun partai belum ada jaminan bisa duduk dan terpilih sebagai anggota dewan, sementara orang yang “beruang” mempunyai kesempatan besar untuk terpilih sebagai anggota dewan.

Ade menilai bahwa rakyat Kalteng pada umumnya sudah matang dan dewasa dalam persoalan politik khususnya ketika menghadapi pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah. Menurutnya, masyarakat Kalteng sudah mulai pintar menentukan pilihannya dan pintar pula memanfaatkan keadaan. Ia menengarai bahwa dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilukada di Kalteng masih terjadi *money politic* dan kecurangan lainnya. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

Di sisi lain selama Era Reformasi ini, menurut Ade, dirasakan terlalu banyak partai politik. Ade setuju jika jumlah partai politik tidak terlalu banyak namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah idealnya. Dalam hal ini Ade berkomentar: “Biarkan partai politik berguguran dan terjadi seleksi secara alami”.

Untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilukada di Kalteng pada masa mendatang, Ade menyarankan agar kegiatan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilukada agar lebih matang persiapannya. Di samping itu, menurut Ade, pengawasan dan pemantauannya perlu diperkuat dengan melibatkan lembaga pengawasan atau pemantau yang kredibel.

## 5. Pendukung Pasangan Sohib (Sugianto Sabran dan Habib Ismail)

Mengenai keberhasilan pasangan Sohib (Sugianto-Ismail) memenangi pilkada Kalteng 2015, menurut Ade, karena faktor pasangan calon yang hanya berjumlah 2 (dua) pasangan calon. Selain itu, menurutnya, karena dukungan penduduk muslim Kalteng yang berjumlah 74% serta adanya kesiapan pendanaan. Mengenai kesiapan dana tidak bisa dipungkiri karena pasangan Sohib sendiri didukung oleh pamannya, H. Rasyid yang tidak lain adalah seorang pengusaha sukses di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ade tidak setuju jika ada yang berpendapat bahwa pilkada Kalteng 2015 adalah pertarungan dua partai besar (maksudnya paslon Sugianto-Ismail yang didukung Partai Golkar dan paslon Willy-Wahyudi yang didukung PDIP). Hal ini cukup beralasan karena dalam Pilgub Kalteng 2015 pasangan cagub dan cawagub dipilih langsung oleh rakyat tidak dipilih oleh wakil rakyat di DPRD. Di samping itu dalam beberapa survei diketahui bahwa pemilih dalam pilkada belum tentu sama dengan pemilih ketika pemilu legislatif.

Ketika pencalonan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Kalteng tahun 2015, dan salah satunya didiskualifikasi karena dianggap cacat hukum, PAN sebagai salah satu parpol pendukung pasangan calon Sugianto-Ismail merasa diuntungkan dengan kondisi tersebut. Ade tidak menampik terhadap pernyataan tersebut.

Kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada pilkada Kalteng 2015, Ade menyampaikan harapan agar pasangan tersebut dapat merealisasikan visi dan misinya sesuai dengan janji kampanyenya. Untuk itu Ade berharap kepada masyarakat Kalteng hendaknya mendukung kepemimpinan Sohib (Sugianto-Ismail) dengan memberikan saran dan masukan kepada Sohib dan memberikan koreksi atas kinerja yang dinilai kurang baik.

## 6. Penyalur Aspirasi Masyarakat

Ade merasa puas dan bahagia apabila dapat menyampaikan aspirasi masyarakat melalui aktivitasnya sebagai anggota badan legislatif. Di samping itu, ia mengakui bahwa DPRD memang tempatnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah juga harus banyak mendengarkan segala keluh kesah yang disampaikan oleh masyarakat.

Selain itu ia juga harus banyak berinteraksi dengan warga masyarakat di pelosok-pelosok di Kalimantan Tengah untuk menyerap secara langsung apa yang menjadi keinginan mereka. Sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah, Ade merasa berkewajiban menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat itu sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ia miliki.

Sebagai anggota badan legislatif Ade juga berkewajiban untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan oleh Pemprov Kalteng sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Kalteng. Menurutnya, kritik secara proporsional perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi sehingga pemerintah provinsi dapat memperbaiki segi-segi yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Ade merasa bahagia apabila dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui DPRD Kalteng. Tidak jarang Ade menerima pengaduan dan keluh kesah masyarakat yang disampaikan kepadanya. Ade bersama teman-teman sesama wakil rakyat lainnya akan memproses setiap pengaduan dan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Kalteng. Bahkan Ade tidak harus menunggu pengaduan yang disampaikan langsung ke dewan apabila ia sendiri menemukan atau menerima pengaduan yang disampaikan langsung kepada dirinya atau melalui media massa.

## 7. Agama dan Politik

Menurut Ade, agama secara hakiki berhubungan dengan politik karena agama dapat mempengaruhi hukum. Agama juga dapat memberikan legitimasi pada kekuatan politik. Menurut Ade, demokrasi hakikatnya adalah kekuasaan yang melibatkan rakyat secara langsung. Ade mengakui bahwa demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara Barat. Hal itu disebabkan adanya perbedaan ideologi atau dasar negara masing-masing.

Menurut Ade bahwa nilai-nilai demokrasi tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam. Menurutnya terdapat perbedaan antara nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Misalnya, prinsip demokrasi kekuasaan di tangan rakyat sementara dalam Islam kekuasaan mutlak milik Allah, manusia hanya menjabarkan dan melaksanakannya. Ade juga tidak setuju dengan paham sekuler yang mengesampingkan agama dalam negara, karena agama dan negara keduanya saling berhubungan dan dapat saling mempengaruhi. Ade setuju bahwa agama merupakan bagian dari negara. Ade setuju adanya hubungan yang erat antara agama dan negara. Menurut Ade, dengan kebijakan negara maka agama tersebut akan menjadi maju dan besar.

Menurut Ade, prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip Islam sejalan. Karena, menurutnya, kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan di depan rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Dalam demokrasi, sebuah kekuasaan atau kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat melalui mekanisme yang telah disepakati.

Menurut Ade, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara sejalan dengan nilai-nilai Islam. Karena, menurutnya, Pancasila berakar dari sejarah, agama, adab atau budaya serta tata negara yang telah lama berkembang sejak zaman kerajaan. Apabila ada

yang mempertentangkan antara nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam maka menurut Ade, perlu diberikan pemahaman secara mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara, bukan sebuah kesyirikan.

Begitu pula apabila ada yang tidak setuju Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maka menurut Ade, warga negara Indonesia itu harus diberi pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara yang diamalkan sesuai ajaran agamanya masing-masing.

Pandangan Ade terhadap hubungan agama dan politik menempatkan agama dan politik sebagai dua ranah yang saling mempengaruhi. Agama dapat mempengaruhi kebijakan negara dan kebijakan negara akan mempengaruhi perkembangan agama. Menurut hemat penulis, pendapat ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa agama dan negara adalah dua institusi yang dapat saling mempengaruhi. Negara akan menjadi kuat apabila disokong oleh agama begitu pula agama akan berkembang apabila didukung oleh negara.

Selanjutnya mengenai hubungan agama dan Pancasila, menurut Ade bahwa ideologi Pancasila lahir dari akar agama, adab, budaya dan tata negara sejak zaman kerajaan karena itu ideologi Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama. Pernyataan ini menepis anggapan bahwa ideologi Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebaliknya menurut Ade bahwa Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang diamalkan menurut ajaran agama masing-masing. Menurut Ade bahwa meyakini Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah sebuah kesyirikan.

## 8. HAM, Kesenjangan Gender, dan Terorisme

Sedangkan mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Islam menurut Ade, seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan seperti hak hidup, kebebasan beragama, bekerja, pemilikan, keamanan,

berkeluarga, keadilan dan persamaan, dan lain-lain. Mengenai HAM, seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara untuk melindungi terkait dengan nyawa, harta dan kehormatan

Ade menilai bahwa HAM versi Barat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ajaran Islam dapat menerima HAM karena pada dasarnya HAM telah ada dalam ajaran Islam jauh sebelum deklarasi HAM oleh Barat. Di antara prinsip HAM menurut Islam adalah bahwa pada dasarnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah taqwanya (kualitas iman dan amal salihnya, pen.). Menurut Ade, Islam tidak menerima konsep kesetaraan jender yang ditawarkan Barat, Karena Islam mengharamkan perempuan menjadi pemimpin negara. Menurutnya, Islam mengutamakan laki-laki dalam memilih pemimpin di ranah publik

Ade lebih melihat hubungan hak asasi manusia dengan negara karena menurutnya, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap hak asasi manusia warganya. HAM di dunia Islam sudah ada sebelum dunia Barat mendeklarasikan HAM. Islam memandang semua manusia sama di hadapan Allah swt kecuali yang membedakannya adalah kualitas ketaqwaannya.

Begitu pula dengan kesetaraan jender, menurut Ade, Islam tidak menerima konsep kesetaraan jender yang ditawarkan oleh Barat karena Islam mengharamkan perempuan menjadi kepala negara. Ade menegaskan bahwa Islam mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin di ranah publik. Pendapat ini menurut hemat penulis, dipengaruhi oleh pandangan ulama klasik yang masih diselimuti budaya patrialkal (mengutamakan laki-laki). Pandangan seperti ini dikategorikan bias jender. Namun secara sosiologis, dalam banyak kasus orang lebih suka memilih laki-laki sebagai pemimpin di ranah publik.

Mengenai terorisme, menurut Ade, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan yang menjadi

sebuah ancaman bagi negara, harus diberantas. Terorisme adalah aksi kekerasan yang merugikan orang lain maka hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Ade menegaskan bahwa tindakan terorisme bertentangan dengan misi Islam *rahmatan lil 'alamin* karena Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia yang ada di muka bumi.

#### 9. Demokrasi, Kebebasan Berpendapat, dan Reformasi

Menurut Ade, demokrasi adalah sebuah keputusan yang diambil bersama-sama atas aturan yang dibuat bersama pula. Ade setuju bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi ala Barat. Menurut Ade, demokrasi di Indonesia berdasarkan agama, sementara di Barat demokrasi tidak berdasarkan agama.

Cara yang baik untuk menyalurkan pendapat menurut Ade, yaitu menyampaikan pendapat secara santun dan tidak melanggar aturan dan perundang-undangan. Penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh merusak fasilitas umum karena fasilitas umum milik bersama yang harus dijaga keamanannya. Kebebasan pers, menurut Ade, harus ada perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan publikasi tanpa ada campur tangan atau sensor dari pemerintah. Ade setuju bahwa kontrol sosial terhadap pemerintah yang dilakukan oleh pers atau media massa di era reformasi ini sering “kebablasan”. Sementara itu pers yang “mengkritik” pemerintah, menurutnya tidak perlu dibredel, tetapi perlu diarahkan agar kritikan yang disampaikan tersebut merupakan sebuah kritikan yang bersifat membangun.

Ade setuju bahwa reformasi 1998 telah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan sosial politik di Indonesia. Menurut Ade, setiap warga negara mempunyai hak untuk dipimpin dan memimpin. Ade juga setuju bahwa di era reformasi ini pemerintahan Indonesia dijalankan secara lebih demokratis apabila dibandingkan dengan di masa Orde Baru.

Ade juga setuju bahwa reformasi yang telah berjalan 18 tahun ini telah membawa perubahan di segala lini kehidupan masyarakat. Menurutnya, pembangunan di era reformasi ini lebih menyentuh kepada kepentingan masyarakat.

Dalam pandangan Ade, reformasi di birokrasi belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pejabat birokrasi yang bermental koruptor. Demikian pula dengan reformasi di bidang hukum. Menurut Ade, reformasi di bidang hukum belum berjalan dengan baik karena masih banyak aturan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan aturan hukum lainnya. Begitu pula dengan reformasi di bidang ekonomi, menurut Ade, belum berjalan dengan baik karena Indonesia masih belum mampu keluar dari krisis global dan masyarakatnya belum sejahtera.

Dalam konteks kehidupan sosial budaya dan pendidikan, menurut Ade, reformasi belum berjalan dengan baik karena masih banyak sikap masyarakat yang mengarah kepada perpecahan dan disintegrasi bangsa.

Patut digaris bawahi bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi ala Barat. Menurut Ade bahwa demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan agama sedangkan demokrasi yang dijalankan di Barat tidak berdasarkan agama. Pandangan Ade ini menegaskan kembali bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia bukan sistem demokrasi sekuler dan bukan pula ala teokrasi. Demokrasi Pancasila dalam implementasinya memang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dijamin undang-undang. Namun kebebasan berpendapat dan kebebasan pers itu harus dibarengi dengan tanggungjawab sosial untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Pers sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah hendaknya dapat menyampaikan kritik yang membangun.

## 10. Rekrutmen Politik dan Sistem Pemilu

Menurut Ade, sistem politik, belum berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi, belum berjalan dengan baik karena elit politik masih banyak yang adu kekuatan untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang kurang elegan. Namun, Ade setuju bahwa otonomi daerah di era reformasi ini membawa perubahan positif bagi rakyat di daerah karena daerah diberikan kewenangan yang cukup memadai untuk mengelola daerahnya agar lebih maju dan berkembang.

Sementara itu, penyelenggaraan pemilu legislatif di era reformasi (1999, 2004, 2009, 2014), menurut Ade, masih mencari bentuk, hal ini terlihat dengan adanya aturan yang selalu berubah-ubah. Dalam pandangan Ade, pemilihan umum khususnya pemilu presiden dilaksanakan atas kepentingan elit politik nasional. Menurut Ade, secara umum asas *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dalam pemilihan umum sudah dapat dilaksanakan.

Penyelenggaraan pemilukada Kalteng selama era reformasi ini, menurut Ade, sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi atau peraturan tentang pemilu, menurut Ade, sudah memadai namun masih perlu adanya penyempurnaan. Ade menekankan bagaimana peran partai politik di Era Reformasi dalam menentukan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Menurut Ade, kewenangan partai politik di daerah dibatasi hanya berwenang menentukan calon bupati/walikota, sementara calon gubernur hanya sebatas pengusulan kepada dewan pimpinan pusat (DPP) partai. Yang memilih dan mementukan adalah DPP. Dengan demikian, kewenangan DPP sangat besar.

Berkenaan dengan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang sangat besar dalam menentukan calon gubernur, menurut Ade, sebaiknya kewenangan menentukan calon gubernur

itu diberikan kepada daerah sehingga dewan pimpinan wilayah (DPW) partai dapat berperan lebih besar dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam dalam pemilukada di Kalteng, menurut Ade, antara lain adalah dana penyelenggaraan Pemilu perlu dianggarkan secara bertahap setiap tahun (dicihil). Pelaksananya secara transparan dengan melibatkan pengawas/pemantau dari lembaga-lembaga yang independen dan terpercaya, serta dilaksanakan serentak dengan daerah lainya untuk hemat biaya dan mengurangi eksodus pemilih.

Untuk pemilu legislatif menurut Ade, penyelenggaraannya harus lebih transparan khususnya dalam verifikasi berkas dan persyaratan caleg. Sedangkan pemilu presiden, karena pelaksanaan pilpres bersamaan dengan pileg maka menurut Ade, perbaikanya juga sama dengan perbaikan pilkada. Kerawanan yang bisa muncul dalam pemilukada, pemilu legislatif dan pilpres, yang perlu diantisipasi menurut Ade adalah dalam hal suara dan adanya kampanye hitam (*black campaign*).

Ade setuju apabila jumlah partai politik disederhanakan saja. Namun penyederhanaan jumlah parpol tidak harus seperti di zaman Orde Baru. Menurut Ade, biarlah jumlah partai politik politik yang ada sekarang ini akan berkurang dan terseleksi secara alamiah.

## **C. Muhammad Riban Satia**

### **1. Biografi Singkat**

Muhammad Riban Satia lahir pada 5 Maret 1963 di Desa Tangkahun Kecamatan Banama Tingang (waktu itu Tangkahun masuk Kabupaten Kapuas sedangkan sekarang masuk Kabupaten Pulang Pisau), Kalimantan Tengah. Pendidikan dasar ditempuhnya di desa kelahirannya di SDN Tangkahun. Kemudian ia melanjutkan ke SMPN Tewah Kabupaten Kapuas (saat itu, sekarang Tewah masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas). Setelah itu ia menerus-

kan pendidikan ke SMA Santo Petrus Palangka Raya. Ia kemudian meneruskan studi ke Program D-3 Pertanian Universitas Palangka Raya (UPR). Kemudian melanjutkan studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Studi lanjut S2 ia tempuh di Program Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta. Kemudian pada Februari 2016, ia menyelesaikan studinya di Program Doktor FISIP UGM.

Riban merupakan sosok yang aktif di organisasi sejak menjadi pelajar hingga ia menjadi mahasiswa dan juga di organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya. Dalam struktur organisasi Korps Alumni HMI (KAHMI) Kalimantan Tengah ia duduk sebagai ketua dewan pakar dua periode yaitu periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Dalam kegiatan kekinisan ia pernah mengikuti pendidikan Administrasi Umum (ADUM), Kursus Pimpimpinan III, dan Kursus Pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Suspim Dagri). Hobi atau kegemarannya adalah olahraga. Belakangan Riban Satia juga gemar berolahraga naik sepeda. Di sela-sela kesibukannya sebagai walikota terutama di hari Sabtu dan Ahad ia sempatkan untuk bersepeda keliling kota ditemani para kolega sekaligus melihat keadaan kota dan masyarakatnya.

## 2. Dari Aktifis Muhammadiyah ke Politik Praktis

Muhammad Riban Satia mengenal Muhammadiyah dari masyarakat sejak 1974. Namun ia mulai aktif berkiprah di persyarikatan Muhammadiyah sejak ia masuk menjadi mahasiswa di FISIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada 1987. Di saat kedudukannya sebagai PNS di Kantor Gubernur Kalteng ia juga menyempatkan diri untuk mengajar dan menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Selain itu di dalam struktur

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah periode 2010-2015, M Riban Satia tercatat sebagai ketua majelis hikmah dan kebijakan.

Riban Satia sejak awal mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah baik di level nasional maupun lokal. Di level nasional seperti KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Buya Syafii Maarif, M Amin Rais, dan di level daerah seperti K.H. Amberi Lihi (alm.), dan H. Dase Durasid (alm.). Menurut Riban Satia, Muhammadiyah adalah persyarikatan yang bertujuan amar ma'ruf dan nahi munkar bergerak dengan amal usaha terutama di bidang pendidikan dan kesehatan

Bergulirnya Era Reformasi sejak 1998 memberikan peluang dan kesempatan bagi Riban Satia untuk berkiprah di dunia politik praktis. Di samping itu memperhatikan dorongan dari berbagai pihak agar ia terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon walikota pada Pilkada Palangka Raya tahun 2008. Riban berpasangan dengan Maryono yang dikenal dengan akronim RINO. Hasil kakulasi KPU Kota Palangka Raya menyatakan pasangan RINO mendapat suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan lainnya pada pilkot 2008. Karena itu Riban-Maryono ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya sebagai pasangan terpilih walikota dan wakil walikota Palangka Raya periode 2008-2013.

Setelah sukses menjalankan masa kepemimpinannya pada periode 2008-2013, M Riban Satia kembali mencalonkan diri sebagai calon walikota pada Pilkada Palangka Raya tahun 2013. Pada pilkada 2013 ini ia mengganti pasangannya dengan Subagio Mofit Saptono yang berlatar belakang akademisi sebagai dosen di Universitas Palangka Raya (UPR). Pasangan Riban-Mofit (Rimo) mendapat suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan lain sehingga mereka berdua ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya

sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2013-2018.

Muhammad Riban Satia merupakan kader Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi Walikota Palangka Raya selama dua periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018. Perlu ditambahkan bahwa Maryono sebagai wakil walikota periode 2008-2013 maupun Mofit Saptono Subagio sebagai wakil walikota periode 2013-2018 keduanya tercatat sebagai kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

### 3. Latar Belakang dan Motivasi

Riban merupakan sosok yang aktif di organisasi sejak menjadi pelajar hingga ia menjadi mahasiswa dan juga di organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya.

Riban Satia sejak awal mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah baik di level nasional maupun lokal. Di level nasional seperti KH Ahmad Dahlan, Buya Syafii Maarif, M. Amin Rais, dan di level daerah seperti KH Amberi Lihi (alm.) dan H. Dase Durasid (alm.). Menurut Riban Satia, Muhammadiyah adalah persyarikatan yang bertujuan amar ma'ruf nahi munkar bergerak dengan amal usaha terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Riban, Muhammadiyah sebagai organisasi atau persyarikatan, melaksanakan program-program kerjanya berdasarkan hasil musyawarah wilayah dan daerah. Semua program tersebut menurutnya akan terlaksana dengan baik dan relatif tidak ada yang tidak terlaksana, hanya mungkin pencapaian program yang tidak maksimal. Sedangkan sumber pendanaan untuk melaksanakan program-program kerjanya berasal dari dana sumbangan warga Muhammadiyah sendiri, dari amal usaha dan dana bantuan dari donator dan pemerintah. Selain itu, menurut Riban, Muhammadiyah memiliki sistem kaderisasi yang baik

dalam bentuk latihan kader, pendidikan formal, kepengurusan organisasi dan amal usaha lainnya.

Menurut Riban, salah satu faktor yang mendorong dirinya untuk terjun ke arena politik dan bersedia dicalonkan sebagai walikota dalam pemilihan kepala daerah kota Palangka Raya karena perubahan situasi dari Orde Baru ke Era Reformasi. Dalam hal ini Riban menegaskan:

“Selama ini atau sebelum otonomi daerah (pilkada tidak langsung) atau melalui DPRD, peran partai politik atau anggota DPRD sangat dominan. Oleh sebab itu peluang bagi non kader partai kecil. Era otonomi daerah peluang untuk berkompetisi terbuka”

Oleh sebab itu dengan kondisi yang ada dan didorong untuk mampu melakukan perubahan kepada masyarakat, Riban mem-beranikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota berpasangan dengan Maryono sebagai calon wakil walikota pada pilkada Kota Palangka Raya tahun 2008.

Riban mempunyai obsesi sebagai Walikota Palangka Raya yakni ia ingin mengabdikan dan memberikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang harmonis antar dan antar umat beragama dengan pemerintah dalam Huma Betang.

Riban sendiri pada awalnya meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan bergelut dalam kehidupan birokrasi sejak 1 April 1986. Sebagai abdi negara sejak awal Riban dikenal dekat dengan masyarakat bawah. Riban rajin mengamati kehidupan masyarakat “kecil” yang ada di pelosok-pelosok. Tidak jarang ia memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan yang ia miliki.

Terbukanya kran demokrasi di Era Reformasi memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siapa pun untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Dari sinilah Riban melihat bahwa

kesempatan bagi dirinya untuk berkiprah lebih jauh, berbakti dan mengabdikan di tengah masyarakat. Selain itu adanya dorongan dan nasihat dari tokoh-tokoh masyarakat agar dirinya terjun dalam pemilihan kepala daerah sebagai calon walikota Palangka Raya.

Adanya dorongan dan harapan dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut membuat Riban merasa tertantang dan lebih percaya diri untuk memenuhi harapan tersebut. Maka dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa dan bertawakkal kepada-Nya, Riban menyatakan bersedia untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Walikota Palangka Raya berpasangan dengan Maryono sebagai calon Wakil Walikota Palangka Raya pada Pilkada Kota Palangka Raya tahun 2008.

#### 4. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

Secara simpel Riban mengemukakan pengertian politik bahwa politik itu pada hakikatnya adalah bagaimana memimpin dan menyejahterakan masyarakat dan kekuasaan atau jabatan itu adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat dan lebih-lebih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berbicara mengenai hakikat demokrasi dan hubungannya dengan Islam, menurut Riban, demokrasi pada hakikatnya adalah kebersamaan dalam hak individu dan sikap memberikan kesempatan kepada orang lain. Ia mengakui bahwa demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktikkan di negara-negara Barat. Riban menggaris bawahi bahwa perbedaan itu adalah dalam prosesnya di mana di negara-negara yang sudah maju, tidak terdengar ada *money politic* (politik uang).

Berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi apakah sejalan dengan Islam atau tidak, menurut Riban ada yang sejalan dan ada pula yang tidak sejalan. Ia menyebutkan praktik demokrasi yang tidak sejalan dengan Islam seperti *money politic* (politik uang) dan intimidasi. Demokrasi ditandai pula dengan adanya kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat. Kemerdekaan untuk menyampai-

kan pendapat itu misalnya penyampaian pendapat secara tertulis dan melalui forum-forum pertemuan, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan mengemukakan pendapat dengan cara merusak fasilitas umum karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sisi lain dari demokrasi adalah kebebasan pers. Menurut Riban, kebebasan perlu dikontrol atau dikendalikan. Kontrol pers terhadap pemerintah juga diperlukan. Apabila ada pers atau media massa yang “kebablasan” dalam menggunakan kebebasan yang dimilikinya maka hal itu cukup mengganggu bagi birokrasi pemerintahan. Namun, apabila ada pers yang kebablasan dalam melakukan kritik terhadap pemerintah maka keberadaan pers tersebut tidak perlu dibredel seperti di zaman Orde Baru akan tetapi perlu dilakukan komunikasi.

Salah satu ciri dari kehidupan demokrasi adalah adanya pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah dan kepala negara. Menurut UU sistem politik bahwa pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif harus diselenggarakan secara luber dan jurdil (langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil). Pemilu tersebut, menurut Riban, sudah memenuhi norma demokrasi namun masih perlu disempurnakan. Ia menilai bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif selama era reformasi (1999, 2004, 2009, 2014) sudah berjalan dengan baik karena pemilihan langsung pilkada, sedangkan untuk legislatif dari segi kualitas masih belum sempurna. Begitu pula dengan pemilihan presiden di Era Reformasi (1999, 2005, 2010 dan 2015), menurut Riban, sudah berjalan dengan baik.

Riban menilai bahwa pemilihan legislatif dan eksekutif secara nasional di Era Reformasi telah berjalan dengan baik, berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah ia menilai masih banyak kelemahan dan kekurangan seperti adanya intimidasi dan politik uang. Menurut

Riban, peraturan atau regulasi mengenai pemilu masih belum memadai. Untuk perbaikan pilkada di Kalteng ke depan, menurutnya, harus ada pengawasan yang sungguh-sungguh dari aparat dan parpol di setiap kelurahan atau desa dan di setiap TPS (tempat pemungutan suara).

Begitu pula dengan penyelenggaraan pemilu legislatif bahwa calon anggota legislatif harus diseleksi dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai patner pemerintah. Kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu baik eksekutif maupun legislatif, menurut Riban adalah perihal penentuan daftar pemilih tetap dan undangan pemilih tambahan serta pemilih yang pindah alamat. Peraturan atau Undang-Undang tentang Pilkada langsung menurut Ribah sudah memadai.

#### 5. HAM, Kesetaraan Jender, dan Terorisme

Berbicara mengenai hak asasi manusia, Riban memulai dengan ungkapan bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamiin. Menanggapi konsep hak asasi manusia (HAM) yang ditawarkan oleh Barat, menurut Riban harus ada pemilahan atau perlu seleksi dan dipilah-pilah, mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang bertentangan dengan ajaran Islam. Riban mencontohkan adanya konsep HAM yang ditawarkan oleh Barat dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti perkawinan sejenis, penggunaan teknologi untuk memperbaiki wajah, dan sebagainya.

Menurut Riban, konsep kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan dalam penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi umat. Begitu pula dengan konsep kesetaraan jender yang ditawarkan oleh Barat tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena ada prinsip-prinsip kesetaraan jender yang bertentangan ajaran Islam seperti perbedaan status laki-laki dan perempuan sebagai imam dalam salat berjamaah, status laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin pada jabatan-jabatan publik dan

status laki-laki dan perempuan pada posisi tertentu yang dapat merusak peran dalam keluarga atau rumah tangga, dan lain-lain.

Berkenaan dengan konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam, menurut Riban, tetap mengedepankan laki-laki sebagai imam atau pemimpin tetapi dalam jabatan tertentu di pemerintahan dan partai politik, keabsahan perempuan sebagai pemimpin dapat diterima. Riban tidak membenarkan apabila dikatakan bahwa Islam mengutamakan laki-laki dalam memilih pemimpin di ranah publik.

Mengenai masalah terorisme, menurut Riban, dalam Islam jelas sangat menentang kekerasan. Maksudnya Islam menentang adanya terorisme. Konsep Islam rahmatan lil ‘alamiin, menurut Riban, berarti Islam memberikan rasa aman dan tentram bagi semua makhluk di bumi.

## 6. Reformasi dan Perubahan Sosial Politik

Riban setuju bahwa Reformasi 1998 telah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan sosial politik di Indonesia. Namun, menurutnya, perubahan yang terjadi tidak terkendali dengan terencana sehingga membawa tindakan kekerasan dan arogan. Riban juga setuju bahwa di Era Reformasi ini pemerintahan Indonesia dijalankan secara lebih demokratis apabila dibandingkan dengan di masa Orde Baru dengan alasan lebih terbuka. Namun ia menyayangkan bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah itu masih ada praktik *money politic* (politik uang).

Riban juga setuju bahwa reformasi yang telah berjalan selama 18 tahun ini telah membawa perubahan di segala lini kehidupan masyarakat. Namun ia menyayangkan Era Reformasi ini kadang-kadang digunakan oleh beberapa pihak kepada kebebasan yang bersifat negatif. Ia menilai bahwa birokrasi di era reformasi ini belum berjalan dengan baik disebabkan aparatur pemerintahan yang belum siap karena mental pragmatis dan berorientasi kepada uang.

Menurut Riban, reformasi di bidang hukum belum berjalan dengan baik karena masih ada intervensi dari penguasa dalam persoalan hukum dan berorientasi pada uang. Begitu pula reformasi di bidang ekonomi, menurut Riban, belum berjalan dengan baik disebabkan ekonomi masih dikuasai oleh penguasa dan sindikat pemodal luar. Sedangkan reformasi di bidang sosial budaya dan pendidikan juga setali tiga uang karena kebijakan pemerintah yang mudah berganti-ganti.

## 7. Rekrutmen Politik dan Sistem Pemilu

Berbicara mengenai sistem politik sekarang, menurut Riban, sebagian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita reformasi 1998. Namun, sebagian lagi belum berjalan dengan baik. Sistem politik yang sejalan dengan cita-cita reformasi 1998 misalnya masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya walaupun masih dipengaruhi oleh sikap pragmatis. Sedangkan sistem politik yang belum berjalan dengan baik karena jumlah partai politik terlalu banyak.

Mengenai otonomi daerah, menurut Riban, bahwa otonomi daerah di era reformasi ini membawa perubahan positif bagi rakyat di daerah karena perubahan dalam pengelolaan pelayanan akan tetapi dari sikap mental masyarakat banyak mengarah kepada kekerasan yang cenderung kepada hal-hal negatif. Ia tidak setuju apabila dikatakan bahwa otonomi daerah di era reformasi ini membawa dampak negative bagi pemerintah daerah. Namun, ia merasakan adanya kesan bahwa peran dekonsentrasi agak terganggu akibat otonomi daerah yang kurang koordinasi dan banyak muatan politik praktis.

Berbicara mengenai hakikat demokrasi dan hubungannya dengan Islam, menurut Riban, demokrasi pada hakikatnya adalah kebersamaan dalam hak individu dan sikap memberikan kesempatan kepada orang lain. Ia mengakui bahwa demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang

dipraktikkan di negara-negara Barat. Riban menggaris bawahi bahwa perbedaan itu adalah dalam prosesnya di mana di negara-negara yang sudah maju, tidak terdengar ada *money politic* (politik uang).

Berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi apakah sejalan dengan Islam atau tidak, menurut Riban ada yang sejalan dan ada pula yang tidak sejalan. Ia menyebutkan praktik demokrasi yang tidak sejalan dengan Islam seperti *money politic* (politik uang) dan intimidasi. Demokrasi ditandai pula dengan adanya kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat. Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat itu misalnya penyampaian pendapat secara tertulis dan melalui forum-forum pertemuan, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan mengemukakan pendapat dengan cara merusak fasilitas umum karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sisi lain dari demokrasi adalah kebebasan pers. Menurut Riban, kebebasan perlu dikontrol atau dikendalikan. Kontrol pers terhadap pemerintah juga diperlukan. Apabila ada pers atau media massa yang “kebablasan” dalam menggunakan kebebasan yang dimilikinya maka hal itu cukup mengganggu bagi birokrasi pemerintahan. Namun, apabila ada pers yang kebablasan dalam melakukan kritik terhadap pemerintah maka keberadaan pers tersebut tidak perlu dibredel seperti di zaman Orde Baru akan tetapi perlu dilakukan komunikasi.

Salah satu ciri dari kehidupan demokrasi adalah adanya pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah dan kepala negara. Menurut UU sistem politik bahwa pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif harus diselenggarakan secara *luber dan jurdil* (langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil). Pemilu tersebut, menurut Riban, sudah memenuhi norma demokrasi namun masih perlu disempurnakan. Ia menilai bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif selama era reformasi

(1999, 2004, 2009, 2014) sudah berjalan dengan baik karena pemilihan langsung pilkada, sedangkan untuk legislatif dari segi kualitas masih belum sempurna. Begitu pula dengan pemilihan presiden di Era Reformasi (1999, 2005, 2010 dan 2015), menurut Riban, sudah berjalan dengan baik.

Riban menilai bahwa pemilihan legislatif dan eksekutif secara nasional di Era Reformasi telah berjalan dengan baik, berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah ia menilai masih banyak kelemahan dan kekurangan seperti adanya intimidasi dan politik uang. Menurut Riban, peraturan atau regulasi mengenai pemilu masih belum memadai. Untuk perbaikan pilkada di Kalteng ke depan, menurutnya, harus ada pengawasan yang sungguh-sungguh dari aparat dan parpol di setiap kelurahan atau desa dan di setiap TPS (tempat pemungutan suara).

Begitu pun dengan penyelenggaraan pemilu legislatif bahwa calon anggota legislatif harus diseleksi dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai patner pemerintah. Kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu baik eksekutif maupun legislatif, menurut Riban adalah perihal penentuan daftar pemilih tetap dan undangan pemilih tambahan serta pemilih yang pindah alamat. Peraturan atau Undang-Undang tentang Pilkada langsung menurut Ribah sudah memadai.

#### 8. Pendekatan kepada Masyarakat Bawah

Dengan persaingan yang ketat dari calon pasangan lainnya dalam Pilkada Kota Palangka Raya tahun 2008, pasangan calon Muhammad Riban Satia dan Maryono dengan akronim “RINO” terjun ke pelosok-pelosok kota untuk menyambangi dan meraih simpati warga kota. Dengan kerja keras paslon RINO dan tim pendukungnya akhirnya pasangan calon RINO dinyatakan oleh KPU Kota Palangka Raya dalam pesta demokrasi tersebut sebagai

peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2008-2013.

Atas keberhasilan Riban-Maryono memimpin Kota Palangka Raya membuat Riban merasa lebih bertambah pangalaman dan kembali mencalonkan diri sebagai calon walikota pada pemilihan kepala daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2013. Namun kali ini ia berpasangan dengan Mofit Saptono Subagio yang merupakan akademisi di Universitas Palangka Raya (UPR). Riban kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Palangka Raya yang mengantarkan pasangan Riban-Mofit untuk memimpin Kota yang berjuluk “kota pasir” ini selama periode 2013-2018.

Menurut Riban, faktor pendukung pembangunan di Kota Palangka Raya adalah (1) luas wilayah, (2) potensi lahan dan kawasan hutan, (3) Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, dan (4) posisi Palangka Raya secara geografis berada di poros Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan faktor penghambat dalam pembangunan di Kota Palangka Raya adalah (1) masyarakat transisi dari tradisional ke modernisasi, dan (2) luas wilayah dan jumlah penduduk yang masih sedikit. Kelebihan Kota Palangka Raya apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia adalah (1) Kota Palangka Raya dapat ditata dengan baik karena dibangun setelah kemerdekaan dan (2) kehidupan masyarakatnya yang harmonis walaupun penonjolan identitas kearifan lokal lebih dominan.

Dalam pengamatan Riban bahwa masyarakat Kota Palangka Raya memiliki identitas pribadi atas dasar emosional kesukuan, namun tidak ada konflik antar identitas.

Sedangkan suka dukanya memimpin Kota Palangka Raya menurut Riban antara lain menerima tamu yang bermacam-macam persoalan dari pagi, sepanjang hari sampai malam hari. Kemudian

dengan banyaknya berinteraksi dengan warga masyarakat, membuat Riban lebih memahami berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Riban menekankan bahwa Islam memberikan nilai-nilai sebagai landasan dalam berpolitik seperti kejujuran dan persamaan. Ia memberikan contoh bagaimana para khalifah (maksudnya di antara khulafa al-rasyidin, setelah wafatnya Nabi Muhammad saw) sebagai pemimpin sering turun ke masyarakat dan menyaksikan kehidupan masyarakat kecil sehari-hari. Ia sebagai walikota berusaha berperilaku seperti itu namun sering terbentur dengan acara-acara seremonial di masyarakat. Selain itu juga keterbatasan karena aspek geografis Kota Palangka Raya yang tidak semuanya dapat diakses dengan mudah perjalanan untuk sampai ke desa-desa terpencil.

Berkenaan dengan pemilihan kepala daerah atau pesta demokrasi, Riban berharap khususnya kepada warga masyarakat Kota Palangka Raya agar menggunakan hak pilih atau hak politik sesuai dengan hati nurani dan menghindari unsur kepentingan konsumtif dan pragmatis.

Pada pemilihan gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, Muhammad Riban Satia sempat “terdorong” untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Namun kemudian beberapa partai politik yang diharapkan mencalonkan dirinya ternyata tidak memberikan dukungannya membuat Riban berbalik arah dan menarik diri dari pencalonan gubernur. Riban pun belum sempat didaftarkan di KPU Kalteng. Riban menganulir pernyataannya semula bahwa ia mengajukan pengunduran diri sebagai walikota Palangka Raya karena akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kalteng.

Riban menyadari bahwa kesempatan dan amanat yang ia terima untuk memimpin daerah Kota Palangka Raya harus ditunai-kan selama periode 2013-2018. Selain itu, menurut Riban, dengan nada yang filosofis bahwa kesempatan yang diperoleh untuk

bersaing dalam pencalonan dan pemilihan kepala daerah itu berkaitan erat dengan adanya aspirasi rakyat juga karena izin dan ridha dari Allah Swt.



# DAFTAR PUSTAKA

---

- Azra, Azyumardi. 2015. *Muhammadiyah dan Politik, dalam Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government-Pustaka Pelajar.
- Bahtiar, Asep Purnama. Komitmen Muhammadiyah dalam Konteks Kebangsaan dan Good Governance, Dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. 15, No. 2
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Cahyono, dkk.. 2015. *Pendidikan Muhammadiyah 5*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Darlan, Norsanie dkk.. 2013. *Sejarah Muhammadiyah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: SDM Perkasa Palangkaraya.
- Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2007. *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*,. Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah.
- Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2017. *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah.
- Djazuli, A. 2007. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kuntowijoyo. 2000. *Muslim Tanpa Masjid, Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Mubarak, Adil. 2012. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang*. Universitas Negeri Padang, Laporan Penulisan dosen.
- Qodir, Zuly. 2010. *Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad kedua*. Yogyakarta,:Penerbit Kanisius.
- Subarkah, Milana Abdillah. Muhammadiyah dan Amal Usaha di Bidang Pendidikan dalam *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol.13 No.2 September 2017ISSN.1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187
- Thaha, Idris. 2004. *Demokrasi Religius: pemikiran Politik Nucholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Winarno, Budi. 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: Medpress.
- Nashir, Haidar. PP Muhammadiyah tak Larang Warganya Terlibat Politik Praktis dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/23/pdvn17384-pp-Muhammadiyah-tak-larang-warganya-terlibat-politik-praktis>
- Joko A Rizal, Meninjau Peran Muhammadiyah Pasca Reformasi dalam <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/529-meninjau-peran-Muhammadiyah-pasca-reformasi>

- Noname, Muhammadiyah dan Politik Praktis dalam  
<http://gema.uhamka.ac.id/2016/08/13/Muhammadiyah-dan-politik-praktis/>
- 20 Tahun Reformasi: Yang Terjadi Sepanjang Januari 1998 dalam  
<https://tirto.id/20-tahun-reformasi-yang-terjadi-sepanjang-januari-1998-cJBd>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002  
Kader dan Perkaderan oleh Bayu Wandira Yudha dalam  
<https://www.scribd.com/doc/54057570/Arti-Kader-Dan-Perkaderan>,
- Muallaf Muhammadiyah, Siapakah Mereka? Dalam  
<https://pwmu.co/41789/11/14/muallaf-Muhammadiyah-siapakah-mereka/>
- Bonosumz, Leadership (Kepemimpinan) dalam  
<https://www.wattpad.com/121687-leadership-kepemimpinan>
- Amir Hady, Konsep Dasar Perkaderan Muhammadiyah dalam  
<http://kaltim.Muhammadiyah.or.id/artikel-konsep-dasar-perkaderan-Muhammadiyah--detail-153.html>
- Buya Syafi'i Ma'arif dalam Ahmad Sholikin, Memutar Logika  
Filosofs Kader Muhammadiyah dalam  
[http://www.academia.edu/15028123/Memutar\\_Logika\\_Filosofis\\_Kader\\_Muhammadiyah](http://www.academia.edu/15028123/Memutar_Logika_Filosofis_Kader_Muhammadiyah)
- Iwan Awaludin Yusuf, Memahami Focus Group Discussion dalam  
<https://bincangmedia.wordpress.com/2011/03/28/relasi-media-dan-konsumtivisme-pada-remaja/>
- A. Qismany, Sejarah Muhammadiyah Kalsel, Kaltim dan Kalteng dalam  
<http://islambanjar.blogspot.com/2012/06/sejarah-Muhammadiyah-kalsel-kaltim-dan.html>

# BIODATA PENULIS

---



**Drs. Surya Sukti, M.A.**, lahir di Banjarmasin pada 16 Mei 1965. Nama orangtua, ayah Dahri dan ibu Judiah (*Allah yarhamhuma*). Ia anak keenam dari delapan bersaudara. Semasa balita ia tidak masuk Taman Kanak-kanak karena belum ada secara formal di masa itu. Ia hanya belajar mengaji al-Qur'an kepada beberapa 'guru ngaji' di kampung. Ia menamatkan Sekolah Dasar (1979) dan Sekolah Menengah

Pertama (1982) di Banjarmasin. Kemudian menamatkan Sekolah Menengah Atas (1985) di Palangka Raya. Ia pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 1985 selama setahun. Kemudian ia menyelesaikan kuliah (S1) di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari di Palangka Raya Jurusan Pendidikan Agama Islam (1992). Kemudian ia menyelesaikan kuliah S2 di Program Studi Pemikiran Hukum Islam pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2004). Sekarang ia sedang menyelesaikan studi S3 Program Doktor Politik Islam pada kampus yang sama. Pengalaman di organisasi: pernah menjadi ketua OSIS MTsN Kelayan Banjarmasin (1980-1981), menjadi ketua OSIS MAN Palangka Raya (1982-1983), anggota Pramuka Saka Wanabakti (1986-1987), pengurus Karang Taruna (1987-1988), pengurus HMI Cabang Palangka Raya (1991-1992), anggota BKPRMI Kota Palangka Raya (1994-2001), anggota BKPRMI

wilayah Kalteng (2001-2005), anggota MUI Kota Palangka Raya (2005-2010), anggota MUI Kalteng (2015-2020), anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) wilayah Kalteng (2009-2014) dan lain-lain. Pengalaman kerja: menjadi guru Bahasa Inggris di SLTP dan SLTA di Palangka Raya (1988-1990), menjadi jurnalis di Harian *Dinamika Berita* Perwakilan Kalteng (1990-1992) dan jurnalis *freelance* Tabloid *Jum'at* (1990-1992). Selain aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (sejak 1994-sekarang) ia juga pernah menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Ia pernah membuat beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah milik IAIN Palangka Raya dan luar kampus. Selain pernah aktif mengikuti beberapa pelatihan profesional, ia juga pernah aktif menjadi peserta di beberapa seminar nasional dan internasional.



**Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., M.H.**, adalah dosen di Fakultas Syaria'ah IAIN Palangka Raya. Terlahir di sebuah kampung pinggir Kota Semarang (Kudan), 3 Mei 1975 meraih gelar S1 pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo (UIN sekarang) di tahun 1998 dan S2 pada Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN) dengan konsentrasi Hukum Bisnis di tahun 2010.

Saat ini sedang mengikuti Program Doktor dengan konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI) di Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Program Bea Siswa MORA (*minister of Religion*) Kementerian Agama RI tahun 2019.

Ada beberapa karya ilmiah yang telah berhasil ditulis dan dipublikasikan. Di antaranya adalah *Prospek Hukum Islam Dalam*

*Konstelasi Hukum Nasional* (Jurnal Kajian Islam, 2014), *Wilayah Perbatasan Kalimantan Dalam Perspektif Hukum Agraria* (JSAM, 2014), *Pajak dalam Bingkai Syariah* (Pustaka Pelajar, 2015), *Tax Avoidance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak perspektif Islam* (Jurnal El-Mashlahah, 2018), *Nalar Hukum Islam Terhadap Konsep Perpajakan Modern* (JSAM, 2017). *Tax Avoidance From Perspective Of Islamic Law : The Case Of Sampi and Palangka Raya* (Proceeding ANCOSH, 2019), dan Ali Murtadho, et.al., *A POLITICS OF RECOGNITION: The Legislation of Zakat Law in a Transition of New Order and Reform Era* (Ulumuna, 2020). Serta beberapa artikel yang pernah diikutkan dalam International Conference.



**Erry Fitriya Primadhany, S.H.I., M.H.**, lahir di Palangka Raya tanggal 18 April 1990. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis sedang aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah dan menjadi pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Buku yang sudah dihasilkan, antara lain berjudul *Hukum Dagang Internasional*, *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2* yang ditulis bersama pakar-pakar Ekonomi Syari'ah dan *Sistem Jaminan Produk Halal*. Penulis juga aktif menulis artikel yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal terakreditasi.



**Maimunah, M.HI.** , lahir di Palangka Raya tanggal 27 September 1985. Menempuh pendidikan dasar di MIN Langkai Palangka Raya, MTsN Model Palangka Raya, pondok pesantren Ma'had al-Zaytun dan SMA Muhammadiyah Palangka Raya. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di STAIN Palangka Raya di Jurusan Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhshiyah) dan melanjutkan studi di IAIN Antasari Banjarmasin konsentrasi Filsafat Hukum Islam.

Saat ini sedang aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah dan menjadi pengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam. Mata kuliah yang diampu salah satunya adalah Hukum Perkawinan Islam.

# SINOPSIS

---

**T**erbukanya kran demokrasi di era Reformasi memberikan kesempatan bagi segenap kader anak bangsa untuk berpartisipasi dalam rekrutmen politik di berbagai level kepemimpinan publik. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) di era Reformasi ini telah memunculkan kader-kader pemimpin, baik yang berasal dari organisasi massa dengan *background* nasionalis keagamaan maupun yang nasionalis sekuler untuk menjadi pemimpin publik.

Munculnya kader-kader Muhammadiyah untuk ikut andil dalam kontestasi pemilihan kepala daerah merupakan fenomena baru dalam sejarah perpolitikan di Kalimantan Tengah pasca runtuhnya era otoritarianisme orde baru, meskipun dalam konteks historisnya kepemimpinan publik lahir dari pergerakan organisasi-organisasi massa yang ada pada waktu itu yang lahir atas dasar kesadaran perjuangan bangsa untuk keluar dari kolonialisme dan imperialisme.

Buku ini mengkaji mengenai persyarikatan Muhammadiyah dalam strategi gerakannya yang berupaya untuk melahirkan kader-kader pemimpin yang andal yang tidak saja berlaku di lingkungan organisasi Muhammadiyah sebagai kader persyarikatan akan tetapi juga menjadi kader umat dan kader bangsa sekaligus. Sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai proses kaderisasi kepemimpinan yang berlangsung di persyarikatan Muhammadiyah.